



PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH
LAUT

LAKIP 2021

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKP SDM)
KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Peluhari 70814 Telp. (0512) 21043 Faks. (0512) 21315
Website: www.bkpsdm.tanahlaut.go.id E-mail: bkpsdmkabtanahlaut@gmail.com



Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. Tejuddin Noor Effendi, M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19630808 198602 1 008

Iktislar Eksklusif

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut ke depan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan SDM ASN sesuai dengan Reformasi Birokrasi.

Dengan ketersediaan pegawai dibandingkan dengan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja serta penambahan ASN baru sangat sulit dan walaupun ada jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan yang pensiun, dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara beban kerja dengan jumlah pegawai yang ditempatkan pada tiap Organisasi Perangkat Daerah dimana pemenuhan SDM pada tiap Organisasi Perangkat Daerah mengalami kekurangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

2. Pengelolaan dan pengembangan Manajemen Talenta.

Pengembangan manajemen talenta harus didukung oleh penerapan sistem merit yang optimal guna menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki potensi yang sesuai jabatan yang akan diduduki. Dengan adanya manajemen talenta, ketentuan mengenai pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN. Dengan penerapan manajemen talenta pada pengisian JPT Pratama, dapat meminimalisir rumitnya proses dan besarnya anggaran



kenaikan untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama masih harus melalui proses seleksi JPT dengan tahapan panjang.

3. Pengelolaan peningkatan kompetensi SDM

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan mengembangkan kompetensi yang menjadi hak bagi setiap ASN minimal dua puluh (20) jam pelatihan (JP) dalam setahun. Pengembangan kompetensi menjadi permasalahan yang pelik, jika dikaitkan dengan jumlah ASN yang terus berkurang dalam jumlah banyak, penambahan ASN baru sangat sulit serta jumlah ASN baru tidak sebanding dengan yang pensiun, sehingga kualitas ASN masih jauh dari yang diharapkan, dapat mengakibatkan kesenjangan antara kompetensi dan kinerja, dikarenakan belum semua ASN memiliki semangat untuk mengembangkan diri, sementara itu tuntutan pelayanan publik terus meningkat, tuntutan proses aktivitas pekerjaan harus cepat, tepat, transparan, dan aparatur terus dituntut untuk meningkatkan kinerja.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut ke depan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
1. Struktur Organisasi	2
2. Tugas dan Fungsi	3
C. ISU – ISU STRATEGIS	9
D. SUMBER DAYA MANUSIA BKPSDM KABUPATEN TANAH LAUT	10
E. PRODUK DAN LAYANAN BKPSDM	13
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. VISI RPJMD KABUPATEN TANAH LAUT	15
B. MISI RPJMD KABUPATEN TANAH LAUT	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	26
1. Sasaran Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	27
2. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	37
3. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sekretaris (Eselon III) berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	63
4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja (Eselon III) Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	81
5. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja (Eselon III) Kepala Bidang Mutasi Data dan Informasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	107
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	143
1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021	143
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program Tahun Anggaran 2021	144
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021	145



BAB IV PENUTUP	146
A. KESIMPULAN	146
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	147

LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Bertanda Tangan
3. Cascading / Pohon Kinerja
4. Capaian Per Triwulan (1-4)
5. Monev Renstra
6. Matrik Keselarasan
7. Rencana Aksi dan Realisasi
8. Data Statistik



DAFTAR TABEL

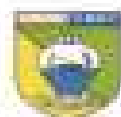
No Tabel	Judul Tabel	Halaman
II.1	Sasaran Strategis BKPSDM yang Termuat dalam RPJMD (2018-2023)	19
II.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut	21
II.3	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021	24
III.1	Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi	28
III.2	Pencapaian Sasaran (RPJMD) Terhadap Target Tahun 2021	28
III.3	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 atas Penilaian pada Periode Tahun Anggaran 2020	29
III.4	Realisasi Capaian Sasaran RPJMD terhadap Realisasi Tahun Sebelumnya	30
III.5	Perbandingan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perkomponen Pengungkit Tahun 2020 s/d 2021	31
III.6	Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi pertahun (2019 sd 2021) Berdasarkan Komponen Pengungkit	32
III.7	Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Berdasarkan Target RPJMD yang Termuat dalam Renstra	34
III.8	Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
III.9	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	39
III.10	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2021	40
III.11	Pendidikan dan Pelatihan Manajerial Tahun 2021	41
III.12	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN	44
III.13	Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 1	47

III.14	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2021	48
III.15	Realisasi Indikator Kinerja Jabatan Sesuai Kompetensi Tahun 2021	49
III.16	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang Memenuhi Standart Kompetensi	51
III.17	Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 2	53
III.18	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis 3 Tahun 2021	54
III.19	Kategori Mutu Pelayanan	55
III.20	Nilai Rata-rata (NRR) dan Survey Kepuasan Masyarakat 9 Unsur Pelayanan	56
III.21	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	57
III.22	Pencapaian Kinerja Indikator Utama dan Pendukung dengan Target Jangka Menengah Renstra BKPSDM (2018-2023)	60
III.23	Target dan Realisasi Kinerja Sekretaris Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	64
III.24	Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2021	65
III.25	Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2019 sd 2021	66
III.26	Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis Sekretaris	70
III.27	Target dan Realisasi Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	72
III.28	Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	75
III.29	Target dan Realisasi Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	77
III.30	Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian	79
III.31	Target dan Realisasi Kinerja Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	82
III.32	Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	89

III.33	Target dan Realisasi Kinerja Eselon IV Kasubbid Formasi dan Pengadaan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	91
III.34	Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Kinerja Kasubbid Formasi dan Pengadaan	95
III.35	Target dan Capaian Kinerja Eselon IV Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	97
III.36	Nama-nama Diklat Manajerial Tahun 2021	98
III.37	Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Kinerja Eselon IV Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	100
III.38	Target dan Capaian Kinerja Eselon IV Kasubbid Perencanaan Karier dan Fasilitasi Profesi Aparatur Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	102
III.39	Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Kinerja Eselon IV Kasubbid Perencanaan Karier dan Fasilitasi Profesi Aparatur	108
III.40	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Eselon III Kepala Bidang Mutasi, Data dan Informasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	108
III.41	Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Kinerja Eselon III Kepala Bidang Mutasi, Data dan Informasi	119
III.42	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Eselon IV Kasubbid Mutasi dan Kepangkatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	121
III.43	Rekapitulasi Kenaikan Pangkat Tahun 2021	124
III.44	Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Kinerja Eselon IV Kasubbid Mutasi dan Kepangkatan	127
III.45	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Eselon IV Kasubbid Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan Aparatur Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	129
III.46	Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Kinerja Eselon IV Kasubbid Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan Aparatur	136
III.47	Target dan Realisasi Capaian Indikator Eselon IV Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	137
III.48	Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Kinerja Eselon IV Kasubbid Data dan Informasi	142



III.49	Anggaran dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021	143
III.50	Anggaran dan Realisasi Menurut Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021	144



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut	2
2	Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Tekhnis	45
3	Kegiatan Penilaian Kompetensi untuk Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	52
4	Struktur Organisasi Sekretariat	63
5	Sumber Daya Aparatur Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	72
6	Sumber Daya Aparatur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	77
7	Struktur Organisasi Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	82
8	Sumber Daya Aparatur Sub Bidang Formasi Aparatur dan Pengadaan	90
9	Sumber Daya Aparatur Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	96
10	Sumber Daya Aparatur Sub Bidang Perjenjangan Karier dan Fasilitasi Profesi Aparatur	101
11	Sumber Daya Aparatur Bidang Mutasi Data dan Informasi	108
12	Hukuman Disiplin PP 94/2021	112
13	Sumber Daya Aparatur Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan	120
14	Sumber Daya Aparatur Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan Aparatur	128
15	Ramah Tamah Purna Tugas PNS	134
16	Sumber Daya Aparatur Sub Bidang Data dan Informasi	137



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

BAB I

PENDAHULUAN



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LAKIP
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bab I Berisi:

- A. Latar Belakang*
- B. Struktur Organisasi
Tungsi dan Tugas*
- C. Isi Strategis*
- D. Sumber Daya Manusia
(SDM)*
- E. Produk dan Layanan*
- F. Sistematika Penyajian*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
2. Mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, Tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam Tugas dan fungsi - fungsi yang harus dijalankan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut yakni :

Tugas

Membantu Bupati Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah

Untuk membantu Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi, yaitu :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas yang diemban, Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut didukung oleh unsur-unsur organisasi yang terdiri dari:

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan;
2. Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
5. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
7. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



9. Pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Sekretariat membawahi :

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

1.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

II. Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur

Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan diklat aparatur, formasi dan pengadaan, penjenjangan karier dan fasilitas profesi aparatur.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pengembangan dan formasi aparatur;
- b. Perumuskan kebijakan pengembangan diklat aparatur;
- c. Penyelenggaraan pengembangan diklat aparatur;
- d. Pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan formasi dan pengadaan;
- e. Perencanaan kebutuhan diklat dan non diklat;
- f. Fasilitasi pelaksanaan profesi aparatur;
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi;



- h. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- i. Penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
- k. Memverifikasi dokumen administrasi;
- l. Pengkoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;
- m. Fasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;
- n. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur, Membawahi :

2.1 Sub Bidang Formasi dan Pengadaan.

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan formasi dan pengadaan.

2.2 Sub Bidang Diklat Aparatur

Sub Bidang Diklat Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan diklat aparatur.

2.3 Sub Bidang Penjenjangan Karier dan Fasilitasi Profesi Aparatur.

Sub Bidang Penjenjangan Karier dan Fasilitasi Profesi Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penjenjangan karier dan fasilitasi profesi aparatur.

III. Bidang Mutasi, Data, dan Informasi

Bidang Mutasi, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan mutasi dan promosi, kepangkatan, disiplin dan penghargaan aparatur, penyiapan data dan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Mutasi, Data, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang mutasi, data dan informasi;
- b. Perumusan kebijakan mutasi dan promosi;
- c. Penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;
- e. Memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;
- f. Pemverifikasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi;
- g. Perumusan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
- h. Pengkoordinasian kegiatan penilaian kinerja;
- i. Mengevaluasi hasil penilaian kinerja;
- j. Memverifikasi usulan pemberian penghargaan;
- k. Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan;
- l. Penyiapan dan penyajian data dan informasi;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Mutasi, Data, dan Informasi, Membawahi,

3.1 Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan,

Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan mutasi dan kepangkatan.

3.2. Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin, dan Penghargaan Aparatur.

Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan pemberhentian, disiplin dan penghargaan aparatur.

3.3 Sub Bidang Data dan Informasi.

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, penyajian dan penyimpanan data dan informasi.

IV. Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



C. ISU - ISU STRATEGIS

Pemberian otonomi pada daerah tujuan agar daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. selain itu, pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. dalam struktur kepegawaian bagi PNS di Indonesia yang membedakan antara PNS pusat dengan PNS daerah menunjukkan asas desentralisasi. dengan desentralisasi, daerah mempunyai wewenang untuk menentukan kebutuhan dan mengatur administrasi kepegawaiannya melalui peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang kepegawaian antara lain berkaitan dengan penyusunan formasi, pengangkatan calon pegawai negeri sipil, pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil, penetapan kenaikan pangkat, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama ke bawah dan jabatan fungsional jenjang madya ke bawah serta pemberhentian pegawai.

Berkaitan dengan pengidentifikasian isu-isu strategis dalam hal kepegawaian, analisis atas isu-isu strategis merupakan bagian penting dan menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Laut untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Laut membutuhkan informasi-informasi yang menjadi petunjuk bagi organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Agar mendapatkan informasi yang akurat, organisasi melakukan identifikasi atas isu-isu strategis. Dengan mengetahui isu strategis organisasi dapat menganalisis poin apa yang harus dimaksimalkan secara optimal, penerapan strategi yang relevan serta menentukan arah pengembangan organisasi. Pengidentifikasian isu-isu strategis juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Beberapa permasalahan yang mengiringi proses manajemen kepegawaian antara lain:

1. Penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebagai pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional
2. Pemetaan pegawai dengan manajemen talenta untuk mewujudkan manajemen suksesi dalam implementasi merit system sesuai amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Pengembangan aplikasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian yang mudah, tepat waktu, dan akuntabel.

D. SUMBER DAYA MANUSIA BKPSDM KABUPATEN TANAH LAUT

Jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 sebanyak 31 Orang, dengan rincian:

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SMA	2 orang	3 orang	5 orang
2.	D3	5 orang	6 orang	11 orang
3.	D4	1 orang	0 orang	1 orang
4.	S1	5 orang	6 orang	11 orang
5.	S2	2 orang	1 orang	3 orang
Jumlah				31 orang



b. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan

Tabel L2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	3 orang	-	3 orang
2.	Golongan III	9 orang	10 orang	19 orang
3.	Golongan II	3 orang	6 orang	9 orang
4.	Golongan I	-	-	1 orang
Jumlah				31 orang



c. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan	1 orang	-	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang	-	1 orang
3.	Kepala Bidang	2 orang	-	2 orang
4.	Kepala Subbid/ Kepala Subbag	5 orang	3 orang	8 orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	2 orang	2 orang
6.	Jabatan Fungsional Umum	7 orang	10 orang	17 orang
Jumlah				31 orang



E. PRODUK DAN LAYANAN BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Tanah Laut menerapkan sistem pelayanan kepegawaian satu pintu untuk mengoptimalkan pelayanan dan sebagai bentuk transparansi, yang mana penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagai bentuk implementasi reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada prinsipnya BKPSDM ingin memberikan pelayanan prima yang berkualitas, cepat, mudah, transparan, terjangkau dan terukur. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana istilah pelayanan birokrasi dari meja ke meja, maka dengan debirokratisasi pelayanan terpadu satu pintu diharapkan mengurangi tata kerja menjadi satu meja. Ini juga sesuai dengan tolak ukur standar pelayanan publik dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Semua pelayanan administrasi kepegawaian terpusat di front office, baik mengurus masalah administrasi seperti penyerahan SK, pemasukan berkas, surat masuk/keluar maupun hal-hal lain yang bersifat konsultasi.

Jenis - Jenis Pelayanan yang terdapat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, adalah sebagai berikut :

- Kenaikan Berkala maupun Kenaikan Pangkat PNS
- Pengurusan KARPEG, KARIS dan KARSU
- Izin Perceraian
- Pengajuan Cuti
- Pelayanan Tugas Belajar
- Pelayanan Pensiun PNS
- Pelayanan Izin Belajar dan Tugas Belajar
- Pelayanan Mutasi Keluar Masuk PNS
- Pelayanan Pengangkatan / Pembebasan sementara PNS dalam JFT
- Pelayanan Diklat Prajabatan dan Diklat manajerial (PIM Tingkat II, III dan IV)
- Pelayanan Diklat Fungsional / Tekhnis
- Pelayanan Assessment
- Pelayanan Pencantuman Gelar
- Pelayanan Pengangkatan CPNS dan PNS
- Pelayanan Pengambilan Sumpah PNS
- Pelayanan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 merupakan suatu media yang mengkomunikasikan pencapaian target kinerja organisasi di tahun 2021. Pencapaian target kinerja organisasi pada periode tersebut diukur melalui perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam 1 (satu) tahun. Melalui analisis capaian target kinerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan mampu untuk mengidentifikasi celah kinerja (performance gap) yang dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 adalah :

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut serta menjabarkan maksud, tujuan penyusunan dan penyampaian LKj tahun 2021.

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Mengikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja BKPSDM Kabupaten Tanah Laut dan Rencana Kinerja tahun 2021.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan analisis capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Tanah Laut, baik capaian kegiatan maupun sasaran strategis tahun 2021 termasuk akuntabilitas keuangan.

BAB IV : Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh serta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LAKIP
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab II Berisi :

- A. Visi RPJMD*
- B. Misi RPJMD*
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis*
- D. Indikator Kinerja Utama*
- E. Perjanjian Kinerja*
- F. Program dan Kegiatan*

Penyusunan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan

langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

A. VISI RPJMD KABUPATEN TANAH LAUT



VISI

*"Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut yang BerInTeRAksi"
(Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi)*



Dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Memasuk Tahun 2018, Badan Kepegawaian dan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023. Renstra Badan Kepegawaian dan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut merupakan manifestasi komitmen Badan Kepegawaian dan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, penuntasan Renstra Badan Kepegawaian dan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

B. MISI RPJMD KABUPATEN TANAH LAUT



Untuk mewujudkan “ **Tanah Laut yang BERINTERAKSI**” maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut periode 2018 – 2023 yakni :



1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Mendapatkan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. *Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).*
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut berkontribusi dalam pencapaian misi ke 3 (ketiga) yakni :

*“Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik
(Good Governance)”*

dalam lingkup bidang kepegawaian misi ini mengisyaratkan perlunya Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut selaku unsur penunjang bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BKPSPM



Tujuan merupakan rumusan kondisi yang hendak diuju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023.

Adapun Tujuan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut yang termuat dalam RPJMD adalah ***"Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)"***.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dalam bentuk ketetapan dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu, sasaran ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut yang termuat dalam RPJMD adalah ***"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi pelayanan publik"*** dengan Indikator Sasaran yakni ***"Indeks Reformasi Birokrasi"***

Misi 3	:	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)
Tujuan	:	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)
Sasaran	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
Indikator Sasaran	:	Indeks Reformasi Birokrasi

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Sasaran Strategis BKPSDM yang termuat dalam RPJMD (2018 – 2023)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PER TAHUN					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	-	67	69	70	70	75

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan dasar peraturan Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan dan RB No 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dengan sasaran Birokrasi yang bersih dan Akuntabel, efektif dan Efisien dan Memiliki pelayanan Publik berkualitas



D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholder's yang menunjukkan peran utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan reformasi birokrasi pada bidang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (outcome).



Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu **tujuan** dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan **kinerja** dan peningkatan **akuntabilitas kinerja**.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut **Nomor 195 Tahun 2019** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut di tetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu :

1. Persentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Tekhnis.
2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi
3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Tabel II.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumusan
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara	1	Persentase pegawai yang Mengikuti Diklat peningkatan kompetensi : - Kompetensi manajerial	<i>jumlah pegawai yang sudah mengikuti diklat manajerial dibagi / jumlah Jabatan Struktural kabupaten tanah laut</i>
			- Kompetensi teknis	<i>Jumlah pegawai yang sudah mengikuti diklat teknis dibagi / jumlah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Kabupaten Tanah Laut</i>
2	Meningkatnya aparatur sipil negara yang memenuhi standard kompetensi	1	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	<i>Jumlah pegawai yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan dibagi / jumlah jabatan yang tersedia sesuai kompetensi</i>
3	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawain	1	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawain :	<i>Jumlah Nilai penurus dibagi / jumlah unsur yang terisi</i>
			- Nilai rata - rata unsur	
			➢ Nilai rata – rata tertimbang	<i>Jumlah nilai rata - rata unsur dikali 0.1</i>
			➢ Nilai IKM	<i>Jumlah rata rata tertimbang dikali 25</i>

E. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021



Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja :

- Wujud nyata komitmen, Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi Kinerja Aparatur
- Dasar Penilaian, Penghargaan dan sanksi
- Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi
- Dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai

Secara formal, pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan Bupati Kabupaten Tanah Laut beserta formulir Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Menteri yang mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran yang mana Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lambat 1 (satu) Bulan setelah Dokumen Anggaran di sahkan, Perjanjian Kinerja (PK) terdapat dalam daftar lampiran, dan secara ringkas diustrasikan dalam matriks berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. N. Surodipati No. 100 Pekanbaru 28155 Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Untuk tenaga manajerial manajemen pemerintahan yang efektif, terampil dan akuntabel serta berprestasi pada tahun, tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

Nama : Drs. H. Tanjung Nasir Effendi, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tanah Laut

Sebagai atasan **PESAN POKOK**

Nama : H. SUKANTA

Jabatan : Bupati Kabupaten Tanah Laut

Sebagai atasan **PESAN POKOK**, selanjutnya disebut **PESAN KEDUA**

Pesan pertama tercapai akan menunjukkan target kinerja yang selanjutnya akan tercapai sepanjang ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang selanjutnya seperti yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pesan kedua akan melibatkan superior yang diperlukan untuk akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kami dan sepanjang ini akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pencapaian dan nilai

Bupati Tanah Laut



Pekalongan, 26 Oktober 2021

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. Tanjung Nasir Effendi, M.Si
NIP. 200601001 200601 1 0000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	1 Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis	81,22%
2	Meningkatnya Aparatur Sipil Negara Yang Memenuhi Standard Kompetensi	2 Persentase Aparatur yang memenuhi Standar kompetensi	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	3 Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Baik
NO	PROGRAM		ANGGARAN
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KABUPATEN/KOTA		34.699.329.201
II	KEPEGAWAIAN DAERAH		4.678.183.578
III	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		3.188.360.090



F. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2021 tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Tanah Laut mendapat dukungan pagu anggaran belanja yang bersumber dari APBD yang mana karena Adanya *pandemic* virus Covid-19 di Indonesia mengharuskan pemerintah daerah melakukan penanganan yang cepat dan terukur, terutama dalam aspek keuangan, sehingga dilaksanakan realokasi anggaran dalam menghadapi *pandemic* tersebut dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yakni **3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan**

Tabel II. 3
Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN		PAGU ANGGARAN
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA	I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.520.350
		II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.895.370.872
		III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.673.500
		IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.098.119.029
		V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.178.350
		VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.187.100
II	KEPEGAWAIAN DAERAH	VII	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.558.638.588
		VIII	Mutasi dan Promosi ASN	737.974.380
		IX	Pengembangan Kompetensi ASN	1.991.919.060
		X	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	272.789.870
III	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	XI	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi manajerial dan Fungsional	2.684.238.580



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LAKIP
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III Berisi :

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk Mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sesuai Perpres No. 29 Tahun 2014 Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipercaya dan diberi tugas untuk membentuk dan mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas. Oleh karena itu Badan Kepegawaian dan



Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut berkewajiban melaporkan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Laporan capaian kinerja ini merupakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja di bidang kepegawaian yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis, indikator kinerja, program dan kegiatan yang ditetapkan Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan berisikan :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dengan target jangka menengah yang terdapat di dalam dokumen renstra
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilaksanakan

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja atas Pengukuran :

1. capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran RPJMD
2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Eselon II
3. Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon III
4. Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon IV

1. Sasaran Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

A. Capaian Target RPJMD (2018 - 2023) pada Tahun 2021

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut mendukung *MISI ke 3*, dengan Indikator Nilai RB yang mana Hasil pencapaian kinerja diperoleh melalui



pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut rangka mewujudkan Visi dan misi Bupati Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, yang menegaskan akan pentingnya penerapan *clean government* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Dengan berdasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023,

Komponen - komponen digunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut :

Tabel III.1
Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Sangat baik
3	BB	>70-80	Baik
4	B	>60-70	Cukup Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Buruk
7	D	0-30	Sangat Buruk

Evaluasi PMPRB Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang dimulai pada Juli 2021 dan sekaligus hasil penilaian dilaporkan kepada Kementerian PANRB secara online. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021, untuk tahun penilaian Periode 2020 dengan target 70 (Baik) dengan Capaian adalah sebesar 27,06 (74,55) atau termasuk dalam kategori BB (Baik).

Tabel III.2
Pencapaian Sasaran (RPJMD) Terhadap Target Tahun 2021

MISI	"Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik" (Good Governance)			
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	70	74,55	BB (BAIK)

Nilai tersebut merupakan akumulasi dari pemenuhan dokumen 8 (delapan) area perubahan. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.3

Hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021
Atas Penilaian pada periode Tahun Anggaran 2020

No.	Komponen/Sub-Komponen	Hasil Penilaian	
1	2	3	4
A	Komponen Pengungkit / Proses	Nilai	%
1	Manajemen Perubahan	1,38	67,90
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	100,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,17	68,25
4	Penataan Tataaksana	0,88	67,50
5	Penataan Manajemen SDM	1,21	66,50
6	Penguatan Akuntabilitas	2,22	88,87
7	Penguatan Pengawasan	1,08	49,25
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,81	72,25
Jumlah		10,76	73,73
B	Reform	Nilai	%
1	Manajemen Perubahan	2,59	66,17
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	100,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	0,00	0,00
4	Penataan Tataaksana	2,58	68,69
5	Penataan Manajemen SDM	2,00	100,00
6	Penguatan Akuntabilitas	2,68	71,48
7	Penguatan Pengawasan	1,95	100,00
8	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2,50	66,67
Jumlah		16,54	70,21

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

Perbandingan tingkat pencapaian sasaran strategis Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada BKPSDM Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 dengan tahun lalu apakah mengalami peningkatan atau pun penurunan dalam pencapaiannya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.4
Realisasi capaian sasaran RPJMD
terhadap realisasi Tahun sebelumnya

Sasaran	Indikator	2021			2020		
		T	R	C	T	R	C
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	70	74,5	106	69	93,15	135

T= Target (%), R = realisasi (%), C = capaian (%)

Jika dilihat dari Tabel di atas pada Penilaian masing masing Periode dan dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 terjadi *Penurunan* terhadap Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di tahun ini, yang mana nilai atas penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun lalu dengan target 67 dengan realisasi 93,15 atau dengan Predikat Istimewa sedangkan pada Tahun ini atas Penilaian Reformasi Birokrasi BKPSDM dengan Target 70 dengan capaian 75 atau dengan Predikat Baik namun untuk pencapaian target Kinerja pada sasaran RPJMD tercapai 100%.



Tabel III.5
Perbandingan hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Perkomponen Pengungkit Tahun 2020 s/d 2021

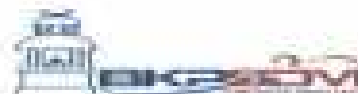
KOMPONEN PENGUNGKIT/ PROSES		2020		2021	
		NILAI	%	NILAI	%
I.	Manajemen Perubahan	2.00	100	1.36	67.90
II.	Penataan Peraturan perundang undangan	1.00	100	1.00	100
III.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1.00	100	1.17	58.25
IV.	Penataan Tata Laksana	1.75	35.88	0.88	87.50
V.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1.24	88.57	1.21	88.90
VI.	Penguatan Akuntabilitas	2.50	100	2.22	88.87
VII.	Penguatan Pengawasan	2.10	95.45	1.08	49.25
VIII.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.28	90.40	1.81	72.25
KOMPONEN HASIL				10.73	73.73
I.	Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi	13.23	66.13	13.23	66.13
II.	Pemerintah yang bersih & Bebas KKN	98.01	80.05	98.01	80.05
III.	Kualitas Layanan Publik	6.94	69.4	6.94	69.4
REFORM					
I.	Manajemen Perubahan			2.58	88.17
II.	Deregulasi Kebijakan			2.00	100
III.	Penataan dan Penguatan Organisasi			0.00	0.00
IV.	Penataan Tata Laksana			2.58	68.89
V.	Pelaksanaan Manajemen SDM			2.00	100
VI.	Penguatan Akuntabilitas			2.68	71.48
VII.	Penguatan Pengawasan			1.95	100
VIII.	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			2.50	68.67
TOTAL HASIL		13.80	79.43	18.54	78.21
INDEKS RB		93.15	AA	74.55	BB



Tabel III.6

Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi pertahun (2019 sd 2021)
Berdasarkan Komponen pengungkit

KOMPONEN PENGUNGKIT/ PROSES		2020		2021		2019	
		NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
I.	Manajemen Perubahan	2,00	100	1,36	67,90	2,50	50
II.	Penataan Peraturan perundang undangan	1,00	100	1,00	100	1,25	25
III.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,00	100	1,17	58,25	1,50	25
IV.	Penataan Tata Laksana	1,75	35,88	0,88	87,50	1,75	35,88
V.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,24	88,57	1,21	86,60	3,50	23,33
VI.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	100	2,22	88,87	2,55	42,56
VII.	Penguatan Pengawasan	2,10	95,45	1,08	40,25	4,95	41,25
VIII.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,25	90,40	1,81	72,25	4,50	75
KOMPONEN HASIL							
I.	Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi	13,23	66,13	13,23	66,13	13,23	66,13
II.	Pemerintah yang bersih & Bebas KKN	98,01	80,05	98,01	80,05	98,01	80,05
III.	Kualitas Layanan Publik	6,94	69,4	6,94	69,4	6,94	69,4
REFORM							
I.	Manajemen Perubahan			2,59	86,17		
II.	Deregulasi Kebijakan			2,00	100		



III.	Penataan dan Penguatan Organisasi			0,00	0,00		
IV.	Penataan Tata Laksana			2,58	68,89		
V.	Pelaksanaan Manajemen SDM			2,00	100		
VI.	Penguatan Akuntabilitas			2,88	71,48		
VII.	Penguatan Pengawasan			1,95	100		
VIII.	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			2,50	66,67		
TOTAL HASIL		13,60	79,43	16,54	76,21	28,17	70,43
INDEKS RB		93,15	AA	74,55	BB	50,17	CC

Pada tabel diatas pada tahu 2019 penilaian dengan Predkat CC (50,17), telah ditindak lanjuti dan di evaluasi pada 8 (delapan) area Perubahan, sehingga pada tahun 2020 terdapat peningkatan Nilai Indeks RB yang sangat signifikan yakni dengan Predikat AA (93,15) akan tetapi pada tahun 2021 ada Penurunan nilai Indeks RB pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut yakni dengan Nilai BB (74,55) ada penurunan nilai RB pada tahun 2021 yakni 19,97%



C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Di Dalam Dokumen Renstra (2018- 2023)

Tabel III.7

Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Berdasarkan Target RPJMD yang termuat dalam Renstra

Sasaran	Indikator	2019			2020			2021			Target Akhir Renstra (%)	Capaian Tahun 2021 terhadap target Akhir Renstra (%)
		T	R	C	T	R	C	T	R	C		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	67	70.43	105	68	93.15	135	70	74.55	106	75	99.40

T= Target (%), R = realisasi (%), C = capaian (%)



D. Strategi yang akan dilakukan untuk Meningkatkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Guna menjamin perbaikan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dan mendukung Pelaksanaan Reformasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk periode berikutnya, maka Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi BKPSDM berupaya melakukan Perbaikan sesuai dengan saran dan Masukan dari Tim assesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yakni pada area :

a. Manajemen Perubahan

Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut;

b. Deregulasi Kebijakan

Melakukan dan merindaklanjuti identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM dengan melakukan revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penataan Tatalaksana

Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala.

d. Penataan Sistem Manajemen SDM

- 1) Menjadikan penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian *reward and punishment* lainnya;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku;
- 3) Mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
- 4) Melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ.

e. Penguatan Akuntabilitas

Melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala;

f. Penguatan Pengawasan

- 1) Meningkatkan *public campaign* terkait pengendalian gratifikasi;
- 2) Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi;
- 3) Melakukan kegiatan pengendalian risiko yang telah diidentifikasi;
- 4) Memantau pengendalian intern melalui *money* secara berkala;
- 5) Melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI);
- 6) Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat secara berkala;
- 7) Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;
- 8) Melakukan sosialisasi terkait (WBS) kepada seluruh pegawai;
- 9) Melakukan sosialisasi terkait benturan kepentingan kepada seluruh pegawai;
- 10) Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Memaklumkan seluruh standar pelayanan dan mempublikasikannya minimal di dalam website;
- 2) Melakukan *reviu* dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat, serta memanfaatkan masukan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- 3) Menetapkan dan mengimplementasikan sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan;
- 4) Meningkatkan inovasi pelayanan sehingga mendapatkan pengakuan secara nasional dan/atau internasional;
- 5) Meningkatkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan BKPSPDM;
- 6) Meningkatkan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

2. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan penilaian kinerja yang mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur

dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tanah Laut. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkatcapaian kinerja yaitu:

Tabel III.8
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

(sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dan 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintah perlu menetapkan indikator Kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat Daerah atau dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan Formulasi yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja eselon II.



Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Tanah Laut ditetapkan Surat Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Nomor 117/BKPSDM/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut. Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Eselon II BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 pada tabel capaian IKU SKPD Tahun 2021 dibawah ini

Tabel III.9
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Akhir Renstra (%)	Perbandingan Capaian terhadap Target Akhir Renstra (%)
Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara						
1	Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi :	81.22	89.45	110	86.61	103.28
	- Kompetensi Manajerial	97.58	81.48		100	
	- Kompetensi Tekhnis	64.85	97.41		73.22	
Sasaran Strategis II : Meningkatnya Aparatur Negara yang memenuhi Standart Kompetensi						
2	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standard Kompetensi	100	105	105	100	105
Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian						
3	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Baik	Sangat Baik	100	Baik	100
	- Nilai rata – rata unsur		3.5324			
	- Nilai rata – rata terimbang		3.564			
	- Nilai IKM		89.11			
Rata-rata capaian sasaran strategis			98.15%	105.00%	95.54%	102.76%

Capaian sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 rata rata melebihi target di mana capaian pada 3 (tiga) Sasaran strategis mencapai 100% hanya saja pada Indikator Kompetensi Manajerial masih di bawah target karena tidak terlaksananya Diklat Kompetensi untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat IV karena Kendala sarana dan prasarana dan waktu karena Covid 19 namun jika dihitung dari Nilai Rata rata sasaran Strategis dengan Realisasi dengan interval nilai kinerja dengan nilai 98.15 atau dengan Kriteria **Sangat Baik**.

2.1 Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 1

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan *capability* atau keahlian *expertise* yang lebih dari sekedar keterampilan *skill* belaka. Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan. Pada Sasaran Strategis 1 untuk indikator kinerja Persentase pegawai yang Mengikuti diklat peningkatan kompetensi dengan Target 81,22% dengan Capaian 110 % yakni pada Pendidikan dan Pelatihan

Tabel III.10
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Strategis 1
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara				
1.	Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi :	81.22	89.46	110
	- Kompetensi Manajerial	97.58	81.48	
	- Kompetensi Tekhnis	64.85	97.41	

a. Kompetensi Manajerial

Kompetensi Manajerial (*managerial competence*) adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial/ Kepemimpinan yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip *good governance*

Capaian Indikator *Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial* ini yakni pada Tahun 2021 diklat manajerial dengan target **216 (dua ratus enam belas)** orang untuk pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) sebanyak 2 (dua) orang, dan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 2 (dua) orang, Kepemimpinan pengawas (PKP) sebanyak 40 (empat puluh) dan Latihan Dasar (Prajab) CPNS Formasi 2019 sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) CPNS dengan realisasi **176 (seratus tujuh puluh enam)** orang, yang Terdiri untuk diklat,PIM II dan III sebanyak 4 (empat) dan Latsar CPNS sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang , Capaian **81,48%**, dari target **97,68%**

Tabel III.11
Pendidikan dan Pelatihan Manajerial
Tahun 2021

NAMA DIKLAT MANAJERIAL		KET
1.	Penyertaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) TK. II Angkatan VIII Tahun 2021 di BPSDMD Prov Kalsel	2 orang
2.	Penyertaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I	1 orang
3.	Penyertaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III	1 orang
4.	Latihan Dasar CPNS	172 Orang

b. Kompetensi Teknis

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengamanatkan bahwa pengembangan Sumber Data Aparatur Sipil Negara (ASN) mutlak dilakukan. Salah satunya, dengan mewajibkan ASN mengikuti pelatihan minimal 20 jam per tahun, yang mana reformasi birokrasi sebagai upaya melakukan pembaharuan aspek ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur, menuntut terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien. Karenanya, sebagai konsekuensi logis, para ASN dituntut memiliki kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan pemerintahan pada bidang masing masing. "Pengembangan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, *job training*, seminar, lokakarya.

Untuk Capaian Indikator *Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis/fungsional* ini dari target 116 ASN terealisasi sebanyak 113 ASN atau dengan realisasi 97,41 % dari target yaitu diklat teknis/fungsional :

- a. Penyertaan Pelatihan Fungsional Ahli Penyuluh Pertanian sebanyak 2 (dua) orang
- b. Pelatihan Teknis juru Sita Pajak sebanyak 2 (dua) orang
- c. Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014, PP no. 30 Tahun 2019 dan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 sebanyak 14 (empat Belas) orang
- d. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 40 (empat puluh) orang
- e. Pelatihan Empowering Employee Program sebanyak 30 (tiga puluh) orang
- f. Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang

Pendukung Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1

1. Adanya Pengalihan Proses Pembelajaran klasikal Menjadi pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) melalui Video Conference dimana Widyaiswara/ Narasumber berada di BKPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan Peserta berada di masing masing titik lokasi
2. Terbitnya Surat Edaran Kepala LAN Nomor 10/K.1/Hkm.02.2/2020 tentang Panduan Tehnis Penyelenggaraan Pelatihan dalam masa Pandemi Covid 19 sebagai acuan bagi Lembaga penyelenggara Pelatihan, Peserta dan Tenaga Pelatihan dalam menyelenggarakan Pelatihan pada masa Covid 19 yang memuat Tekhnis Penyelenggaraan PKN I, II dan PKA, PKP maupun Latsar CPNS

Penghambat Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1

1. Sarana dan prasarana diklat kurang memadai, dan Keterbatasan sarana diklat (asrama dan ruang belajar) untuk pelaksanaan pelatihan sehingga dalam pelaksanaan pelatihan harus bergantian (tidak bisa bersamaan)
2. Terbatasnya Kuota jumlah kebutuhan diklat dari SKPD Tidak semua ASN bisa mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhannya
3. Terdapatnya pandangan bahwa kegiatan Diklat hanya sebagai penugasan bukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi/kebutuhan
4. Perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan.

langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator ini di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana Diklat serta menyediakan anggaran untuk sewa alternatif tempat penyelenggaraan Diklat pada masa Covid
2. Meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara Diklat kepemimpinan baik dengan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan maupun dengan Lembaga Administrasi Negara.
3. Membuat analisis kebutuhan diklat untuk ASN setiap tahun.

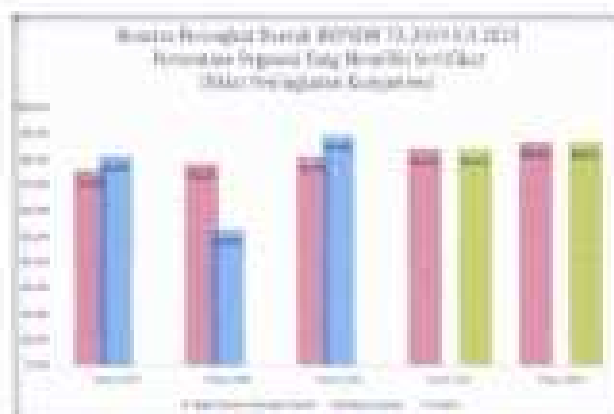
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dengan Realisasi Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel III.12
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN

Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	308	244	79,22	76	40	52,63	332	289	87,1
- Kompetensi Manajerial	283	221	64,03	28	11	42,3	216	176	81,48
- Kompetensi Teknis	45	23	51,11	50	29	58	116	113	97,41

T = Target (orang), R = Realisasi (orang), C = Capaian (%)

Tahun Anggaran 2021 Capaian Kinerja untuk indikator Persentase Pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi baik Manajerial maupun Teknis memenuhi target atau mengalami peningkatan jika

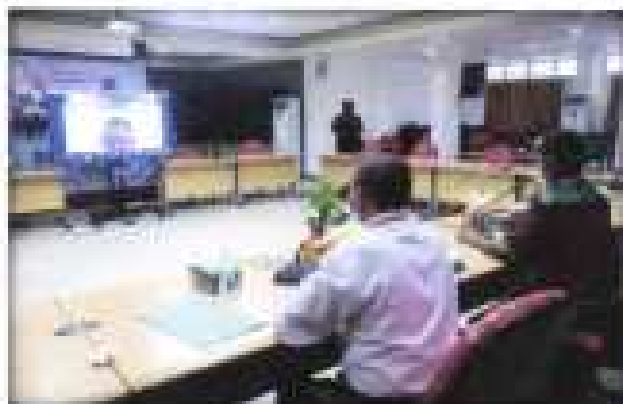


dibandingkan Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 dengan Tahun 2019 Capaian Kinerja 79,22 % dan Tahun 2020 ada Penurunan Capaian Kinerja yang hanya mencapai 52,63 %, ini dikarenakan :

1. Perbedaan Target setiap Tahun nya dan Refocusing Anggaran
2. Pada Tahun 2020 Kegiatan Peningkatan Kompetensi untuk diklat Kepemimpinan tidak Bisa dilaksanakan Karena Pandemi Covid – 19 maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu instansi penyelenggara pelatihan turut merasakan dampaknya. Berbagai pelatihan tatap muka yang sejatinya diselenggarakan terpaksa harus ditunda. Kondisi ini tentu saja memerlukan penyesuaian-

penyesuaian baik, dengan memundurkan jadwal

Gambar 2
Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Tekhnis







Tabel III.13
Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Fisik		Capaian (%)	Realisasi Anggaran		Capaian (%)
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	81.22%			87,05	2.684.238.500	1.276.176.300	47,62
		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	332 org	289 org	87,05	2.684.238.500	1.276.176.300	47,62

2.2 Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 2

Tabel III.14
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis 2
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Sasaran Strategis II : Meningkatnya Aparatur Negara yang memenuhi Standart Kompetensi				
1.	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standard Kompetensi	100	106	100

Uraian Capaian pada Sasaran Strategis 2

Kriteria untuk aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan adalah aparatur yang memenuhi syarat jabatan sebagaimana diatur dalam analisis jabatan. Untuk pejabat struktural, syarat jabatan yang menjadi aspek penilaian adalah tingkat pendidikan, pangkat/golongan ruang, dan kelulusan dalam diklat kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat jabatannya masing-masing. Sedangkan untuk pelaksana, kriteria yang dipakai untuk mengidentifikasi pegawai yang memenuhi kompetensi adalah pegawai yang telah mengikuti uji kompetensi, serta CPNS dan PNS yang diangkat melalui sistem CAT.

Berdasarkan kriteria tersebut, aparatur yang telah memenuhi kompetensi jabatan pada tahun 2021 sebanyak target 3185 orang PNS dengan realisasi 3.397 orang PNS yang memenuhi Kompetensi baik untuk menempati jabatan, Promosi dan Mutasi maupun memenuhi syarat naik pangkat atau dengan Capaian 106%. Sementara target yang ditetapkan untuk tahun 2020 sebesar 100%, dengan demikian tingkat capaian dari indikator sasaran ini sebesar 104 %.

Upaya Pencapaian target Kinerja Aparatur yang memenuhi Kompetensi jabatan, pada Tahun 2021 BKPSDM Kabupaten Tanah Laut melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Menyusun Kebutuhan Pegawai atau Bezetting pegawai Negeri Sipil (Jumlah kekuatan Pegawai Negeri Sipil yang ada) merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam penetapan formasi PNS hal ini bertujuan agar setiap organisasi mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing masing organisasi
- b. Melaksanakan *talent mapping* yang dilakukan dalam bentuk asesmen, yakni suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan individu yang memenuhi kompetensi-kompetensi tertentu dalam rangka menjalankan suatu pekerjaan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab di suatu level jabatan

Tabel III.15
Realisasi Indikator Kinerja Jabatan Sesuai Kompetensi
tahun 2021

No.	Uraian	2021		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1.	Jumlah mutasi ASN dalam jabatan Pelaksana dan jabatan Fungsional	600 Orang	214 Orang	35,67%
2.	Jumlah Mutasi dan Promosi bagi ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	360 Orang	571 Orang	183%
3.	Jumlah Mutasi ASN Keluar dan Masuk Lingkup Pemkab Tanah Laut	30 orang	33 Orang	110%
4.	Jumlah keputusan Bupati tentang Gaji berkala	1500 Orang	1832 orang	122%
5.	Jumlah keputusan Bupati tentang kenaikan pangkat	700 orang	742 orang	106%
6.	Jumlah Promosi Jabatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	5 orang	5 Orang	100%

Pendukung Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2

1. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN (pasal 2) Dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi ASN
2. Terlaksananya Lelang Jabatan/ Seleksi Terbuka untuk mengisi Kekosongan Jabatan Eselon II pada 5 SKPD dengan standar metode, dan penilaian dalam metode *assessment center* dan uji kompetensi
3. Karena adanya evaluasi jabatan, terbitnya regulasi baru dan menyesuaikan kebutuhan Organisasi sehingga dibutuhkan proses mutasi promosi

Hambatan Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2

1. Belum terpenuhinya syarat minimal pangkat untuk dapat menduduki jabatan yang tersedia
2. Terbatasnya Sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dalam menduduki jabatan
3. Adanya Kebijakan Moratorium Penerimaan CPNS (2015 – 2018) yang berdampak pada rasio Beban Kerja yang Tidak Optimal

langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator ini di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perlunya regulasi dan penataan yang terencana dan berkesinambungan terhadap pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan diuangkan dalam Peraturan Kepala Daerah
2. Mensosialisasikan Peraturan Menteri PANRB No. 3/2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Regulasi itu mendukung ASN yang memiliki performa dan kompetensi tinggi agar terus dikembangkan dan Mempersiapkan pemberlakuan merit system
3. Mendorong aparatur untuk mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjang jabatan

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Dengan Realisasi Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel III.16
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang Memenuhi
Standart Kompetensi

Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang Memenuhi Standart Kompetensi	696	664	94,99	2000	2063	104	2186	3397	106

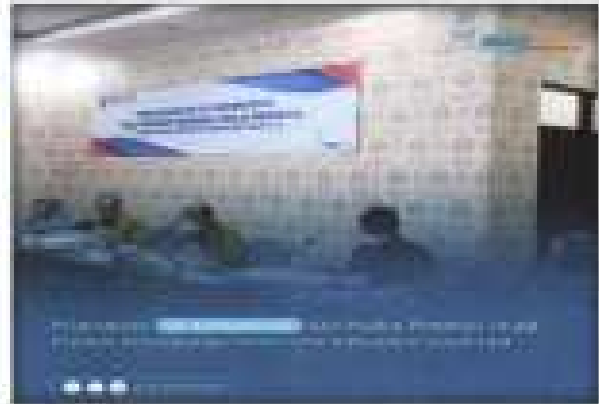
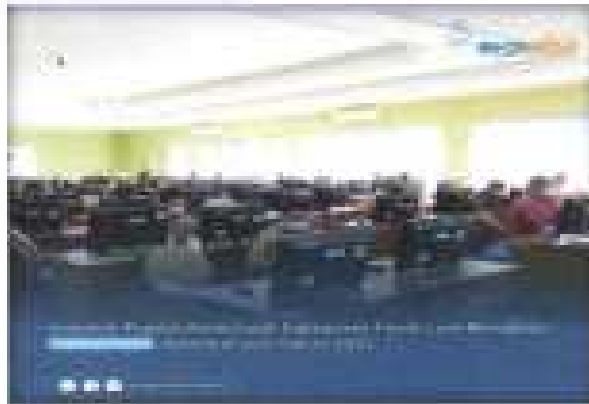
T = Target (orang), R = Realisasi (orang), C = Capaian (%)



Dari tabel dan Diagram Perbandingan diatas dari tahun pertahun selalu mengalami Peningkatan realisasi dalam pencapaian hal ini dikarenakan ada Perbedaan target

yang ditetapkan dan perbedaan dalam target yang akan dicapai jika dibandingkan dengan Capaian tahun 2021 ada kenaikan sebesar 2% dibandingkan Tahun 2019 dan 2020 hal ini di karenakan Masih berprosesnya hasil analisis beban kerja untuk bahan penataan SDM dan implementasi hasil pemetaan kompetensi dari hasil analisis jabatan untuk fungsional umum/pelaksana/Maupun Jabatan Struktural untuk menyusun standar kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai bahan dasar penempatan dalam jabatan

Gambar 3
Kegiatan Penilaian Kompetensi untuk Penempatan
Jabatan Sesuai Kompetensi





Tabel III.17
Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Fisik		Capaian (%)	Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
Meningkatnya Penempatan Aparatur yang Memenuhi Standart Kompetensi	Program Kepegawaian Daerah							
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi ASN dan Promosi ASN	3185 org	3397 org	105	570.575.800	187.398.780	77,32

2.3 Analisa Capaian pada Sasaran Strategis 3

Tabel III.18

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis 3
Tahun 2021

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi Kepegawaian	B (Baik)	BB (sangat Baik)	100
	- Nilai rata – rata unsur		3,5324	
	- Nilai rata – rata tertimbang		3,564	
	- Nilai IKM		89,110	

Uraian Capaian pada Sasaran Strategis 3

Indikator *Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian*, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut ditetapkan target B (baik) sedangkan realisasinya **BB (89,1)** dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, sesuai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut telah memenuhi standar pelayanan publik. Untuk Mengetahui sejauh mana Kepuasan ASN dalam Pelayanan, BKPSDM melakukan Survey dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk menilai dan mengukur kualitas pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tanah Laut selaku pengguna jasa layanan publik pada BKPSDM Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah sampel sebanyak 226



(dua ratus dua puluh enam) Kuesioner, yang Dari keseluruhan kuesioner (228 kuesioner) dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel III.19
Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Tabel III. 20
Nilai Rata – rata (NRR) dan
Survey Kepuasan Masyarakat 9 Unsur Pelayanan

No	UNSUR PELAYANAN	NRR	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
1.	Persyaratan Pelayanan	3,491	87,28
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,460	86,50
3.	Waktu Penyelesaian	3,438	85,95
4.	Biaya / Tarif Pelayanan	3,851	96,78
5.	Produk spesifikasi Jenis Pelayanan	3,438	85,95
6.	Kompetensi Pelaksanaan Pelayanan	3,460	86,50
7.	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,527	88,16
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,898	97,46
9.	Sarana dan Prasarana	3,416	85,40

- Secara umum kualitas pelayanan pada Unit pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 3,5324 - 4,00. Nilai IKM yang diperoleh yaitu: pada 9 unsur pelayanan = 89,1.
- Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden adalah Biaya / Tarif Pelayanan (rata-rata 3,951) dan yang terendah adalah unsur Sarana dan Prasarana (rata-rata 3,416).

Upaya Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanannya:

- Mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan Biaya / Tarif Pelayanan, Perilaku Pelaksana Pelayanan, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Penanganan Pengaduan, saran dan masukan.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap Sarana dan prasarana pada Unit pelayanan Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mendatang lebih baik lagi.
- Meningkatkan tanggung jawab dan kemampuan melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah:
 - (1) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas,
 - (2) memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
- Penyusunan SKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan Survey Kepuasan Masyarakat terdahulu secara berkala, jika mungkin survey dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

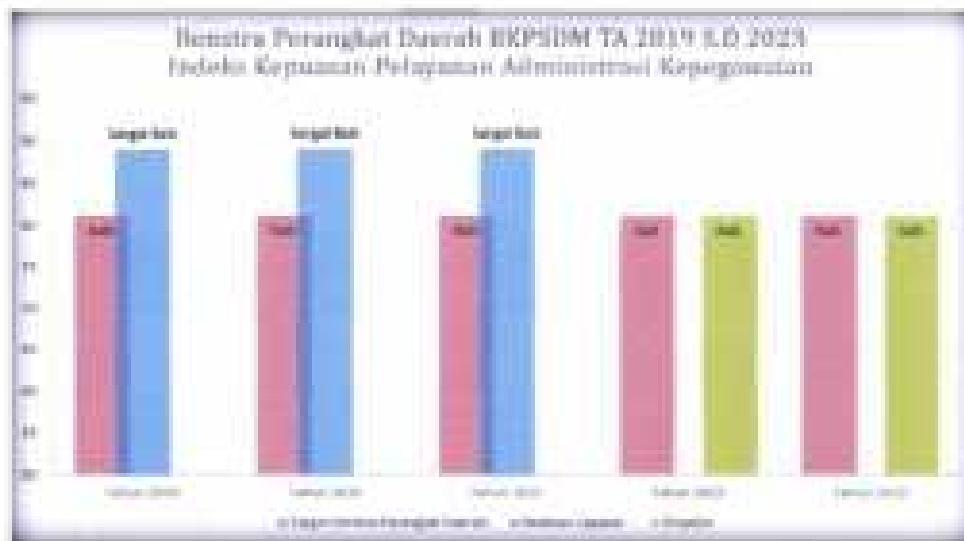
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun terakhir

Tabel III.21
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian

Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi Kepegawaian	Baik	Baik	100	Baik	sangat Baik	100	Baik	sangat Baik	100

Tujuan dari indikator ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan upaya peningkatan pencapaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan administrasi kepegawaian. Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut menetapkan target predikat "B" atas nilai IKM pelayanan administrasi kepegawaian, di tahun 2021 telah terealisasi pencapaian predikat "BB" (89,1) atas nilai IKM pelayanan administrasi kepegawaian, dan capaian realisasi sebesar 100%.

Dibandingkan Pada tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut menetapkan target predikat "B" atas nilai IKM pelayanan administrasi kepegawaian, di tahun 2020 telah terealisasi pencapaian predikat "BB" (89,32) atas nilai IKM pelayanan administrasi kepegawaian, dan capaian realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2019 menetapkan target "B" atas nilai IKM pelayanan administrasi kepegawaian, di tahun 2019 telah terealisasi pencapaian predikat "B" (79,57) atas nilai IKM pelayanan administrasi kepegawaian, dan capaian realisasi sebesar 100%. Jika di Bandingkan realisasi Nilai IKM pada Tahun ini (2021) dengan tahun lalu (2020) ada Penurunan pada Unsur Sarana dan Prasarana pada diklat Loka Bina Praja yang masih membutuh kan anggaran lebih untuk Pemeliharaan peningkatan sarana Penunjang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi yakni ruang asrama dan Dan aula pembelajaran.




**KABUPATEN
TANAH LAUT**

**Maklumat
Pelayanan**



**Infografis
Kepegawatan**

- Membantu dan melayani masyarakat dalam mengurus dokumen kepegawatan.
- Membantu masyarakat yang memiliki keluhan atau permasalahan terkait kepegawatan.
- Membantu masyarakat yang memiliki keluhan atau permasalahan terkait kepegawatan.
- Membantu masyarakat yang memiliki keluhan atau permasalahan terkait kepegawatan.





2.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Per Triwulan (I sd IV)

Sasaran	Kinerja Utama	Target (%)	Capaian (%)				Capaian 2021	Target Akhir Renstra (%)	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat dilat peningkatan kompetensi								
	- Kompetensi Manjerial	97,58	0,93	1,85	57,41	61,48	61,48	100	61,48
	- Kompetensi Tekhnis	64,85	0	0	4,44	97,41	97,41	73,22	133,04
Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang Memenuhi Standard Kompetensi	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	100	35,23	54,86	62,27	105,67	105,67	100	105,67
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	BAIK					Sangat Baik	Baik	100
	- Nilai Rata-rata		-	3,755	-	3,858			
	- Nilai Rata-rata Tertimbang		-	0,417	-	0,433			
	- Nilai IKM		-	83,6	-	89,11			



2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Realisasi Tahun ini Dengan Target Indikator yang termuat di dalam Dokumen Renstra SKPD (2018 – 2023)

Tabel III. 22
Pencapaian Kinerja Indikator Utama dan Pendukung
Dengan Target Jangka Menengah Renstra BKPSDM (2018 – 2023)

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	
		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
Indikator Kinerja Utama (Iku)											
1	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat dilat peningkatan kompetensi:	75.62	78.42	81.22	84.02	86.61	81.42	52.63	89.45	84.02	86.61
	- kompetensi manajerial	94.74	96.16	97.58	99.00	100	84.03	42.31	81.48	99	100
	- kompetensi teknis	56.49	60.67	64.85	69.04	73.22	51.11	54.00	97.41	69.04	73.22
2	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	100	100	100	100	100	94.99	104.20	105.67	100	100
3	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	115	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
Indikator Kinerja Pendukung											
4	Persentase penanganan pelanggaran disiplin pegawai ASN	100	100	100	100	100	100	59.00	72.27	100	100



5	Persentase penyelesaian hasil rekomendasi inspektorat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase tingkat kehadiran pegawai BKPSDM	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100
7	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase pegawai yang datanya akurat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase terkelolanya administrasi barang / aset, perkantoran dan kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase terkelolanya administrasi perencanaan dan keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Kenaikan Nilai SAKIP	8	8	8	8	8	8	88	88	8	8

Dan tabel Realisasi dan capaian Sasaran berdasarkan Target pada Renstra Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 tersebut, apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya tahun 2021 terjadi peningkatan. Peningkatan dimaksud disebabkan oleh capaian salah satu indikator program yang jauh melebihi target, yaitu pada indikator Persentase Jabatan yang di isi sesuai Kompetensi ASN sebagai bagian dari formula indikator sasaran. Tingginya realisasi penataan ASN dikarenakan adanya perubahan kelembagaan dan perubahan analisa beban kerja

Pada tahun 2021, jumlah ASN yang tertata melebihi target yang telah ditetapkan, terutama apabila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah kebutuhan ASN yang akan ditata dalam kurun satu periode Jumlah PNS Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021 sebanyak 4823 orang. Jumlah tersebut adalah jumlah keseluruhan ASN baik JFT pendidikan dan JFT kesehatan. Meskipun kinerja dapat dianggap berhasil karena melebihi target, tetapi tidak dipungkiri bahwa dalam proses pemenuhan penataan masih terdapat kendala. Kendala dalam proses penataan Jabatan sesuai Kompetensi antara lain :

1. Pada proses penataan Jabatan Struktural terkendala pada ketersediaan talent, dimana Tim penilai kinerja PNS kesulitan mendapatkan kualitas SDM dan calon-calon administrator dan pengawas yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan di beberapa OPD yang membutuhkan keahlian spesifik, salah satunya dikarenakan kekurangan SDM di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Bahkan pemenuhan pegawai di masing-masing OPD hanya berada dalam kisaran angka 50% - 70%. Sehingga cukup menyulitkan bagi Tim Penilai Kinerja PNS untuk mencari calon-calon yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang mumpuni untuk diusulkan kepada Bupati Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
2. Pada proses penataan melalui mutasi internal dan eksternal, terkendala pada jumlah pegawai yang kurang seimbang dengan kebutuhan pegawai yang akan ditata dalam jabatan sesuai analisis jabatan dan beban kerja OPD.

3. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sekretaris (Eselon III) berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kepala sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Membawahi :

3.1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

3.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Gambar 4
Struktur Organisasi Sekretariat



Tabel III.23
Target dan Realisasi Kinerja Sekretaris
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Akuntansi Kinerja SKPD	1.	Nilai SAKIP SKPD	B	BB	100%
		2.	Persentase terkelolanya Administrasi Umum, Kepegawaian dan Aset	100%	100%	100%

Akuntabilitas Kinerja Merupakan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan Keberhasilan /Kegagalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka pendukung dalam mencapai misi Organisasi secara Terukur dengan sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Sekretaris dengan Kepala Badan yang disusun dan dilaporkan secara Periodik. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tanah Laut ini di identifikasikan melalui Indikator yaitu :

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKPSDM sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP Inspektorat Kabupaten Kabupaten Tanah Laut

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Hasil evaluasi AKIP tahun 2021 untuk Penilaian Periode Tahun 2020 yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang menargetkan nilai B (Baik), perlu sedikit perbaikan), dengan Realisasi dengan nilai 75,06 dengan Kategori BB (sangat Baik).

Tabel III.24
Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2021

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI
A. PERENCANAAN KINERJA		25,13
I.	PERENCANAAN STRATEGIS	8,33
a.	Pemenuhan Renstra	1,89
b.	Kualitas Renstra	4,89
c.	Implementasi Renstra	1,75
II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	16,86
a.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan	4,00
b.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	9,25
c.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan	3,60
B. PENGUKURAN KINERJA		19,69
I.	Pemenuhan Pengukuran	5,00
II.	Kualitas Pengukuran	10,63
III.	Implementasi Pengukuran	4,06
C. PELAPORAN KINERJA		10,42
I.	Pemenuhan Pelaporan	2,51
II.	Penyebaran informasi kinerja	4,91
III.	Pemanfaatan informasi kinerja	2,70
D. EVALUASI INTERNAL		6,90
I.	Pemenuhan Evaluasi	1,78
II.	Kualitas Evaluasi	2,99
III.	Pemanfaatan Evaluasi	1,13
E. PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI		13,88
I.	Kinerja yang Dilaporkan (output)	4,50
II.	Kinerja yang dilaporkan (outcome)	9,38
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA		75,06

Tabel III.25
Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2019 sd 2021

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI LAKIP		
		2021	2020	2019
A. PERENCANAAN KINERJA		25,13	25,13	23,64
I.	PERENCANAAN STRATEGIS	8,33	7,89	7,59
a.	Pemenuhan Renstra	1,89	4,53	1,72
b.	Kualitas Renstra	4,69	1,75	4,22
c.	Implementasi Renstra	1,75	1,75	1,75
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	16,88	16,88	16,88
a.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan	4,00	4,00	3,75
b.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	9,25	9,25	8,00
c.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan	3,60	3,60	4,20
B. PENGUKURAN KINERJA		19,69	19,69	17,81
I.	Pemenuhan Pengukuran	5,00	5,00	4,38
II.	Kualitas Pengukuran	10,63	10,63	9,88
III.	Implementasi Pengukuran	4,06	4,06	3,75
C. PELAPORAN KINERJA		10,42	10,42	10,42
I.	Pemenuhan Pelaporan	2,81	2,81	2,81
II.	Penyajian informasi kinerja	4,91	4,91	4,91
III.	Pemanfaatan informasi kinerja	2,70	2,70	2,70
D. EVALUASI INTERNAL		5,90	5,90	64,43
I.	Pemenuhan Evaluasi	2,99	1,78	1,58
II.	Kualitas Evaluasi	1,55	2,99	2,99
III.	Pemanfaatan Evaluasi	1,13	1,13	1,88
E. PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI		13,88	12,83	9,56
	Kinerja yang Dilaporkan (output)	4,50	3,25	3,50
	Kinerja yang dilaporkan (outcome)	9,38	9,38	6,06
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA		75,06	73,76	67,06

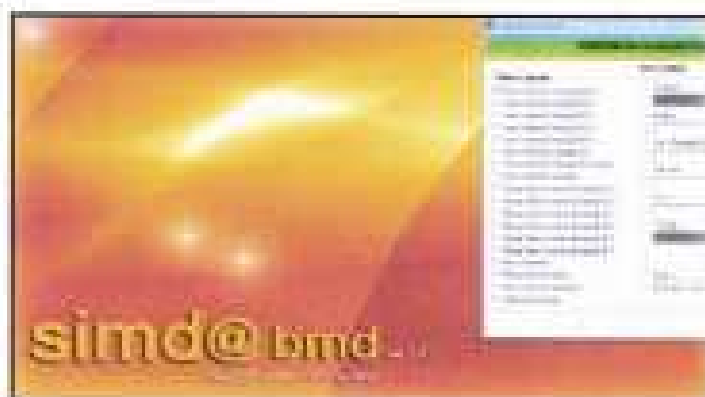


Pada tabel Perbandingan diatas ada Peningkatan Nilai pada Setiap Tahun nya untuk meningkatkan Nilai AKIP dimasa mendatang, BKPSDM akan perbaikan sesuai dengan Rekomendasi dari Tim Penilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yakni :

1. Pada penyajian Perencanaan Kinerja ada Keselarasan dari Dokumen RPJMD, Renstra, Pohon Kinerja, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja
2. untuk Pengukuran Kinerja akan ditetapkan regulasi/ Peraturan Mengenai Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
3. Penyajian data dalam Laporan Kinerja agar Senantiasa dilengkapi dengan Sumber Data dan menyajikan Informasi Kinerja eselon III
4. Akan Melakukan evaluasi Program dalam rangka Menilai Keberhasilan Program dan Memberikan Rekomendasi Perbaikan Pencapaian Kinerja

2. Prosentase terkelolanya Administrasi Umum , Kepegawaian dan Aset

Pada Indikator ini dengan merupakan Pelayanan pada Pegawai lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia Kabupaten Tanah Laut



pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai dari target 35 PNS BKPSDM dengan Realisasi 31 PNS atau Capaian 88,57 %. tidak tercapainya target 100% karena adanya mutasi antar Skpd,namun dari target pengelolaan Aset Sesuai amanat Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan tertib administrasi/ pengelolaan barang/aset SKPD. Bila dibandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, maka target telah tercapai 100%, Dari keseluruhan aset yang ada di BKPSDM, seluruhnya memiliki kesesuaian dengan SIMDA Bareng yang ada di Kabupaten Tanah Laut, capaian Pengelolaan Administrasi Setiap Tahun dapat dilihat pada grafik





Permasalahan yang menjadi Kendala dalam pengelolaan Aset

Pada umumnya SKPD dalam menyusun neraca aset menunggu dan menyesuaikan dengan neraca aset yang dibuat oleh Bagian Keuangan karena neraca dari Bagian Keuangan dianggap benar. Faktanya sering kali neraca yang dibuat oleh Bagian Keuangan berbeda baik volume maupun nilainya dengan aset yang dimiliki oleh SKPD. Apabila terjadi seperti ini SKPD harus menyesuaikan nilai aset sesuai dengan angka neraca Bagian Keuangan. Situasi ini menyulitkan SKPD untuk membuat neraca yang benar, karena tanpa rekonsiliasi dahulu dengan neraca aset dari Bagian keuangan.

Beberapa contoh kasus yang terjadi antara lain:

- Bagian Keuangan dalam menyusun neraca aset berdasarkan pertanggungjawaban belanja modal dan membukukan seluruhnya sebagai aset, padahal seringkali belanja modal digunakan juga untuk belanja barang pakai habis;
- Aset milik satu SKPD tetapi dipinjam SKPD lain dalam jangka waktu lama (lebih dari lima tahun), sehingga pengurus barang tidak mencatatnya dalam KIBnya dan tidak mengetahui keberadaan aset tersebut, dilain pihak pemakai juga tidak mencatat di KIBnya karena statusnya pinjam. Dengan demikian aset tersebut tidak tercatat dalam Neraca;
- Terdapat aset yang sudah hilang selama lima tahun lebih belum dihapuskan dari daftar aset, sehingga masih tercatat dalam daftar inventaris;

Upaya dalam meningkatkan Pencatatan pengelolaan Aset agar Laporan Aset Akurat

- Melakukan penataan aset dengan mengikuti Permendagri nomor 17 tahun 2007
- Menetapkan saldo awal aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan setiap tahun dan menggunakan nilai aset yang sudah dinilai kembali.
- Menelusuri mutasi penambahan aset dari per tahun dengan menggunakan data dari DPA, SPJ, kontrak-kontrak pengadaan aset dan laporan mutasi aset yang dibuat oleh penyimpan barang, pengurus barang
- Menelusuri mutasi pengurangan aset pertahun dan dapatkan bukti pendukungnya. Apabila ada penghapusan perlu dipisahkan antara aset yang masih tercantum di daftar inventaris atau tidak sebelum ada penghapusan.
- Lakukan rekonsiliasi dengan Bagian Keuangan
- Buat Daftar Inventaris dan Kartu Inventaris Barang dan Jurnal Penyesuaian



Tabel III.26
Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis Sekretaris

Sasaran Strategi/ Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Fisik		Capaian (%)	Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
Meningkatnya Nilai Lakip SKPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	76.61%	100	100	100	34,694,048,201	17,630,772,397	50,82
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun	8 Dok	8 Dok	100	42,520,350	21,817,000	51,33
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	5 Dok	5 Dok	100	95,885,370,872	16,103,512,954	48,94
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pakaihan Dinas	1 Jenis	1 Jenis	100	19,673,500	19,673,500	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis	8 Jenis	100	1,088,116,029	914,214,074	85,59



	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan SKPD	3 Jenis	3 Jenis	100	540.170.350	468.447.219	86,72
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	100	128.187.100	103.108.750	80,38

3.1 Capaian Indikator pada Perjanjian Kinerja (Eselon IV) Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan Tanggung Jawabnya dibantu oleh 4 (empat) orang Staf Pelaksana/ Jabatan Fungsional umum

Gambar 5
Sumber Daya Aparatur
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



Tabel III.27
Target dan Realisasi Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Keuangan	8 Dok	8 Dok	100
Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan	8 Dok	8 Dok	100

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pada Tahun anggaran 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan Target 8 (delapan) Dokumen Perencanaan kinerja dan Keuangan, teralisasi 100% , penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja ini sebagai acuan dan Pendukung dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai Misi pada Sasaran Strategis pada Renstra BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, 8 (delapan) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BKPSDM yakni :

1. Dokumen Renstra (Rencana Strategi)
2. Rencana Kerja (Renja) Murni
3. Rencana Kerja (Renja) Perubahan
4. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP)
7. Lakip
8. LPPD/ LKPJ

2. Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Laporan Keuangan SKPD dapat berjalan optimal dan menyajikan laporan yang valid serta andal jika penyampaian Laporan Keuangan SKPD dapat tepat waktu dan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilengkapi dokumen pendukung valid sehingga dapat menyajikan informasi yang cukup dan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2021, Tahun 2021 target 5 (lima) Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Realisasi 5 (lima) Dokumen itu dengan Capaian 100 %, 5 (lima) Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan yakni

1. CALK/LKPD
2. Laporan Keuangan Bulanan
3. Laporan Keuangan Triwulan
4. Laporan Keuangan Semester
5. Laporan Keuangan Tahunan



Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator dibawah ini:

1. Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;
2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
3. Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound (SMART);
4. Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
5. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; dan
6. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menanggapi akuntabilitas kinerja;
7. Unit kerja telah membangun sistem informasi kinerja;
8. Unit kerja telah memiliki ukuran kinerja sampai ke individu.



Tabel III.28
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Kinerja
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Fisik		Capaian (%)	Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kabupaten Kota								
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun	8 Dok	8 Dok	100	42,520,550	21,817,000	61,33
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Renstra dan Renja	2 Dok	2 Dok	100	2.746.200	2.508.100	91,33
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dok RKA	1 Dok	1 Dok	100	2.504.700	2.269.400	90,61
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dok RKA Perubahan	1 Dok	1 Dok	100	2.588.100	2.414.400	93,29
4)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dok DPA	1 Dok	1 Dok	100	2.305.000	1.981.000	85,94
5)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dok DPAP	1 Dok	1 Dok	100	2.305.000	2.223.500	96,46
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lajip, LKPJ/LPPD, dan LKPD/CALK	3 Dok	3 Dok	100	5.077.150	4.920.600	96,92
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Even	2 Event	1 Event	50	24.994.200	5.500.000	22,01



II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	5 Dok	5 Dok	100	36.896.370.872	16.103.512.964	48,96
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	12 bin	12 bin	100	32.853.894.382	16.002.347.064	48,94
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Verifikasi	2 Verif	2 Verif	100	2.016.500	1.927.200	95,57
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Lap	1 Dok	1 Dok	100	9.459.990	9.238.700	97,96

3.2 Capaian Indikator pada Perjanjian Kinerja (Eselon IV) Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian, Sub bagian Umum dan Kepegawaian dengan Sumber Daya Manusia yakni 1 (orang) Kasubbag Umum dan Kepegawaian membawahi 4 (empat) orang Staf Pelaksana/ JFU.

Gambar 6
Sumber Daya Aparatur
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Tabel III.29
Target dan Realisasi Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Melaksanakan Pelayanan administrasi Umum dan Kepegawaian	Jumlah ASN yang terlayani	35 org	31 org	89
Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Dok RKPBM dan RKBMD	3 Dok	3 Dok	100
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	10 Lap	10 Lap	100
	Jumlah sarana dan Prasarana yang dipelihara	50 Jenis	95 Jenis	100



Permasalahan dalam melaksanakan tugas fungsi bagian umum dan Kepegawain

Dalam menjalankan tupoksi nya bagian umum dan kepegawain tidak terlepas dari permasalahan dan juga perbedaan pendapat masalah yang seringkali muncul dalam tupoksi umum dan Kepegawain adalah

- Dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Rapat seringnya jadwal acara yang berbenturan untuk mengakomodir permintaan organisasi perangkat daerah lingkup kabupaten Tanah Laut dalam pelayanan Peminjaman sarana dan prasarana rapat atau pun Gedung dan asrama Diklat yang seringkali terjadi berbenturan permohonan jadwal penggunaan yang bersamaan
- Mis Komunikasi dari petugas administrasi yang mengurus peminjaman ruangan karena kelalaian dalam merekap permintaan sehingga ada permintaan yang terlambat
- Dalam hal pengelolaan aset, seringkali ada perpindahan barang dari ruang ke ruang lain tanpa pemberitahuan kepada pengurus barang sehingga Daftar / KIR aset tidak sesuai

Upaya Penyelesaian Permasalahan pada bagian Umum dan Kepegawain

- Menggunakan aplikasi berbasis IT untuk Mengakomodir layanan peminjaman ruang gedung / rapat / asrama
- Membuat surat pemberitahuan perihal prosedur dalam peminjaman ruangan ke organisasi perangkat daerah
- Memeriksa dan cek KIR per Ruangan secara berkala sehingga barang yang mutasi cepat diketahui dan segera dilakukan pencatatan daftar mutasi Aset



Tabel III.30
Kegiatan/ Sub Kg yang Mendukung Sasaran Strategis
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi Fisik		Capaian (%)	Realisasi Keuangan		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
I	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pakaian Dinas	1 Jenis	1 Jenis	100	19.673.500	19.673.500	100
1)	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian	19 stel	49 stel	100	19.673.500	19.673.500	100
II	Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah	Jumlah jenis peralatan kantor	6 jenis	6 jenis	100	1.088.119.029	914.214.974	85,59
2)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah jenis alat listrik	14 jenis	14 jenis	100	9.071.810	8.304.500	91,54
3)	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan kantor	23 jenis	23 jenis	100	607.386.439	503.242.386	82,85
4)	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	3 jenis	3 jenis	100	3.892.840	3.560.000	91,97
5)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis Dokumen yang di cetak	23 jenis	23 jenis	100	38.027.540	32.164.100	84,58
6)	Penyediaan bahan bacaan	Jenis surat kabar	36 eks	36 eks	100	3.465.600	3.420.000	98,66



7)	Penyelenggaraan rapat – rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	12 bulan	12 bulan	100	408.275.000	363.503.968	89.47
III	Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan penda	Jumlah jenis jasa penunjang	3 jenis	3 jenis	100	540.178.350	468.447.219	86.72
8)	Penyediaan jasa Surat menyurat	Jumlah laporan PNS yang terdayani	12 Lap	12 Lap	100	93.561.104	93.199.184	99.61
9)	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya Air dan listrik	Jumlah rekening yang harus dibayar	36 Rek	36 Rek	100	175.115.500	128.850.219	73.47
10)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah jasa transaksi keu	12 bulan	12 bulan	100	271.501.745	246.697.616	90.83
IV	Pemeriharaan Barang Milik daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	100	128.187.100	103.106.750	80.43
11)	Penyediaan jasa pemeliharaan,pelek, ran kend dinas	Jumlah kend. Dinas roda 2 dan 4 yang dipelihara	12 buah	12 buah	100	50.030.000	44.716.750	89.38
12)	Pemeriharaan peralatan	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	20 jenis	18 Jenis	80	48.474.000	38.325.000	74.94

4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja (Eselon III) Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur berdasarkan Perjenjangan Kinerja Tahun 2021

Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan diklat aparatur, formasi dan pengadaan, penjenjangan karier dan fasilitas profesi aparatur. Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur Membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yakni

4.1 Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan.

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan formasi dan pengadaan

4.2 Kepala Sub Bidang Diklat Aparatur

Sub Bidang Diklat Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan diklat aparatur.

4.3 Kepala Sub Bidang Penjenjangan Karier dan Fasilitas Profesi Aparatur.

Sub Bidang Penjenjangan Karier dan Fasilitas Profesi Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penjenjangan karier dan fasilitas profesi aparatur.

Gambar 7
Struktur Organisasi
Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur



Tabel III.31

Target dan Realisasi Kinerja
Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Pemenuhan Pegawai	1. Persentase Pemenuhan Aparatur Sesuai Formasi	100	91,67	91,67
Meningkatnya Aparatur Sipil Negara Sesuai Kompetensi	2. Persentase Diklat Sesuai Kompetensi	100	87,04	87,04
	3. Persentase ASN yang melanjutkan jenjang Pendidikan	100	0	0

**Analisa Capaian Sasaran Strategis 1 dengan Indikator:
"Persentase Pemenuhan Aparatur Sesuai Formasi"**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan dan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan dan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021
5. Peraturan dan RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional

Pemenuhan ASN Menurut Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mana pada pasal 6 dijelaskan bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK, yang sama sama diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Kebutuhan Instansi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung Misi Bupati Kabupaten Tanah Laut dengan Penetapan Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor : 188.45/707- KUM/2021 tentang Penetapan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 dan Target usulan 600 Formasi sesuai usulan dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/ 1138 – Bang.1/BKPSDM dan berdasarkan Keputusan MENPAN dan RB Nomor 533 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021 disetujui sebanyak sebanyak



550 Formasi dengan rincian Formasi 391 untuk Formasi PPPK, 118 untuk Formasi Tenaga Kesehatan dan 41 Formasi untuk Tenaga Teknis Sehingga realisasi capaian **91,7 %**,



Seleksi Penerimaan CPNS diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan Peserta yang dinyatakan dapat mengikuti Seleksi SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) sebanyak 2334 orang dengan 4 Titik Lokasi Tes dan 386 orang masuk ke seleksi SKB (seleksi Kompetensi Bidang) dengan 2 Titik Lokasi tes dan hasil akhir, dari jumlah 159 Formasi terisi 150 Formasi (Nakes 114 orang dan Teknis 36 orang) ada terdapat ke kosongan 9 Formasi, sedangkan untuk Seleksi Penerimaan PPPK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hanya Memfasilitasi Pengajuan NIP saja untuk Proses Seleksi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut

**Pendukung tercapainya indikator sasaran strategis 1
"Persentase Pemuhan Aparatur Sesuai Formasi"**

Terlaksananya Pemuhan Aparatur Sipil Negara di dukung dengan oleh beberapa Faktor :

1. Surat dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor 900/3752/BPKAD/2020 Perihal Surat Ketersediaan Anggaran Gaji, Latsar dan Diklat Jabatan Fungsional yang mana jika setiap Daerah mengusulkan Formasi Kemenpan RB Mensyaratkan daerah sebagai pengusul formasi Calon ASN wajib untuk membuat surat Kesanggupan ketersediaan Anggaran untuk Gaji, Tunjangan dan tambahan Penghasilan
2. Penerimaan CPNS dikarenakan pada masa Pandemi maka Pendaftaran dilaksanakan secara Online Melalui Aplikasi SSCASN dan diverifikasi



oleh Panitia Instansi yang sudah ditunjuk kewenangannya

3. Adanya PERBKN nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode computer Assisted Test dan Surat Edaran BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode computer Assisted Test dengan Protokol kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona – 19 dimana peserta CASN mulai dari Pendaftaran dan Pemberkasan dilakukan secara Online
4. Seluruh rangkaian kegiatan Seleksi di awasi oleh Tim Medis serta Satgas Covid – 19 dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berdasarkan surat Edaran oleh Kepala BKN

Hambatan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1 "Pemerataan Pemenuhan Aparatur Sesuai Formasi"

Indikator Pemenuhan Aparatur Sipil Negara sesuai Formasi ada beberapa permasalahan atau pun hambatan yakni:

1. Database kepegawaian belum dipergunakan secara optimal dalam penyusunan formasi kebutuhan ASN
2. Penetapan Formasi oleh Kementerian RB seringkali tidak sesuai Dokumen formasi ASN yang Usulkan/diajukan sehingga Terdapat penetapan formasi jabatan CPNS yang tidak diminati pelamar
3. Kualifikasi pendidikan yang di Persyaratkan tidak sesuai dengan pendidikan di Kalangan calon Pelamar / masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk mengisi formasi jabatan CPNS yang tersedia sehingga Kebutuhan ASN tidak terpenuhi

Rencana Pengendalian Untuk Peningkatan Pemenuhan Aparatur Sesuai Formasi

Beberapa Strategi untuk Rencana Pengendalian Dimasa Yang Akan Datang agar indikator Pemenuhan Aparatur Sipil Negara tercapai yakni:

1. Menggunakan Data Base Kepegawaian dalam Pengusulan Formasi CPNS
2. Mengusul formasi sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
3. Mengusulkan formasi yang kualifikasi pendidikannya terdapat di Perguruan Tinggi negeri/swasta di wilayah Kalimantan Selatan.

Analisa Capaian Sasaran Strategis 2 dengan Indikator
1. Persentase Diklat Sesuai Kompetensi
2. Persentase ASN yang melanjutkan Jangjang Pendidikan

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengamatkan mengembangkan kompetensi yang menjadi hak bagi setiap ASN minimal dua puluh (20) jam pelatihan (JP) dalam setahun
3. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : B/K.1/HKM.02.03/2020 Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi Covid-19) dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 10/K.1/HKM.02.03/2020 Tentang Panduan Teknis penyelenggaraan Pelatihan Dalam masa Pandemi Infeksi Corona Virus (Infeksi Covid-19)
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten TanahLaut

Sesuai ketentuan Undang-undang ASN, bahwa setiap PNS dipersyaratkan untuk meningkatkan kompetensinya paling sedikit 20 jam pelajaran dalam waktu satu tahun. Untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sangat mendukung kegiatan peningkatan kompetensi pegawai melalui dukungan APBD dalam melaksanakan pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan bagi ASN, baik fasilitasi, pengiriman maupun pelaksanaan/ swakejola diklat oleh BKPSDM pada tahun 2021.

Pada Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dalam memenuhi indikator Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Kompetensi dengan Target 100% dan Realisasi 87,04 % capaian dengan Melaksanakan Diklat manajerial dan Diklat Teknis/Fungsional

1. Diklat Manajerial

Dari target 216 orang terealisasi sebanyak 176 ASN atau dengan serapan 81,48 % yaitu diklat teknis/fungsional :

- a. Diklat PIM II dengan Target 2 orang terealisasi 2 orang capaian 100%
- b. Diklat PIM III dengan Target 2 orang terealisasi 2 orang capaian 100%
- c. Diklat PIM IV dengan Target 40 orang pada Tahun 2021 tidak dapat terlaksana dikarenakan Pandemi covid 19 realisasi 0 %
- d. Diklat Latihan Dasar CPNS Formasi 2019 sebanyak 172 CPNS dengan Pola Swakelola (120 orang) dan Pola Penyertaan/ Kontribusi (52 orang)

2. Diklat Teknis

Dari target 116 ASN terealisasi sebanyak 113 ASN atau dengan serapan 97,41 % yaitu diklat teknis/fungsional :

- a. Penyertaan Pelatihan Fungsional Ahli Penyuluh Pertanian sebanyak 2 orang
- b. Pelatihan Teknis juru Sida Pajak sebanyak 2 orang
- c. Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014, PP no. 30 Tahun 2019 dan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 sebanyak 14 orang
- d. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 40 orang
- e. Pelatihan Empowering Employee Program sebanyak 30 orang
- f. Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) sebanyak 25 orang

Peningkatan kompetensi berupa peningkatan kapasitas, keabilitas dan kompetensi PNS dilakukan dengan pendidikan formal, dengan penugasan para PNS untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi yang linear dengan jabatannya, dengan pemberian beasiswa, tugas belajar dan izin belajar. Target indikator *Persentase ASN yang melanjutkan jenjang Pendidikan* dengan Target 2 orang dengan realisasi 0 % atau tidak terealisasi dikarenakan tidak ada yang berminat

Hambatan dalam Pencapaian pada Indikator
1. Persentase Diklat Sesuai Kompetensi
2. Persentase ASN yang melanjutkan Jenjang Pendidikan :

Hambatan dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Persentase Aparatur Negara sesuai Kompetensi

1. Sarana dan prasarana diklat kurang memadai
2. Terbatasnya kuota peserta Diklat kepemimpinan dari penyelenggara
3. terbatasnya kuota jumlah kebutuhan diklat dari SKPD dan diklat kepemimpinan
4. untuk pelaksanaan ASN yang melanjutkan tugas Belajar PNS yang berminat untuk melanjutkan Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 terbentur pada syarat tugas belajar sesuai Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
5. Tidak ada PNS yang berminat untuk Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis 1

Strategi Peningkatan Kinerja pada Indikator
1. Persentase Diklat Sesuai Kompetensi
2. Persentase ASN yang melanjutkan Jenjang Pendidikan

Strategi yang akan dilakukan dalam Peningkatan dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Persentase Aparatur Negara sesuai Kompetensi dimasa mendatang

1. Meningkatkan sarana dan prasarana Diklat serta menyediakan anggaran untuk sewa alternatif tempat penyelenggaraan Diklat
2. Meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara Diklat kepemimpinan baik dengan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan maupun dengan Lembaga Administrasi Negara
3. Membuat analisis kebutuhan diklat untuk ASN setiap tahun.
4. Untuk program tugas Belajar (tubel) Melakukan pendataan kepada unit kerja terkait untuk PNS yang berminat dan memenuhi syarat untuk tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis 1
5. Melakukan seleksi kepada PNS yang berminat dan memenuhi syarat untuk tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis 1



Tabel III.32
Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis
Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur

Sasaran Strategis	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Fisik		Capaian (%)	Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		pagu	Realisasi	
Meningkatnya Pemanfaatan Pegawai	Program Kepegawaian Daerah							
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Jumlah Dok. Kepegawaian	1 Dok.	1 Dok.	100	653.346.250	422.497.400	49.51
Meningkatnya Aparatur Sipil Negara Sesuai Kompetensi	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah PNS yang memenuhi syarat Uji Kompetensi	278 org	274 org	98.56	1.991.919.060	708.407.534	35.56
	Program Pengembangan Sumber daya Manusia							
	Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi manajerial dan Fungsional	Jumlah orang yang mengikuti Diklat	332 org	286 org	87.07	2.684.238.580	1.278.176.300	47.62

4.1. Capaian Indikator pada Perjanjian Kinerja (Eselon IV) Kasubbid Formasi dan Pengadaan

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan formasi dan pengadaan dengan 1 (satu) orang Kasubbag membawahi 1 (satu) Staf Pelaksana/JFU

Gambar 8
Sumber Daya Aparatur
Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Aparatur



Tabel III.33
Target dan Realisasi Kinerja Eselon IV
Kasubbid Formasi dan Pengadaan Aparatur
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
Melaksanakan fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS	1.	Jumlah Penerimaan CASN yang di fasilitasi	1 kali	1 kali	100%
	2.	Jumlah Dokumen Formasi CPNS	1 Dok	1 Dok	100%
	3.	Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan CASN	500 org	550 org	91,06

➤ **Capaian indikator Jumlah Penerimaan CASN yang di Fasilitasi**

Pada Tahun 2021 Jumlah Penerimaan CASN yang difasilitasi dengan target 1 Kali Pelaksanaan dan realisasi 1 kali Pelaksanaan atau dengan Capaian 100%, pendaftaran dan Verifikasi dilakukan secara online melalui aplikasi SCASN. Untuk tahap Pelaksanaan Administrasi CPNS dilaksanakan secara Online dengan Verifikasi oleh Admin yang ditunjuk, sedangkan Pelaksanaan seleksi PPPK dilaksanakan oleh Kemendikbud dan BKN dengan Kebijakan Pusat. Total Pelamar seleksi administrasi sebagai berikut:

- Total Pelamar 3724 terdiri dari 890 PPPK dan 2834 (CPNS) dengan hasil Verifikasi yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 3219 yang terdiri dari 885 PPPK dan CPNS 2334, sedangkan yang tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 300 orang dengan Rincian 0 PPPK dan 300 CPNS tidak Memenuhi syarat (TMS).
- Total 2334 orang yang lulus Administrasi dan masuk ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS. Dikarenakan kondisi PSBB karena masih Pandemi Covid maka SKD dilaksanakan di 4 (empat) titik lokasi yang dipilih oleh peserta seleksi melalui Aplikasi SSCASN. Lokasi pilihan tersebut yakni UPT BKN Balikpapan, Palangkaraya, Kanreg VIII BKN



- Banjarmasin dan BKPSDM dengan hasil akhir SKD sebanyak 386 orang.
- c. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi SKD sebanyak 386 orang dan Memasuki ke Tahap Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang juga dilaksanakan dengan metode CAT dan dilakukan di 2 titik Lokasi yakni Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dan BKPSDM Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan hasil Rekonsiliasi Integrasi SKD dan SKB Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Nomor SKBCP2021/BARK.6802/2021.1 tanggal 16 Desember 2021 dari formasi 159 (seratus lima puluh sembilan), terisi 150 (seratus lima puluh) formasi terdini dan Nakes 114 (seratus empat belas) dan Tenaga Tekhnis 36 (tiga puluh enam) formasi sedangkan 9 (sembilan) formasi Kosong

➤ **Capaian Indikator Jumlah Dokumen Formasi CPNS**

Sehubungan dengan Surat Kemenpan dan RB nomor : B/1313/M.SM 01.00/2020 tanggal 1 Desember 2021 perihal pengusulan kebutuhan/Formasi ASN baik CPNS dan PPPK, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mengusulkan usulan Kebutuhan Formasi Kabupaten Tanah Laut Ke Kemenpan dan RB melalui Surat Nomor : 800/1138 – Bang.1/ BKPSDM perihal penyampaian dokumen usulan Formasi ASN Tahun Anggaran 2022. Dan Target 1 (satu) Dokumen usulan Formasi dengan realisasi 1 (satu) Dokumen dengan Capaian 100%

Dokumen usul persetujuan formasi ini dengan berisi:

- Penyusunan **bezetting** (jumlah kekuatan PNS yang ada) dalam tahun anggaran (TA) yang lalu menurut **golongan** ruang.
- Pengolahan formasi dalam TA yang bersangkutan menurut golongan ruang.
- Daftar** usul formasi PNS menurut **pengkat/golongan** ruang dalam TA yang bersangkutan.
- Daftar kebutuhan PNS menurut jabatan pada TA yang bersangkutan.
- Susunan jabatan **struktural** dan fungsional yang diduduki oleh PNS yang memiliki golongan ruang IV/a ke atas.
- Daftar kebutuhan Tenaga Kesehatan dalam TA yang bersangkutan.
- Daftar kebutuhan Tenaga Guru dalam TA yang bersangkutan.

- h. Daftar jumlah PNS yang dipekerjakan dan diperbantukan pada Satuan Kerja Pemerintah lainnya, Yayasan, Badan-Badan Swasta dan Badan lain yang ditentukan Pemerintah menurut golongan ruang.
- i. Daftar rencana penarikan kembali tenaga perbantuan dari daerah otonom lain/instansi lain ke daerah dalam TA yang bersangkutan.
- j. Daftar jumlah PNS yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia pada tahun anggaran sebelumnya serta jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun dalam TA yang bersangkutan.
- k. Peta jabatan. Apabila dalam tahun anggaran sebelumnya telah melampirkan Peta Jabatan, maka untuk tahun berikutnya tidak perlu melampirkan kembali, kecuali terjadi perubahan organisasi.

➤ **Capaian Indikator Jumlah Penerimaan CPNS**

Bupati Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan surat usulan Formasi kebutuhan ASN melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Target formasi 600 formasi dengan rincian 170 (seratus tujuh puluh) untuk CPNS dan 430 (empat ratus tiga puluh) untuk PPPK Guru namun melalui keputusan Pemeripan dan RB nomor 533 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 di tetapkan untuk kebutuhan Pegawai ASN dikabupaten Tanah Laut ber jumlah 550 (lima ratus lima puluh) dengan rincian tenaga Guru PPPK sejumlah 391 (tiga ratus sembilan puluh satu), Tenaga Kesehatan 118 (seratus delapan belas), dan Tenaga Tekhnis 41 (empat puluh satu) maka dari Target Penerimaan 600 orang dan realisasi 550 orang atau dengan capaian 91,6 %

Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penerimaan CASN (PPPK dan CPNS) yakni:

1. Untuk Seleksi PPPK ada ketidakcocokan antara data yang dari menpan (kemendikbud) dengan data di lapangan (daerah) karena kurangnya koordinasi dan pusat (kemendikbud) mengenai PPPK.
2. Pelaksanaan kegiatan yang fleksibel karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, sedangkan dalam penganggaran dengan waktu yang terbatas dan aturan berubah dengan keputusan yang diberikan ketika kegiatan sudah berlangsung atau sedang berlangsung.
3. Dalam Hal Penyusunan Dokumen Formasi, usulan dari SKPD sering terlambat dan sering tidak sesuai Anjab dan ABK.
4. Penetapan formasi CASN tidak sesuai dengan yang diusulkan.

Solusi dan Strategi akan dilakukan untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang akan Datang:

1. Untuk pengusulan Formasi mengkhususkan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dibutuhkan di Kabupaten Tanah Laut.
2. Lebih Intens berkoordinasi dengan BKN dan Kemenpan perihal Formasi untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
3. Sering diadakan rakor baik melalui daring atau secara tatap muka untuk rekonsiliasi data PPPK dengan Kemendikbud.



Tabel III.34
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Kinerja Eselon IV
Kasubbid Formasi dan Pengadaan Aparatur

Sasaran strategis	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Fisik		Capaian (%)	Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Pagu	Realisasi	
Melaksanakan Fasilitas Pelaksanaan Penerimaan CASN	Kegiatan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian CASN							
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	100	31.919.200	14.297.900	44,79
	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Penerimaan CASN	600 ASN	660 ASN	971,67	821.427.050	408.199.580	49,69

4.2 Capaian Indikator pada Perjanjian Kinerja (Eselon IV) Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Sub Bidang Diklat Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan diklat aparatur, Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dibantu oleh 1 (satu) staf Pelaksana/ JFU

Gambar 9
Sumber Daya Aparatur
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT APARATUR	
	ASEP SUITO S.AP PENATA RUJUK TINGKAT I HUN
PENYUSUN PROGRAM PERENCANAAN DIKLAT	
	MUHAMMAD BUYUNGS NAMAHAH S. STP PENATA RUJUK TINGKAT I HUN

Tabel III.35
Target dan Capaian Kinerja Eselon IV
Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
Melaksanakan fasilitasi Diklat Penjurangan, Struktural, Tekhnis, Fungsional dan Prajabatan	1.	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Manajerial	44 org	4 org	9.09
	2.	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat tekhnis dan Fungsional	116 org	114 org	98.27
	3.	Jumlah CASN yang lulus Diklat Prajabatan	172 org	172 org	100

➤ **Capaian Indikator Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Manajerial**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2021 menargetkan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional sebanyak 2 (dua) orang, Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 2 (dua) orang dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebanyak 40 (empat puluh) orang, namun hanya terealisasi 100% pada pelatihan PKN dan PKA, secara keseluruhan capaian indikator ini hanya Mencapai 9.09% atau dari target 44 orang yang mengikuti Diklat Manajerial hanya terealisasi sebanyak 4 orang.

➤ **Capaian Indikator Jumlah Aparatur yang Lulus Diklat Prajabatan**

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Tanah Laut formasi tahun 2019 yang ditargetkan mengikuti diklat prajabatan atau Pelatihan Dasar berjumlah 172 Orang. Pada Tahun Anggaran 2021, 172 orang CPNS tersebut telah mengikuti dan lulus pelatihan dasar. Maka realisasi indikator ini tercapai 100%.

Tabel III. 36
Nama nama Diklat manajerial Tahun 2021

Tahun	Nama Diklat		KET
2021	Diklat PIM II		
	1.	Penyertaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan VIII Tahun 2021 di BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan	2 (dua) orang
	Diklat PIM III		
	1.	Penyertaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I	1 (satu) orang
	2	Penyertaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III	1 (satu) orang
	Diklat LATSAR CPNS		
	1.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I Pola Fasilitas	40 org
	2.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan II Pola Fasilitas	40 org
	3.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan I Pola Fasilitas	40 org
	4.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Pola Kontribusi	14 orang
	5.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Pola Kontribusi	38 orang

➤ **Capaian Indikator Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Tekhnis dan Fungsional**

Untuk Capaian Indikator *Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis/fungsional* ini dari target 116 ASN terealisasi sebanyak 113 ASN atau dengan serapan 97,41 % yaitu diklat teknis/fungsional



Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Manajerial dan Teknis yakni :

1. Adanya keterbatasan anggaran. Pengurangan Anggaran untuk kegiatan Pengembangan Kompetensi karena focus anggaran ke dana Covid
2. Keterbatasan sarana diklat (asrama dan ruang belajar) untuk pelaksanaan pelatihan sehingga dalam pelaksanaan pelatihan harus bergantian (tidak bisa bersamaan) karena Sarana kediklatan (Asrama dan ruang belajar) digunakan untuk Fasilitas Pelayanan Khusus pasien covid 19
3. Dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan dengan Pembelajaran jarak jauh secara Daring/ e learning

Strategi yang akan dilakukan untuk Peningkatan Kinerja dimasa akan datang

1. Menyiapkan anggaran untuk sewa penginapan dan ruang belajar (hotel) alternative untuk pelaksanaan diklat dasar atau diklat kepemimpinan
2. Melaksanakan kegiatan diklat lebih awal dengan berkoordinasi dengan BPSDMD Provinsi dalam penjadwalan diklat khususnya diklat dasar CPNS dan Diklat kepemimpinan
3. Melaksanakan dan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh (e-learning) pada diklat dasar CPNS, diklat Kepemimpinan dan diklat teknis lainnya



Tabel III.37
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Kinerja Eselon IV
Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Sasaran strategis	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Fisik		Capaian (%)	Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target	realisasi		pagu	realisasi	
Melaksanakan Fasilitas Diklat Penjurangan Struktural, Teknis Fungsional dan Prajabatan	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		332 org	289 org	87,06	2.664.238.580	1.278.176.300	47,62
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar	172 org	172 org	100			
		Jumlah Diklat Pim II	2 org	2 org	100			
		Jumlah Diklat Pim III	2 org	2 org	100			
		Jumlah Diklat Pim IV	40	0	0			
		Jumlah Diklat Teknis	116 org	113 org	97,41			

4. Capaian Indikator pada Perjanjian Kinerja (Eselon IV) Kasubbid Penjurangan Karier dan Fasilitas Profesi Aparatur

Sub Bidang Penjurangan Karier dan Fasilitas Profesi Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penjurangan karier dan fasilitas profesi aparaturnya, Sub Bidang Pengembangan Aparatur dengan 1 (satu) Kasubbid yang membawahi 1 (satu) staf Pelaksana/ JFU

Gambar 10
Sumber Daya Aparatur
Sub Bidang Penjurangan Karier dan Fasilitas
Profesi Aparatur

KEPALA SUB BIDANG PENGURANGAN KARIER DAN FASILITAS PROFESI APARATUR	
	AWWATUN HUSNANAH A. Shi Kump PENATA RUJUK TINGKAT I 1000
ANALIS PENGEMBANGAN KARIER	
	ERMAH JI Bina PENATA RUJUK 1000

Tabel III.38
Target dan Capaian Indikator Kinerja Eselon IV
Kasubbid Penjurangan Karier dan Fasilitas Profesi Aparatur
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
Melaksanakan fasilitas Ujian Kenaikan Pangkat dan penyesuaian ijazah	1.	Jumlah Ujian Kenaikan Pangkat dan penyesuaian ijazah	126 org	124 org	98,41
Melaksanakan Fasilitas pemberian Tugas Belajar dan izin Belajar	2.	Jumlah Tugas Belajar dan izin Belajar	2 org	0	0
Melaksanakan Fasilitas Asesment	3.	Jumlah PNS yang mengikuti Asesment	150 org	150 org	100

➤ **Capaian Indikator Jumlah peserta Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah**

sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, pada Bab III poin 5 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus mengikuti dan telah lulus ujian dinas. Dan pada Bab IV poin 9 ayat d yang menyatakan bahwa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah atau Diploma dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat tertentu dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Badan Kepegawaian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dengan Target 126 PNS yang Mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat dengan Realisasi 124 Pegawai dengan Capaian 98,41 % pelaksanaan atas



1. Pelaksanaan UKPPI dengan biaya Penyertaan sebanyak 14 orang terdiri atas 3 orang yang memenuhi syarat Penyesuaian pendidikan D III kebawah dan 11 orang memenuhi syarat penyesuaian S1 keatas
2. Pelaksanaan Ujian Dinas 95 (sembilan puluh enam) orang untuk Ujian Dinas TK I dan 15 (lima belas) orang Ujian dinas TK II

➤ **Capaian Indikator Jumlah Tugas Belajar ASN yang di Fasilitas**

Tugas belajar merupakan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik baik di dalam maupun diluar Negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari hari sebagai PNS. Pada Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan Target 2 orang dengan realisasi 0 orang, capaian 0 % di karenakan terkendala pada syarat tugas belajar sesuai peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bahwa untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis paling singkat 2 tahun setelah menjadi PNS sedangkan yang berminat adalah rata rata belum 2 tahun menjadi PNS

➤ **Capaian Indikator Jumlah PNS yang Mengikuti Asessment**

Assesment bertujuan untuk pemetaan kompetensi sebagai salah-satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Manajemen ASN yang merupakan amanah dari aturan tersebut adalah penerapan pengelolaan SDM Aparatur yang berbasis kompetensi. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 165 ayat (4) huruf b, bahwa Instansi Pemerintah harus menyusun profil PNS yang diantaranya adalah gambaran tentang kompetensi yang bersangkutan. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara



melalui *talent pool*, setiap PNS dapat diukur potensi dan kompetensinya melalui pengukuran kompetensi secara berkala yang kemudian dipetakan dalam sebuah basis data *talent pool* dan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan ASN berdasarkan *system merit*. Pada Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Melaksanakan Pengukuran Kompetensi dengan bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat sebagai dari target 150 PNS terrealisasi 150 Pegawai dengan realisasi 100%.

Permasalahan dan Kendala Dalam mencapai Sasaran dan Indikator Kasubbid. Penjurangan Karier dan Profesi Aparatur yakni :

1. Dalam pelaksanaan Ujian Dinas banyak Pegawai Negeri Sipil yang beranggapan bahwa Ujian dinas hanya formalitas saja dalam Penyesuaian ijazah
2. untuk Kendala tugas Belajar yakni PNS yang berminat untuk melanjutkan Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 terbentur pada syarat tugas belajar sesuai Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 yang tercantum bahwa untuk bisa mendapatkan Tugas Belajar di syaratkan sudah menjadi PNS Minimal 2 (dua) Tahun sedangkan rata rata yang berminat belum memenuhi syarat sehingga Tidak terpenuhinya formasi dokter spesialis
3. Kurangnya sarana dan Prasarana Daerah sehingga untuk Pelaksanaan Assement di selenggarakan dengan Metode Kontribusi sedangkan BKPSDM Kabupaten mempunyai gedung khusus untuk Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi di Kabupaten Tanah Laut sendiri dengan Mendatangkan Tenaga ahli (asessor)

Strategi yang akan dilakukan dimasa yang akan datang agar pelaksanaan indikator efektif dan indikator Terpenuhi :

1. Melakukan pendataan kepada unit kerja terkait untuk PNS yang berminat dan memenuhi syarat untuk tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis 1
2. Melakukan seleksi kepada PNS yang berminat dan memenuhi syarat untuk tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 .
3. Pemilihan tempat pelaksanaan Assesment yang Strategis atau dengan suasana lokasi yang kondusif dan tenang akan berpengaruh besar terhadap konsentrasi, stabilitas emosi, kesabaran dan semangat peserta dalam menyelesaikan setiap tahapan tes.
4. Menggandeng pihak ketiga UPT Psikologi yang kompeten dari lembaga pendidikan yang sudah berpengalaman dalam asesmen
5. memperkuat formulasi soal sesuai dengan tupoksi ASN, sesuai jenjang jabatan yang diampunya.



Tabel III.39
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Kinerja Eselon IV
Kasubbid Penjenjangan Karier dan Profesi Aparatur

Sasaran strategis	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Fisik		Capaian (%)	Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target	realisasi		pagu	realisasi	
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		278 org	274 org	98.56	1.391.913.060	708.407.534	35.56
Melaksanakan Fasilitas Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Penyertaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	126 org	124 org	98.41	992.890.210	189.802.200	19.12
Melaksanakan Fasilitas Tugas Belajar dan izin Belajar		Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Penyusunan Tugas Akhir / Skripsi / Tesis / Disertasi	2 org	-	0			
Melaksanakan Fasilitas Asesment	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Asesment	150 org	150 org	100	999.038.860	518.60.334	51.19

5. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja (Eselon III) Kepala Bidang Mutasi Data dan Informasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kepala Bidang Mutasi, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan mutasi dan promosi, kepengkatan, disiplin dan penghargaan aparatur, penyiapan data dan informasi. Kepala Bidang Mutasi Data dan Informasi membawahi 3 (tiga) Sub Bagian.

5.1 Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan.

Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan mutasi dan kepengkatan.

5.2 Kepala Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin, dan Penghargaan Aparatur.

Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan pemberhentian, disiplin dan penghargaan aparatur.

5.3 Kepala Sub Bidang Data dan Informasi.

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, penyajian dan penyimpanan data dan informasi.

Gambar 11
Sumber Daya Aparatur
Bidang Mutasi, Data dan Informasi



Tabel III.40
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Eselon III
Kepala Bidang Mutasi, Data dan Informasi
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Penempatan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi	1. Persentase Aparatur Sipil Negara yang memenuhi Standar Kompetensi	100	100	100
Meningkatnya Pemanuhan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2. Persentase Pembinaan ASN	80	68,06	82,57
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawain yang Akurat	3. Persentase Data Kepegawain yang Akurat	100	100	100

**Analisa Capaian Sasaran Strategis 1 dengan Indikator
"Persentase Penempatan Aparatur yang memenuhi Standar
Kompetensi"**

Dasar Hukum :

1. Undang undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
2. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen ASN
3. Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN
4. PermenPANRB Nomor 22 tahun 2021 tentang Pola Karier PNS

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif.

Dalam upaya untuk meningkatkan persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan Assessment dan Uji Kompetensi bagi pejabat eselon III dan pejabat eselon IV, dan melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk 5 Kepala SKPD yang kosong. rangkaian kegiatan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2021. Selain itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Juga Melaksanakan rotasi dan mutasi pegawai struktural dan fungsional umum yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, hal tersebut untuk menjawab amanat dari undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang tersebut mengatur segala sesuatu tentang Aparatur Sipil Negara baik itu mengenai jenis, status dan kedudukan Aparatur Sipil Negara, jabatan, hak dan kewajiban ASN, Kelembagaan, KASN, Susunan dan seleksi KASN, Manajemen ASN, pangkat dan jabatan ASN, serta Mutasi, penggantian dan pemberhentian ASN.



Capaian dari Indikator Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi ini dari target 100% dengan realisasi indikator Kinerja 106% capaian indikator ini melebihi Target, pada tahun anggaran 2021 dari target 3.185 orang PNS baik untuk Mutasi dan Promosi maupun kenaikan Pangkat dan Berkala, dengan realisasi Capaian sebanyak 3.397

**Hambatan dalam Pencapaian Indikator :
Persentase Penempatan Aparatur yang Memenuhi Standart Kompetensi**

1. Masih banyak pejabat yang belum melaksanakan diklatpim sesuai dengan tingkat jabatannya
2. keterbatasan anggaran menjadi faktor penyebab masih banyak pegawai yang belum mengikuti uji kompetensi
3. Penempatan pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi kontra produktif

**Solusi dan Strategi meningkatkan Capaian :
Persentase Penempatan Aparatur yang Memenuhi Standart Kompetensi**

1. Membuat draft Peraturan Kepala Daerah untuk mengatur pola karier dan manajemen talenta sebagai dasar penerapan sistem merit dalam rangka mutasi dan promosi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
2. Menerbitkan Peraturan Kepala Daerah untuk mengatur pola karier dan manajemen talenta sebagai dasar penerapan sistem merit

Analisa Capaian Sasaran Strategis 2 pada Indikator : Persentase Pembinaan Disiplin Aparatur

Dasar Hukum :

1. Amanat Undang undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil yang merupakan ketentuan pasal 86 Ayat (4) UU ASN diterbitkan yang merujuk pada peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan



Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan ini memuat berbagai jenis sanksi pelanggaran disiplin PNS, termasuk mengenai poligami dan cerai. Satu hal yang menonjol dalam Perubahan ketentuan Disiplin PNS dari Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 adalah terkait jenis hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Pada dua jenis hukuman disiplin ini dilakukan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis Hukuman Disiplin ringan
 - a) Teguran lisan
 - b) Teguran tertulis
 - c) Teguran tidak puas secara tertulis

2. Jenis Hukuman Disiplin Sedang

- Pemotongan tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan
- Pemotongan tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan
- Pemotongan tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan

3. Jenis Hukuman Disiplin berat

- Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
- Pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan
- Pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS

Gambar 12
Hukuman Disiplin PP 94/2021

Kategori Pelanggaran Terhadap Maksud Kerja	Hukuman Disiplin Ringan
1 Hari Kerja	Teguran Lisan
1 s.d 3 Hari Kerja	Teguran Tertulis
1 s.d 10 Hari Kerja	Pemotongan tidak hormat selama Tertulis

Kategori Pelanggaran Terhadap Maksud Kerja	Hukuman Disiplin Sedang
11 s.d 15 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
16 s.d 18 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
19 s.d 30 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

Kategori Pelanggaran Terhadap Maksud Kerja	Hukuman Disiplin Berat
31 s.d 34 Hari Kerja	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
35 s.d 37 Hari Kerja	Pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan
38 Hari Kerja atau Lebih 39 Hari Kerja atau Lebih	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS

Catatan:

- Pelanggaran terhadap ketentuan Maksud Kerja akan memuat ketentuan dan kerja lainnya secara kumulatif sampai dengan akhir tahun anggaran.
- PNS yang tidak masuk kerja dan tidak memuat ketentuan kerja akan diberikan pengali secara berkala selama 10 hari kerja berdasarkan perhitungan pengali yang akan bulan berikutnya.

Dengan berlakunya PP 94/2021, maka terdapat perubahan jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat. Jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri atas:

PP 94/2020	PP 94/2021
a. Penurunan K2B selama 1 (satu) tahun	a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
b. Penurunan K2B selama 1 (satu) tahun dan	b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan atau
c. Penurunan pangkat setinggi 4 (empat) tingkat selama 1 (satu) tahun	c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 juga diberikan penegasan mengenai implementasi dari penegakan disiplin PNS melalui penjatuhan hukuman disiplin (HD). Bagi Atasan Langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin **dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat**. Sementara dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, tidak menjatuhkan HD yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum **dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat**. Sebelumnya dalam PP No. 53 tahun 2010 hanya dijatuhi HD yang sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pada Tahun 2021 Jumlah aparatur yang dijatuhi hukuman disiplin, dari target 30 (tiga puluh) SK yang terdiri dari target 15 untuk Surat Keputusan (SK) Hukuman Disiplin dengan Realisasi 4 (empat) Kasus, dan Target izin Perceraian 15 (lima Belas) SK dengan Realisasi 16 (enam belas) SK izin Perceraian maka realisasi pelanggaran Disiplin sebanyak 24 (dua puluh empat) kasus.

Tabel diatas menunjukan bahwa pada Kasus izin perceraian yang PNS yang melanggar ketentuan mengenai Izin Perkawinan dan perceraian PNS dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai ketentuan dalam PP 94/2021, realisasi izin Perceraian melampaui target dalam artinya bahwa dalam indikator ini berbanding dengan indikator lain yakni dengan rumus jika realisasi lebih tinggi maka semakin rendahnya capaian keberhasilan dalam peningkatan Disiplin dalam hal kasus perceraian dikalangan PNS

Perhitungan atas indikator pelanggaran Disiplin ini dibatasi pada aparatur yang tidak melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan surat keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin. Target dan realisasi indikator kinerja persentase disiplin aparatur merupakan persentase jumlah aparatur yang tidak dijatuhi hukuman disiplin atau menjalani hukuman disiplin terhadap jumlah aparatur keseluruhan, kasus pelanggaran Disiplin PNS pada Tahun 2021 ada beberapa Kasus yakni, Penyalanggunaan Narkoba dan Indikasi Korupsi

**Kendala dalam mencapai Sasaran Strategis pada Indikator :
Persentase Pembinaan Disiplin Aparatur**

1. Kurang tegas nya sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pejabat berwenang harus memberikan sanksi/Tindakan untuk PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan memberikan efek jera dan shock therapy
2. Berkurangnya kedisiplinan PNS, bagi seorang, tuntutan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berdisiplin tinggi
3. Implementasi Pembinaan disiplin khususnya terkait penjatuhan hukuman PNS adalah disposisi pelaksana, Sumber daya, Komunikasi dan budaya ganti alasan ganti pula aturan ketegasan disiplin atau budaya "Sungkan"



Solusi dalam mencapai Sasaran Strategis pada Indikator :
Persentase Pembinaan Disiplin Aparatur

Dalam peningkatan pembinaan Disiplin Aparatur PNS salah satu alternatif sebagai upaya yang ditempuh dalam rangka mengurangi jumlah pelanggaran Disiplin antara lain

1. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Disiplin PNS yakni PP No.94 Tahun 2021 dan PP 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan Perceraian PNS dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang pemberhentian PNS
2. Menyusun perkara tentang pedoman tata cara penjatuhan hukuman disiplin ASN berdasarkan petunjuk teknis PP 94/2021
3. Melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi



Analisa Capaian Sasaran Strategis 3 pada Indikator 1 Persentase Data Kepegawaian yang Akurat

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;

Aplikasi Kepegawaian dibentuk dan disusun sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara dimana diwajibkan adanya sistem informasi pengelolaan data kepegawaian. Dalam implementasinya Simpeg disusun berdasarkan pedoman dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Ketentuan-ketentuan dalam Kepmendagri tersebut terutama dipergunakan dalam pembakuan materi data kepegawaian, sehingga pengolahan data dengan sistem komputer dapat memenuhi kepentingan konsumsi yang lebih luas dan memenuhi standar pembentukan bank data kepegawaian yang lengkap. Simpeg menangani data kepegawaian khususnya meliputi pendataan pegawai, proses perencanaan, pengadaan dan formasi kepegawaian, mutasi pegawai dan lain sebagainya.

Simpeg di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Laut telah dirintis pengembangannya sejak tahun 2002. Dengan bergulirnya reformasi birokrasi, pengembangan Simpeg menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi yang meliputi

pendataan pegawai, pengolahan data, sumber daya manusia, dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi layanan kepegawaian.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sebagai pengelola data kepegawaian Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan harapan tercapainya sebuah mekanisme *updating* data pada aplikasi layanan kepegawaian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang akurat, dalam pengelolaan data kepegawaian dengan mengoptimalkan pengoperasian aplikasi layanan kepegawaian pada 5 (lima) aplikasi data Kepegawaian dengan realisasi pengembangan target 100 % dan realisasi Capaian 100% karena ada upaya dengan sistem

- Mengkompilasi data kepegawaian yang ada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.
- Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, untuk mengoptimalkan pengoperasian aplikasi layanan kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung pengelolaan data kepegawaian.
- Meningkatkan kompetensi Pengelola kepegawaian OPD dalam Pengelolaan layanan kepegawaian melalui penggunaan aplikasi Simpeg OPD beserta sub sistemnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Dengan Tujuan Pengembangan Aplikasi :

- Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka perencanaan, pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.
- Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.
- Percepatan proses implementasi dan pelatihan mengenai aplikasi maupun modul baru pada aplikasi layanan kepegawaian.

**Strategi Pencapaian Sasaran Strategis pada Indikator :
Persentase Data Kepegawaian yang Akurat**

Guna mendukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

1. Penyediaan informasi kepegawaian melalui pencetakan Buku Profil Kepegawaian, Data DUK SKPD, SOTK
2. Data Statistik Pegawai tahunan disajikan pada website BKPSDM Kabupaten Tanah Laut dan persemester pada buku statistik (Buku Profile PNS)
3. Data Kepegawaian dikelola dengan pengarsipan data Fisik dan Data elektronik (scan)
4. Pertemuan dengan pengelola kepegawaian masing-masing OPD dan pengembangan aplikasi serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke OPD maupun penyelenggaraan pertemuan penghubung dengan mengundang pengelola kepegawaian seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

**Hambatan Sasaran Strategis pada Indikator :
Persentase Data Kepegawaian yang Akurat**

Kurang Optimalnya pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian karena tidak tersedianya anggaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan pengembangan aplikasi yang berdampak pada terhambatnya pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.



Tabel III.41
Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang mendukung Kinerja Eselon III
Kepala Bidang Mutasi, Data dan Informasi

Sasaran Strategis	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Fisik		Capaian (%)	Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		pagu	Realisasi	
	Program Kepegawain Daerah							
Meningkatnya Penempatan Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi dan Promosi	886 org	623 org	63.47	737.974.380	570.575.800	77.32
Meningkatnya Pemenuhan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen SK	250 SK	186 SK	58.29 SK	272.789.870	206.603.700	75.74
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawain yang akurat	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentiaandan Informasi Kepegawain ASN	Jumlah Dok Kepegawain	4 Dok	4 Dok	100	705.292.336	535.785.444	75.97

5.1 Capaian Indikator pada Perjanjian Kinerja (Eselon IV) Kasubbid Mutasi dan Kepangkatan

Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan mutasi dan kepangkatan. Kasubbid Mutasi dan Kepangkatan dalam melaksanakan tugas dan Tanggungjawab nya dibantu oleh 3 (tiga) staf Pelaksana/ JFU

Gambar 13
Sumber Daya Aparatur
Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan



Tabel III.42
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Eselon IV
Kasubbid Mutasi Dan Kepangkatan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Melaksanakan Fasilitas Mutasi dan Promosi Jabatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	1. Jumlah Mutasi dan Promosi Jabatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	355	576	162
Melaksanakan Fasilitas Mutasi ASN dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	2. Jumlah Mutasi ASN dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	630	247	39,21
Melaksanakan Fasilitas Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat ASN	3. Jumlah Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat ASN	700	742	106

➤ Capaian pada strategis 1 dengan indikator Jumlah Mutasi dan Promosi ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Administrasi dan Fungsional

Mutasi dan Promosi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Fungsional pada Tahun 2021 dengan target 355 orang dengan realisasi 576 orang atau dengan Capaian 162%

Mutasi dan Promosi untuk Jabatan Fungsional tertentu yakni pada Jabatan Fungsional Dokter, Fungsional Guru dan PPPK, Fungsional pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Fungsional Penyetaraan Jabatan sesuai amanat Permenpan dan RB nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional



➤ **Capaian pada strategis 2 dengan Indikator Jumlah Mutasi dan ASN dalam Pelaksana dan jabatan Fungsional**

Mutasi dalam rangka penyegaran dan kebutuhan organisasi pada masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah dan memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan karier yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, pada Tahun 2021 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabuapten Tanah Laut dengan target Mutasi jabatan Pelaksana sebanyak 630 orang dengan rincian 600 jabatan staf Pelaksana dan 30 untuk ASN yang masuk dan Keluar dari organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Realisasi 214 untuk mutasi staf dan 33 untuk mutasi keluar masuk organisasi Lingkungan Kabupaten Tanah Laut atau dengan realisasi 247 PNS dengan capaian 39,21%

pelaksana mutasi antar instansi dengan tujuan memberdayakan PNS jabatan pelaksana secara optimal sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan 33 orang mutasi antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi



➤ **Capaian pada strategis 3 dengan Indikator Jumlah Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Pangkat ASN**

Dasar Hukum tentang kenaikan pangkat Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan PP No. 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Kenaikan pangkat PNS biasanya ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama PNS dihitung sejak pelantikan sebagai CPNS.

Ada tiga jenis kategori kenaikan pangkat bagi seorang PNS.

1. Kenaikan pangkat reguler, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan struktural. Jika semua syarat terpenuhi maka diberikan kenaikan pangkat Minimal 4 Tahun sekali
2. Kenaikan pangkat pilihan jabatan struktural PNS Syarat kenaikan pangkat pilihan jabatan struktural adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural pada unit dinas tertentu setelah memenuhi kriteria. Beberapa syarat lain yang harus dipenuhi bagi PNS yakni telah menjabat minimal satu tahun dalam pangkat dan satu tahun dalam jabatan. PNS bersangkutan juga harus mendapatkan nilai SKP baik selama 2 dua tahun terakhir
3. Kenaikan pangkat anumerta, kenaikan pangkat ini hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya

Pada Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk indikator jumlah Kenaikan Pangkat ASN dengan target 700 Surat Keputusan (SK) dengan Realisasi 742 SK atau dengan realisasi 106 % Kegiatan Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ini tercapai dengan realisasi 106 % karena ada upaya dari BKPSDM Kabupaten Tanah Laut yakni

1. Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Aplikasi Simfoni dalam Proses Kegiatan Kenaikan Pangkat tiap Periode yang diikuti oleh para Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan tujuan Mempercepat Proses penyelesaian Kenaikan Pangkat dan usul penerbitan pertimbangan Tekhnis

2. Tim Verifikasi Kabupaten Tanah Laut (BKPSDM, Dinkas dan Disdik) dalam proses Verifikasi Kenaikan Pangkat bekerja sama dengan BKN Kanreg VIII Banjarmasin dengan Metode Verifikasi satu atap
3. Menyamakan Persepsi dengan Kepegawain SKPD terhadap regulasi Kepegawain khususnya Kenaikan Pangkat

Tabel III.43
Rekapitulasi Kenaikan Pangkat
Tahun 2021

Golongan	Periode April	Periode Oktober
Id	4	4
I/a	1	3
I/b	2	2
I/c	2	9
I/d	18	10
II/a	14	35
II/b	70	77
II/c	110	184
II/d	41	80
IV/a	30	46
IV/b	26	25
IV/c	2	4
TOTAL	320 orang	478 orang

Permasalahan dan Kendala Dalam mencapai Sasaran dan Indikator yakni :

- **Permasalahan dan Kendala pada Indikator mutasi dan Promosi Jabatan dan Mutasi jabatan Pelaksana**
 1. Masih Banyaknya ASN yang pangkatnya belum memenuhi syarat Jabatan
 2. Masa kerja menduduki jabatan belum mencukupi dan masih banyak yang golongan di bawah ketentuan sehingga jabatan Administrator masih ada yang tidak terisi
 3. Jumlah ASN belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan formasi jabatan pelaksana dikarenakan di Kabupaten Tanah Laut kekurangan hampir 1000 Jabatan Pelaksana
 4. Masa kerja belum memenuhi syarat sesuai perjanjian kerja untuk mengusul pindah keluar kabupaten
- **Permasalahan dan Kendala pada Indikator Kenaikan Pangkat**
 1. Masih adanya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau Berkas Tidak Lengkap (BTL) pada saat Usul Pangkat
 2. Adanya SKP yang masih bernilai *Cukup baik* di Capaian maupun Penilaian, syarat Pengajuan Naik pangkat adalah dengan Kategori *Baik*
 3. Aplikasi untuk memproses kenaikan pangkat (SAPK BKN) sering mengalami gangguan

Solusi dan Strategi Dalam mencapai Sasaran dan Indikator

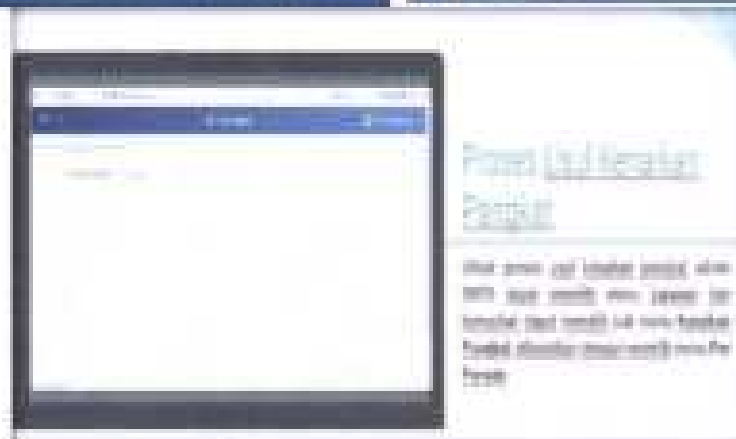
Solusi dan Strategi yang harus dilakukan untuk Pencapaian Kinerja pada Indikator Mutasi dan Promosi Jabatan dan Mutasi pada jabatan Pelaksana

1. Dalam menyusun perencanaan Mutasi PNS atas dasar diantaranya :
 - ✓ Kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan
 - ✓ Klasifikasi jabatan dan Pola Karier
 - ✓ Kebutuhan organisasi
 - ✓ Prinsip larangan konflik kepentingan
2. Distribusi PNS yang merata akan mendorong Kualitas Pelayanan Publik
3. Proses mutasi luar daerah akan lebih mudah apabila ada pengganti

4. Promosi ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dilakukan melalui seleksi terbuka atau berdasarkan ketentuan Sistem Merit dengan memperhatikan Kebutuhan Organisasi
5. Melaksanakan Asesment bagi PNS untuk Mutasi dan Promosi
6. Menghilangkan Anggapan bahwa mutasi bukanlah merupakan suatu hukuman, melainkan kebutuhan organisasi

Solusi dan Strategi yang harus dilakukan untuk Pencapaian Kinerja pada Indikator Kenaikan Pangkat

1. Mengoptimalkan Aplikasi Simfoni untuk usul kenaikan pangkat dan melaksanakan evaluasi dan koordinasi dengan Kasubbag Umum Kepegawaian SKPD.
2. Mempersingkat waktu proses Verifikasi dan usulan penerbitan pertimbangan Teknis sebagai salah satu upaya BKPSDM Kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.





Tabel III.44
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung sasaran Kinerja Eselon IV
Kasubbid Mutasi Dan Kepangkatan

Sasaran Strategis	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Fisik		Capaian (%)	Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		pagu	Realisasi	
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN							
Melaksanakan Fasilitas dan mutasi dalam jabatan Pelaksana dan Fungsional	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi ASN dalam Jabatan pelak dan Fungsional	630 org	247 org	39,21	289.339.740	228.133.600	78,16
Melaksanakan Fasilitas mutasi dan Promosi Jabatan ASN dalam jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional		Jumlah Mutasi dan Promosi bagi jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	350 org	571 org	163			
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan ASN dan jabatan Pimpinan Tinggi	5 org	5 org	100	165.638.600	73.245.000	44,17
Melaksanakan Fasilitas Keputusan Bupati tentang Penetapan Pangkat ASN	Pengelolaan Penetapan Pangkat ASN	Jumlah SK Bupati tentang Penetapan Pangkat ASN	700 SK	742 SK	106	282.796.040	271.197.000	95,74

5.2 Capaian Indikator pada Perjanjian Kinerja (Eselon IV) Kasubbid Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan Aparatur

Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan pemberhentian, disiplin dan penghargaan aparatur, Kasubbid Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan Aparatur dalam melaksanakan tugas dan Fungsi nya dibantu oleh 2 (dua) staf Pelaksana

Gambar III. 14
Sumber Daya Aparatur
Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan Aparatur



Tabel III.45
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Eselon IV
Kasubbid Pemberhentian Disiplin dan Penghargaan Aparatur
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
Memfasilitasi Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	1.	Jumlah Kasus yang Selesai difasilitasi Sesuai Aturan yang Berlaku	15 SK	4 SK	26,67
Melaksanakan Verifikasi Data usulan Satya Lencana Karya Satya	2.	Jumlah Dokumen Surat Usulan SLKS yang Diverifikasi	300 org	611 org	203,67
Memfasilitasi Pelayanan Pensiun ASN	3.	Jumlah ASN yang Memasuki Batas Usia Pensiun	250 SK	142 SK	56,8

➤ Capaian pada strategis 1 dengan Indikator Jumlah Kasus yang difasilitasi Sesuai Aturan yang berlaku

Perhitungan atas indikator ini dibatasi pada aparatur yang tidak melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan surat keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin. Target dan realisasi indikator kinerja persentase disiplin aparatur merupakan persentase jumlah aparatur yang tidak dijatuhi hukuman disiplin atau menjalani hukuman disiplin terhadap jumlah aparatur keseluruhan.

Jumlah aparatur yang dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2021 dari target 15 Kasus realisasi sebanyak 8 (delapan) 4 kasus sudah ditetapkan dan 4 masih Proses. Sedangkan aparatur memohon izin perceraian dari target 15 Kasus dengan realisasi 16 Kasus.

Proses Penyelesaian dan atau dugaan pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin perceraian

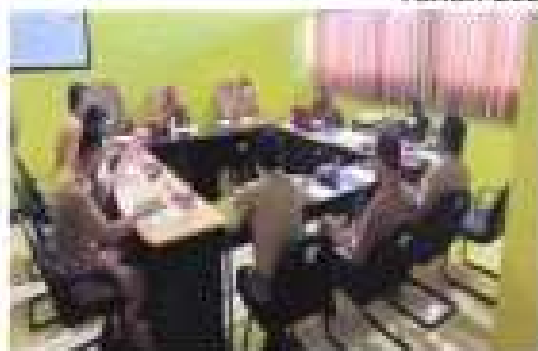
Proses penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pemanggilan: dapat dilakukan secara lisan, apabila pemanggilan

secara lisan tidak dipenuhi oleh PNS yang bersangkutan, maka dilakukan secara tertulis;

- b. Pemeriksaan: Pejabat yang melakukan pemeriksaan harus berdasarkan surat perintah yang ditandatangani oleh pejabat yang pangkat dan golongannya lebih tinggi;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan: dijadikan bahan pertimbangan penjatuhan disiplin atau pembebasan dari sangkaan melakukan pelanggaran disiplin;
- d. Penyampaian surat keputusan: disampaikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan surat keputusan.

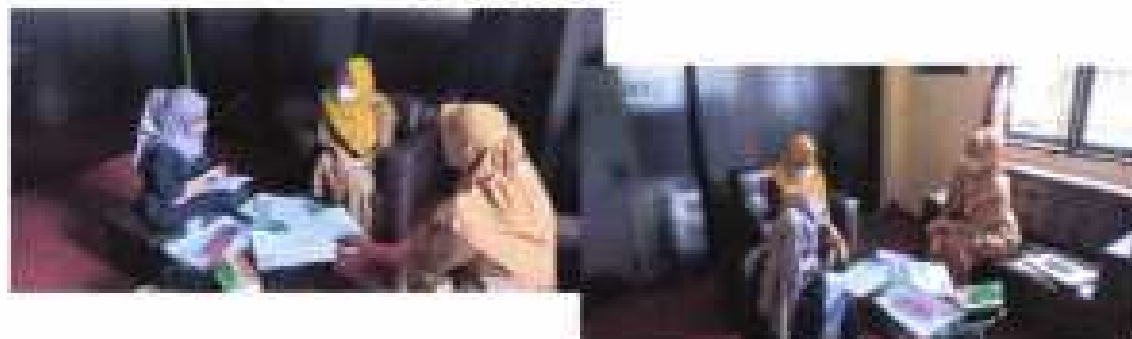
**Kegiatan Rapat Majelis Pertimbangan
Penjatuhan Hukuman Disiplin
Lingkungan Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2021**



Proses penyelesaian ijin perceraian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1. Pengajuan ijin perceraian dari PNS secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap.
- 2. Perangkat daerah dari PNS yang bersangkutan menerbitkan surat pengantar dan surat rekomendasi untuk diproses di BKPSDM.
- 3. Konseling oleh BKPSDM sebagai upaya untuk dapat mendamaikan kedua belah pihak (PNS) yang menggugat cerai pada pasangannya.
- 4. BKPSDM melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) sehingga dapat diambil kesimpulan untuk mengizinkan atau tidak PNS yang menggugat cerai suaminya / istrinya.

**Kegiatan konseling rapat majelis pertimbangan
izin perceraian dan perkawinan
lingkungan kabupaten tanah laut
Tahun 2021**



**Upaya dalam mengurangi tingkat pelanggaran disiplin PNS
dikabupaten Tanah Laut Yakni:**

1. Pembinaan gerakan disiplin dengan pengawasan dan memantau tingkat kehadiran dan keberadaan PNS pada waktu jam kerja.
 2. Melakukan pembinaan disiplin yang menekankan pada proses penanganan kasus pelanggaran disiplin sejak dini oleh atasan langsung.
 3. Memperluas cakupan gerakan disiplin daerah.
 4. Implementasi sistem e-kinerja dengan metode aktivitas harian dan penilaian perilaku
 5. Hasil penilaian kinerja harian dan penilaian perilaku sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan PNS.
- **Capaian pada strategis 2 dengan Indikator Jumlah Dokumen SLKS yang Diverifikasi**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya dianugerahkan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, Pengabdian, kecakapan, Kejujuran dan kedisiplinan. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya merupakan kebanggaan yang mempunyai arti sangat penting bagi setiap PNS untuk lebih meningkatkan semangat kerja dan menjadi teladan bagi pegawai lainnya di lingkungan kerja masing-masing.

Pada Tahun 2021 dari target 300 yang akan diusulkan mendapatkan SLKS dengan realisasi usulan sebanyak 611 SLKS sesuai Keputusan Presiden Nomor 14 / TK / Tahun 2021 pada tanggal 27 September 2021 perihal

pemberian penghargaan SLKS pada PNS Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 maka realisasi capaian 203%, dengan rincian:

- Jenis Penghargaan XXX Tahun (emas) sebanyak 137 PNS, jenis penghargaan yang diberikan kepada PNS yang apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 30 Tahun
- Jenis Penghargaan XX Tahun (perak) sebanyak 32 PNS, jenis penghargaan yang diberikan kepada PNS yang apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 20 Tahun
- Jenis Penghargaan X Tahun (perunggu) sebanyak 32 PNS, jenis penghargaan yang diberikan kepada PNS yang apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 Tahun

Masa bekerja secara terus-menerus dihitung sejak PNS yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS. Pemberian Penghargaan Satyalencana Karya Sayta dianugerahkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat Pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan RI atas usul Instansi.

➤ **Capaian pada strategis 3 dengan Indikator Jumlah ASN yang Memasuki Batas Usia Pensiun**

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang petunjuk teknis (Juknis) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengatur tentang jenis pemberhentian PNS.



Pelaksanaan Pemberhentian PNS dan Berdasar Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, yang dimaksud pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Syarat mendasar bagi PNS untuk mendapatkan pensiun adalah PNS tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apabila PNS diberhentikan tidak dengan hormat, walaupun syarat lain memenuhi, ia tak berhak atas pensiun. Syarat lain dimaksud adalah:



1. Telah mencapai sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun, atau
2. Oleh tim penguji kesehatan PNS dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani/rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatan, atau
3. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani/rohaninya yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatannya, atau
4. Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena sebagai tenaga kelebihan, apabila telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

Dengan adanya Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa purna, Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengadakan kegiatan Ramah Tamah purna tugas bersama Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut. Dengan 100 peserta yang memasuki pensiun periode Juli s/d Desember 2021 dimana dari jumlah tersebut diikuti oleh sebagian guru, pejabat dan tenaga fungsional umum, kegiatan ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian purna tugas selama menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selain itu kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi purna tugas PNS.

Gambar 15
Ramah Tamah Purna Tugas PNS



Tujuan kegiatan Ramah Tamah ini Purna Tugas antara lain

1. untuk memotivasi, memberikan pencerahan dan kesiapan mental dalam memasuki masa purna tugas.
2. memberikan bekal kemampuan, ketrampilan serta sikap dalam kewirausahaan dan produktifitas yang sehat.
3. mengembangkan bakat dan minat PNS untuk meraih kemandirian.



Faktor Faktor yang dihadapi menjelang Purna Tugas PNS

Kecemasan adalah faktor utama dalam menghadapi masa Pensiun antara lain :

- a. Status Sosial, status Pekerjaan, Jabatan, Penghargaan dan Pengakuan yang berlaku dalam keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat
- b. Sumber penghasilan berkenaan dengan Keuangan (gaji), biaya hidup
- c. Karier meliputi sikap terhadap pekerjaan perubahan rutinitas dan aktivitas Kerja
- d. Interaksi dengan teman teman, kesempatan berkomunikasi dan melakukan Kegiatan bersama dengan rekan kerja
- e. Hilangnya rasa berarti/ berguna bagi masyarakat sekelilingnya

Strategis menjelang Purna Tugas PNS menghindari Kecemasan saat menjalani masa pensiun

1. Bagi para Purna tugas sebaiknya dapat menerima masa pensiun dengan ikhlas karena datang usia pensiun tidak identik dengan berakhirnya produktivitas selama orang itu masih produktif maka masih banyak peluang untuk memulai usaha agar kondisi finansial diri dan keluarga tetap baik,
2. Mempersiapkan diri lebih awal menghadapi masa pensiunan dengan menentukan usaha menjelang masa masa pensiun
3. Untuk Instansi Pemerintah dapat melaksanakan Progam Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau pembekalan dengan menggelar training yang berguna dan memberi pengetahuan untuk mengisi kesibukan dimasa Pensiun



Tabel III.46
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran Indikator Kinerja Eselon IV
Kasubbid Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan Aparatur

Sasaran Strategis	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Fisik		Capaian (%)	Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		pagu	Realisasi	
	Kegiatan Pelatihan dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
Memfasilitasi Pelaksanaan Kasus kasus pelanggaran Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin Aparatur	Jumlah Sk Hukuman Disiplin	15 SK	4 SK	26,67	272.789.870	206.603.700	72,27
Melaksanakan Verifikasi Data usulan Satya Lencana Karya Satya		Jumlah Sk izin Perceraian	15 SK	16 SK	106,67			
Memfasilitasi Pelayanan Pensiun ASN		Jumlah SK Pensiun	250 org	142 org	56,80			

5.3 Capaian Indikator pada Perjanjian Kinerja (Eselon IV) Kasubbid Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, penyajian dan penyimpanan data dan informasi, Kasubbid Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Staf pelaksana

Gambar III. 16
Sumber Daya Aparatur
Sub Bidang Data dan Informasi



Tabel III.47
Target dan Realisasi Capaian Indikator Eselon IV
Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Melaksanakan Pemutakhiran Data Kepegawaian	1. Jumlah Data Kepegawaian yang Dimutakhirkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100
Melaksanakan Update Aplikasi Kepegawaian	2. Jumlah Aplikasi Data Kepegawaian yang diupdate dan berfungsi dengan Baik	5 Aplikasi	5 Aplikasi	100

- Capaian pada strategi 1 dengan Indikator Jumlah Dokumen Data Kepegawalan yang dimutakhirkan



Untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala Badan Kepegawalan Negara (BKN) mengeluarkan

sebuah keputusan *nomor 87 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik*,

Pemutakhiran data ini dilakukan untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) *Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* dan target satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai *Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.

untuk mendapatkan data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akurat, terkini dan terintegrasi maka perlu memanfaatkan teknologi informasi. Untuk merealisasikan itu semua Badan Kepegawalan Negara sudah membangun yang

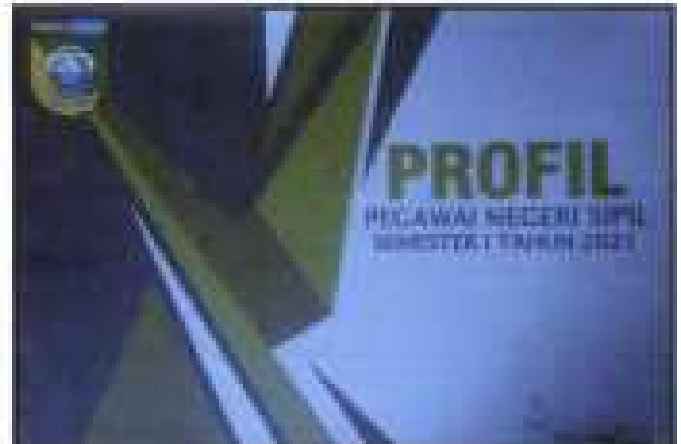


Namanya aplikasi MySAPK berbasis gawai (mobile) dan web.

pada Tahun 2021 selain pemutakhiran data pada Aplikasi My SAPK, Badan Kepegawaian juga menyesuaikan Dokumen Kepegawaian yang di update periode per Semester, dari target 4 dokumen data kepegawaian yang terealisasi sebanyak 4 dokumen, yang terdiri dari :

- Dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- Dokumen Profil PNS;
- Dokumen Daftar Urut Kepangkatan;
- Penjagaan Batas Usia Pensiun (BUP)

Dokumen / Data keluaran Aplikasi



- Pada Tahun 2021 dari target 5 aplikasi data kepegawaian yang dikelola dan diupdate terealisasi sebanyak 5 aplikasi, yang terdiri dari

- Data Kepegawaian yang dikelola oleh Sistem Aplikasi yang terupdate setiap Semester**





Masalah dan Kendala dalam pengembangan Aplikasi dan Pemutakhiran data Kepegawaian

- a. Banyak pegawai ASN yang gagap teknologi, apalagi jika pegawai tersebut tidak terbiasa atau tidak memiliki banyak kesempatan bekerja di belakang layar komputer
- b. *user overload* mengakses server
- c. Rumit terintegrasinya data PNS satu sama lain kerap mengakibatkan terjadinya duplikasi data yang kemudian menyebabkan inefisiensi dalam penanganan masalah kepegawaian.
- d. Tidak tersedianya anggaran untuk meningkatkan kompetensi Tim pengembangan aplikasi

Solusi dan Rencana tindak Pengendalian dalam pengembangan Aplikasi dan Pemutakhiran data Kepegawaian

- a. Mengajukan pengusulan anggaran untuk pelaksanaan workshop dan pengembangan aplikasi untuk Tim IT
- b. Pelatihan untuk Penajaman Fitur baru teknis penggunaan aplikasi (SIDIKA) yang dihadiri oleh pengelola kepegawaian SKPD



Tabel III.48
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis Eselon IV
Sub Bidang Data dan Informasi

Sasaran Strategis	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Fisik		Capaian (%)	Realisasi Anggaran		Capaian (%)
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		pagu	Realisasi	
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							
Melaksanakan Pemutakhiran Data Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Kepegawaian	5 Aplikasi	5 Aplikasi	100	644.207.136	491.596.344	76,31
Melaksanakan Update Aplikasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Kepegawaian	4 Dok	4 Dok	100			
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Arsip Konvensional ASN	500 Arsip	500 Arsip	100	61.085.200	44.189.100	73,34

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

I. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021 pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan Tugas Pokok untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan pagu murni sebesar Rp. 42.541.872.837,00,- 3 (tiga) Program,

11 (sebelas) Kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan Pagu Perubahan Rp. 41.939.609.677,00- dengan serapan dana APBD sebesar Rp. 21.352.818.435,00,- atau 50,91% dengan kondisi anggaran SILPA sebesar Rp. 20.586.791.242,00,- dengan hasil pengukuran Kinerja rata rata capaian Kinerja Tahun 2021 sebesar 89,11 %

Tabel III.49
Anggaran dan Realisasi Anggaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

URAIAN	2021		%
	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	
BELANJA OPD	41.939.609.677	21.352.818.435	50.91
BELANJA OPERASI	41.450.301.957	20.897.682.781	50.42
Belanja Pegawai	32.883.894.382	16.082.347.054	48.94
Belanja Barang dan Jasa	8.566.407.575	4.805.335.727	56.10
BELANJA MODAL	489.307.720	455.135.654	93.02
Belanja Peralatan dan Mesin	489.307.720	455.135.654	93.02
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	41.939.609.677	21.352.818.435	50.91



2. Anggaran dan Realisasi Menurut Satoran dan Program Tahun Anggaran 2021

Tabel III.50
Anggaran dan Realisasi Menurut Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2021

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
I	Program Kepegawaian Daerah	4,551,321,896	2.443.889.738	53,58
1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1,558,638,586	868.282.904	55,48
2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	737,974,380	570.575.800	77,32
3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1,991,919,000	708.407.534	35,56
4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	272,798,870	206.603.700	75,74
II	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,684,238,580	1.278.176.300	47,62
5	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2,684,238,580	1.278.176.300	47,62
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34,894,048,201	17.636.772.397	50,82
6	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42,520,350	21.617.000	51,33
7	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32,866,370,872	16.103.512.954	48,94
8	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19,673,500	19.673.500	100
9	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,068,119,029	914.214.974	85,59
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	540,178,350	466.447.219	86,72
11	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128,187,100	103.108.750	80,43
TOTAL		41,939,606,677	21.362,818,436	50,91

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

1. Pada Tahun Anggaran 2020, SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dengan di dukung alokasi Anggaran Rp. **11.471.559.484,60-** dengan serapan realisasi **6.610.780.409,00** atau Capaian **57,83%** dengan dengan SILPA sebesar Rp. **4.860.879.075,60,-** sedangkan pada Tahun 2021 pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam pagu murni sebesar Rp. **42.541.872.837,00,-** 3 (tiga) Program, **11 (sebelas) Kegiatan**, dan **34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan** dengan Pagu Perubahan Rp. **41.939.609.677,00-** dengan serapan dana APBD sebesar Rp. **21.352.818.435,00,-** atau **50,91%** dengan kondisi anggaran SILPA sebesar Rp. **20.586.791.242,00,-** dengan hasil pengukuran Kinerja rata rata capaian Kinerja Tahun 2021 sebesar **89,11 %**



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

BAB IV

PENUTUP



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LAKIP
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2021 merupakan Tahun ke tiga dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2018 – 2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan Partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta di tingkatkan, sementara itu untuk target target yang belum dicapai perlu antisipasi dan di dukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai Misi ke 3 (tiga) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Sasaran Strategis yang ditetapkan yakni ***"Membangun tata Kelola Pemerintahan yang baik"*** dengan indikator *Indeks Reformasi Birokrasi*, indeks Reformasi telah tercapai, yaitu dengan Nilai, **74,55** dengan Kategori Sangat Baik.

Sebagian besar Pelaksanaan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut bersifat Fasilitasi dan pelaksanaannya bergantung pada Kebijakan Instansi Pusat, Lembaga Penyelenggaraan Diklat dan Lembaga Pembina lainnya.

Langkah – langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan kami rumuskan dalam rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

- a. Melakukan Inovasi dan perbaikan pelayanan administrasi Kepegawaian
- b. Perencanaan pengembangan Kompetensi Pegawai yang merata bagi seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka memenuhi Undang undang ASN
- c. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang evaluatif atas permasalahan dan kendala dimasa sebelumnya, akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan, efisien sumber daya dalam pelaksanaan

kegiatan, serta efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan

- d. Terkait pencapaian realisasi kinerja, masing masing kegiatan tidak hanya fokus dalam merealisasikan *output* dalam kegiatannya saja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis tetapi juga melaksanakan pemantauan atas hasil/ *outcome* sebagai tindak lanjut atas capaian sasaran tersebut. Dengan kata lain bahwa tidak hanya sekedar mengukur seberapa besar *output* yang terealisasi, tetapi juga mengukur seberapa besar *outcomenya* yang ingin dicapai dari terlaksanannya kegiatan tersebut

8. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Strategis yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimasa mendatang antara lain yaitu :

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan manajemen Talenta harus di dukung Sistem Merit yang Optimal dan di implementasikan secara bertahap agar menghasilkan Sumber daya Manusia yang memiliki Potensi sesuai jabatan yang akan diduduki
- 2) Penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pengelolaan aparatur untuk mendukung roadmap Reformasi Birokrasi
- 3) Kebutuhan Pegawai dipenuhi berdasarkan beban kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut,
- 4) Manajemen Kinerja terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut
- 5) Penguatan Pengembangan dengan peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur sesuai amanat oleh Peraturan pemerintah No 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS yakni bahwa Pengembangan Kompetensi menjadi hak bagi setiap ASN minimal 20 (dua puluh) Jam pelatihan (JP) dalam setahun
- 6) Pola Pembinaan Disiplin Pegawai dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan
- 7) Peningkatan Layanan Kepegawaian Berbasis IT

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja instansi Pemerintah(LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kepada pihak pihak terkait sebagai *stakeholders* atau pun pihak lain yang telah mengambil Bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tanah Laut, dan harapan kami dengan Laporan Kinerja kami ini dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan kinerja dimasa yang akan datang

Pelaihari, Februari 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. TALJUDIN NOOR EFFENDI, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19630808 198602 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

LAMPIRAN



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LAKIP
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

INDIKATOR KINERJA
UTAMA



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LAKIP
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021

**Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut**

Kabupaten : Tanah Laut

Nama SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pengembangan pegawai.
 - d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan mutasi, pembinaan disiplin, dan pemberhentian pegawai.
 - e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pengolahan data dan kesejahteraan pegawai.
 - f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan diklat.
 - g. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian unit pelaksana teknis.
 - h. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumusan	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara	1. Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi :	$\frac{\text{jumlah pegawai yang sudah mengikuti diklat manajerial}}{\text{jumlah jabatan struktural Kabupaten Tanah Laut}} \times 100$	Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur - Sub Bidang Diklat Aparatur
		2. Kompetensi teknis	$\frac{\text{jumlah pegawai yang sudah mengikuti diklat teknis}}{\text{jumlah jabatan Struktural dan jabatan Fungsional Umum Kabupaten Tanah Laut}} \times 100$	Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur - Sub Bidang Diklat Aparatur
2	Meningkatnya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi	1. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	$\frac{\text{jumlah pegawai yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan}}{\text{jumlah jabatan Struktural yang tersedia sesuai kompetensi}} \times 100$	Bidang Mutasi, Data, dan Informasi - Sub Bidang Mutasi dan Kependidikan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi kepegawaian	1. Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian :	$\frac{\text{jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah unsur yang terisi}}$	
		- Nilai rata - rata unsur	$\text{jumlah nilai rata - rata unsur} \times 0.11$	
		- Nilai IKM	$\text{jumlah rata rata tertimbang} \times 25$	

Pelatihari, 28 Oktober 2021
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut,

Dr. H. Tajuddin Noor Effendi, M.Si
NIP.196308081986021008





PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

**PERNYATAAN PERJANJIAN
KINERJA TAHUN 2021**



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LAKIP
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. A. Syahrir No. 18 Pelaihari 71314 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Tajuddin Noor Effendi, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SUKANTA

Jabatan : Bupati Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 28 Oktober 2021

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

Bupati Tanah Laut

Drs. H. Tajuddin Noor Effendi, M.Si
NIP. 19630808 198602 1 008

PERJALANAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sat Negeri	Persentase Aparatur Sat Negeri yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi	81,20%
2	Meningkatkan Kualitas Sat Negeri yang Mendukung Sumbangan Kompetensi	Persentase Aparatur yang Menerima Sumbangan Kompetensi	100%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan	Sesuai

NO	PROGRAM	KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGSARAN (Rp)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		24.864.348.207
		1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.528.388
		Sub Kegiatan	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.740.200
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.504.700
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perbaikan RKA-SKPD	2.584.100
		4 Koordinasi dan Penyusunan (Revisi) RKA-SKPD	2.300.000
		6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.300.000
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana RKA-SKPD	3.077.100
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.364.700
		2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.498.270.872
		Sub Kegiatan	
		1 Penyediaan Gap dan Lunas APB	22.883.804.382
		2 Pelaksanaan Pembukuan dan Pengawasan Vertikal Keuangan SKPD	2.070.500
		2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SAP	6.450.000
		3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.872.500
		Sub Kegiatan	
		1 Pengisian Pokok Urut secara Rutin Kepegawaian	19.872.500
		4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.888.118.228
		Sub Kegiatan	
		1 Penyediaan Kebutuhan Kertas dan Perlengkapan Kantor	6.071.810
		2 Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	527.386.418
		2 Penyediaan Perawatan Rumah Tugos	3.882.540
		4 Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian	28.027.540
		5 Penyediaan Bahan Bakar dan Perawatan Perbaikan Kendaraan	3.480.000
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	428.275.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		V. Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan 1. Peningkatan Jasa Surat Menyurat 2. Peningkatan Jasa Komunikasi Surat/Dok. Ar dan Iklan 3. Peningkatan Jasa Pelayanan Urusan Rumah	940.175.300 82.507.124 170.115.500 277.552.676
		VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan 1. Peningkatan Jasa Pemeliharaan, Reparasi, Pemeliharaan, Pakan dan Perawatan Kandang Ternak Dinas/Departemen atau Lapangan 2. Pemeliharaan Perbaikan dan Merak Lahan 3. Pemeliharaan/Pemastikan Jembatan, Rambu dan Bangunan Lainnya	128.587.500 30.000.000 48.474.000 50.113.500
8	KEPELAKSIAN DAERAH		4.661.527.896
		VI. Penguatan, Peningkatan dan Informasi Kapasitas ASN Sub Kegiatan 1. Penyelenggaraan Program Pendidikan, Jasa dan Latihan Jabatan untuk Peningkatan Penguatan ASN 2. Kebutuhan dan Fasilitas Penguatan PNS dan PPPK 3. Penguatan Sistem Informasi Manajemen 4. Penguatan Data Kapasitas	1.588.838.500 31.019.000 821.627.000 544.307.100 81.083.200
		VII. Mutasi dan Promosi ASN Sub Kegiatan 1. Penguatan Mutasi ASN 2. Penguatan Karir dan Penguatan ASN 3. Penguatan Promosi ASN	727.374.300 288.338.740 280.796.040 158.239.520
		IX. Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan 1. Penguatan Kompetensi Kewira ASN 2. Penguatan Perbaikan Lapangan ASN	1.393.076.200 888.030.800 505.045.400
		X. Perlakuan dan Eksklusif Kewira Aparatur Sub Kegiatan 1. Peningkatan Urusan ASN	273.789.870 273.789.870
10	PEMBERILANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	XI. Sertifikasi, Kertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan	2.084.378.300 3.844.328.500

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1.664.238.362

Pelihar, 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
H. SUKAMTA

Komite Badan Kepengawasan dan
Pengendalian Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut
Drs. H. Zuhairi Noor Effendi, M.Si
NIP. 19630808 198602 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

**CASCADING /
POHON KINERJA**



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LAKIP
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

**CAPAIAN PER TRIWULAN
(I S.D. IV)**



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LAKIP
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jl. A. Syahrir Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21843 Fax. (0512) 21115

Pelaihari, 13 April 2021

Kepada Yth,

Nomor : 906/438-Sekret/BKPSDM/IV/2021
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi Capaian Kinerja
Triwulan I TA 2021

1. Sekretaris
 2. Kepala Bidang
 3. Kepala Sub Bidang
- BKPSDM Kabupaten Tanah
Laut

Di -

Tempat

Selubungan dengan adanya surat dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor: 005/871/Bappeda tentang Permohonan Input E-Monev Triwulan I TA 2021, agar BKPSDM dapat menyampaikan data laporan kinerja realisasi fisik dan keuangan pada sistem e-monev (www.bappedatanahlaut.ernonev@gmail.com). Maka dengan Surat ini, Kami mengundang Bapak/Ibu agar berhadir pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 13 April 2021
Pukul : 13.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat BKPSDM Kab. Tanah Laut
Acara : - Masukkan dan Saran dalam pelaporan realisasi
keuangan, realisasi kegiatan / proses, realisasi
capaian output kegiatan dan sub kegiatan.
- Hal-hal lain yang dianggap penting.

Demikian disampaikan atas Perhatian dan Kerjasamanya Kami ucapkan
terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut,


H. HADIAT, S.Pd, S.Sos, M.Si
NIP. 19630217 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kelurahan: Melintang Kecamatan: Telaga Kecamatan: Telaga Kecamatan: Telaga

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa, 13 April 2021

Tempat : Ruang Rapat BKPPSDM Kab. Tanah Laut

Waktu : 13.00 Wita

Rapat : Rapat Koordinasi Tim Kerja Penanganan 1 TA 2021

NO	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AL HAJARIL NISAL, S.Sos, M.Si	19100217 199009 1 001	Kepala Badan	
2	H. DARU YAMANI, LPT	19061108 199603 1 002	Sekretaris	
3	FASAH TRIATMAYA, SH	19810101 200801 1 001	Kepala Bidang Mutasi, Data, dan Informasi	
4	REPOKRI CAHYONO, SH, M.A.P	19780218 200604 1 001	Kepala Bidang Pengembangan dan Penguatan Aparatur	
5	HYDRIYAH, S.Sos	19780404 200801 2 025	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan	
6	JAMZAL, S.Sos	19780120 199401 2 006	Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian	
7	ALWIRNANTYARI, S.Sos	19780917 200801 1 001	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan	
8	ISA NUBRASHARI, SH	19880217 200903 2 004	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Disiplin, dan Pengembangan Aparatur	
9	ANDRI SETIAWAN, S. Sos	19830810 200903 1 001	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi	
10	DIWANTO DOTO, S.Sos	19780827 200801 1 010	Kepala Sub Bidang Disiplin Aparatur	
11	BERNKA BETIND MAHLAYATI, S.H	19881108 200801 2 010	Kepala Sub Bidang Penguatan dan Penguatan	
12	ADWATIN KASANAH, A.Md	19780812 200903 2 006	Pengelola Pengembangan Karier pada Sub Bidang Pengembangan Karier dan Fasilitas Profesi Aparatur	
13	LELE DAMAYANTI, S.M	19940110 200903 2 009	Pengelola Program Anggaran dan Pelaksanaan	

Petugas Daftar:

Petugas Daftar, S.Sos
NIP. 19940110 200903 2 009

Laporan Hasil Rapat

Kepada Yth : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

Hari dan Tanggal : Selasa, 13 April 2021

Perihal : Hasil Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Triwulan I TA 2021

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 di ruang rapat BKPSDM Kabupaten Tanah Laut yang dihadiri oleh Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang, Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Staf Perencanaan dengan hasil Rapat:

1. Pagu Keseluruhan BKPSDM sebesar **Rp. 42.541.872.837,00,-** pada triwulan 1 Tahun Anggaran 2021 telah terserap sebesar **Rp. 2.732.455.440,00,-** dengan persentase **6,42%** dengan capaian masing-masing program sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan pagu sebesar **Rp. 34.699.329.201,00,-** telah terserap sebesar **Rp. 2.390.413.940,00,-** dengan persentase **6,89%.**
 - b. Program Kepegawaian Daerah dengan pagu sebesar **Rp. 4.676.183.576,00,-** telah terserap sebesar **Rp. 312.630.700,00,-** dengan persentase **6,69%.**
 - c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pagu sebesar **Rp. 3.166.360.060,00,-** telah terserap sebesar **Rp. 19.410.800,00,-** dengan persentase **0,93%.**
2. Bidang Sekretariat pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Triwulan 1 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra		Dok
		Jumlah Dokumen Renja	1	Dok
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD		Dok
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD		Dok
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD		Dok
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD		Dok
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahap Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laks, LRP1/LRPD, dan LKPD/CALE	3	Dok
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event		Event
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS BKPSDM	3	Bulan	2,233,861,319
		Jumlah Calon PNS	3	Bulan	
		Jumlah PPPK	3	Bulan	
9.	Peleaksanaan Penelusutan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Verifikasi		Verifikasi	
10.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bendahara		Dok.	

3. Bidang Sekretariat pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Triwulan 1 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					
Kegiatan Kepegowalan Perangkat Daerah					
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Tradisional	0	Sal	
Kegiatan Umum Perangkat Daerah					
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat Listrik dan Elektronik	0	Jenis	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Jenis	
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tongga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tongga	0	Jenis	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Dokumen yang dicetak	0	Jenis	
6	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian	9	Eks	700,000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dan Luar Daerah dalam Provinsi	3	Bulan	82,588,000
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Luar Provinsi	3	Bulan	
		Jumlah Rapat	2	Kali	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PNS Inklusif Pemkab Tala yang terbayar	3	Laporan	15,320,794
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang harus dibayar	9	Rekening	15,171,377
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Transaksi Keuangan	3	Bulan	38,301,960
		Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	0	Jenis	

		Jumlah Jenis Bibit Tanaman	0	Jenis	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 yang Dipelihara	0	Buah/ Tahun	3,857,300
		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 yang Dipelihara	4	Buah/ Tahun	
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Peralatan/Kerja yang dipelihara	1	Jenis	
13	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Bahan Baku Bangunan	3	Jenis	

4. Bidang Mutasi, Data, dan Informasi pada Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Triwulan 1 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI RUJANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN					
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi ASN dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	132	Orang	4,200,000
		Jumlah Mutasi ASN Keluar dan Masuk Lingkup Pemkab Tanah Laut	19	Orang	
		Jumlah Mutasi dan Promosi bagi ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	130	Orang	
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Gaji Berkala	1,115	Orang	101,395,000
		Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Pangkat ASN	265	Orang	
3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	1	Orang	

5. Bidang Mutasi, Data, dan Informasi pada Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin, dan Penghargaan Aparatur pada Triwulan 1 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
1	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah SK Hukuman Disiplin	5	SK	35,177,500
		Jumlah SK Izin Pencerahan	1	SK	
		Jumlah SK Pemisun	34	SK	

6. Bidang Mutasi, Data, dan Informasi pada Sub Bidang Data dan Informasi pada Triwulan 1 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Kepegawaian	5	Aplika si	34,770,000
		Jumlah Dokumen Kepegawaian	2	Dok	
2	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Anap Konvensional ASN	172	Anap	35,750,000

7. Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur pada Sub Bidang Dilat Aparatur pada Triwulan 1 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
Kegiatan Sertifikasi, Kolembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta Dilat Fungsional		Orang	29,410,800
		Jumlah Peserta Dilat Teknis		Orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2	Orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS		Orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan nasional Tk II		Orang	

		Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas		Orang	
--	--	--	--	-------	--

8. Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur pada Sub Bidang Formasi dan Pengadaan pada Triwulan 1 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLH DPA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi Kepegawaian	Dok	
2	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah Penerimaan Calon ASN	Orang	43,640,000

9. Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur pada Sub Bidang Perencanaan Karier dan Fasilitas Profesi Aparatur pada Triwulan 1 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLH DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN					
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Asesment	17	Orang	10,164,400
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Penyertaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Jarak	107	Orang	47,513,800
		Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi/Teori/ Disertasi		Orang	

10. Kepala BKPSDM mengarahkan agar kegiatan-kegiatan segera dilaksanakan demi tercapainya capaian realisasi kinerja fisik dan keuangan BKPSDM yang optimal. Dalam rangka realisasi kegiatan dan keuangan agar mempedomani Rencana Anggaran Kas (RAK).
11. Kepala BKPSDM menegaskan untuk kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar dikoordinasikan dengan pihak terkait sehingga kegiatan tersebut dapat terjadwalkan sesegera mungkin, mengingat para CPNS telah ditempatkan secara aktif di SKPD.

Demikian Laporan hasil ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Selanjutnya

Notulen,



Etenyadi, S.Sos

NIP. 19790406 200801 2 025

Foto Kegiatan Rapat

Rapat : Koordinasi Capaian Kinerja Triwulan I TA 2021

Hari / Tanggal : Selasa, 13 April 2021



CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I (JANUARI S/D MARET)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
					FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6		7=(6/4)	8	9	10= (8/5)
KEPESAWAHAN				Rp 36,375,511,777				Rp 2,793,644,640	Rp 36,673,466,137	6.88%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Rp 34,699,332,381				Rp 1,390,413,948	Rp 33,308,918,381	6.89%
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 48,900,380				Rp 613,308	Rp 48,387,180	1.33%
		Sub Kegiatan :								
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana	Rp 4,346,300		Dok	0.00%		Rp 4,346,300	0.00%
			Jumlah Dokumen Renc		1	Dok	100.00%			
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	Rp 1,699,700		Dok	0.00%		Rp 1,699,700	0.00%
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Rp 1,760,100		Dok	0.00%		Rp 1,760,100	0.00%
		4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	Rp 1,500,000		Dok	0.00%		Rp 1,500,000	0.00%
		5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Rp 1,500,000		Dok	0.00%		Rp 1,500,000	0.00%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%
1	2		3	4		5	6		7=(5/4)	8	9	10= (8/7)
	6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laku LKPD/LRPP, dan LKPD/CALK	3	Dok	Rp 1.977,150	3	Dok	100.00%	Rp 613,204	Rp 5,363,990	11.26%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event	2	Event	Rp 24,994,200		Event	0.00%		Rp 24,994,200	0.00%
	II Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp 22,897,175,872				Rp 2,233,881,319	Rp 30,463,309,553	6.79%
	Sub Kegiatan :											
	8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PMG SKPD/DA	36	Orang	Rp 22,885,894,382	3	Bulan	25.00%	Rp 2,233,881,319	Rp 30,450,003,063	6.79%
			Jumlah Calon PNS	172	Orang		3	Bulan	25.00%			
			Jumlah PPPK	58	Orang		3	Bulan	25.00%			
	9.	Pelaksanaan Pengusutan/ dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Verifikasi	2	Verifikasi	Rp 3,816,500		Verifikasi	0.00%		Rp 3,816,500	0.00%
	10.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bendahara	1	Dok	Rp 9,459,990		Dok	0.00%		Rp 9,459,990	0.00%
	III Kegiatan Kependidikan Perangkat Daerah					Rp 18,673,500				Rp -	Rp 18,673,500	0.00%
	11	Pengadaan Pakan Dinas Berorta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakan Tradisional	48	Stek	Rp 18,673,500	0	Stek	0.00%		Rp 18,673,500	0.00%
	IV Kegiatan Umum Perangkat Daerah					Rp 1,096,119,029				Rp 83,286,008	Rp 914,833,029	7.60%
	Sub Kegiatan :											
	12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat Listrik dan Elektronik	14	Jenis	Rp 9,071,810	0	Jenis	0.00%		Rp 9,071,810	0.00%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIR			REALISASI KEUANGAN			
							FISIR/ KINERJA		%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%	
1	2		3	4		5	6		7=(5/4)	8	9	10= (8/7)	
	13.	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Peningkatan Kantor	23	Jenis	Rp. 607,396,439	3	Jenis	13,04%		Rp. 607,396,439	0,00%	
	14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	3	Jenis	Rp. 3,892,640	0	Jenis	0,00%		Rp. 3,892,640	0,00%	
	15.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Dokumen yang dibuat	23	Jenis	Rp. 38,527,540	0	Jenis	0,00%		Rp. 38,527,540	0,00%	
	16.	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Surat Kabar Harian	36	Eks	Rp. 3,465,600	9	Eks	25,00%	Rp. 700,000	Rp. 3,765,600	20,20%	
	17.	Penyederajatan Rapat Koordinasi dan Komunitas SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dan Luar Daerah dalam Provinsi	12	Bulan	Rp. 406,275,000	3	Bulan	25,00%	Rp. 82,588,000	Rp. 323,687,000	20,33%	
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Luar Provinsi	12	Bulan		3	Bulan	25,00%				
			Jumlah Rapat	12	Kali		2	Kali	16,67%				
	V Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah						Rp. 540,176,350				Rp. 68,794,121	Rp. 471,384,229	12,74%
	Sub Kegiatan :												
	18.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PMS Inklusif Pemkab Tale yang diterima	12	Laporan	Rp. 93,561,104	3	Laporan	25,00%	Rp. 15,300,794	Rp. 78,260,310	16,38%	
	19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang harus dibayar	36	Rekening	Rp. 175,115,900	9	Rekening	25,00%	Rp. 13,171,377	Rp. 161,944,523	8,60%	
	20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Transaksi Keuangan	12	Bulan	Rp. 271,500,746	3	Bulan	25,00%	Rp. 38,301,960	Rp. 233,198,786	14,11%	
			Jumlah Jenis Alat Robotik dan Bahan Tambahan	23	Jenis		0	Jenis	0,00%				

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%
1	2		3	4		5	6		7=(5/4)	8	9	10=(8/9)
			Jumlah Jenis Riset Tanaman	12	Jenis		0	Jenis	0.00%			
	VI	Kegiatan Pemeliharaan Sarang Hutan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 128,187,108				Rp 1,857,300	Rp 134,339,800	1.01%
		Sub Kegiatan :										
	21.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 yang Dipelihara	8	Buah/ Tahun	Rp 52,036,000	0	Buah/ Tahun	0.00%	Rp 1,857,300	Rp 46,172,700	7.71%
			Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 yang Dipelihara	4	Buah/ Tahun		4	Buah/ Tahun	100.00%			
	22.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Peralatan/Karya yang Dipelihara	20	Jenis	Rp 48,474,000	1	Jenis	5.00%		Rp 48,474,000	0.00%
	23.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Bahan Baku Bangunan	18	Jenis	Rp 29,683,100	3	Jenis	16.67%		Rp 29,683,100	0.00%
II	PROGRAM KEPENGAWAIAN DAERAH					Rp 4,876,183,878				Rp 312,630,708	Rp 4,363,553,878	6.40%
	VII	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				Rp 1,094,107,588				Rp 114,166,098	Rp 1,479,947,588	7.18%
		Sub Kegiatan :										
	24.	Penyusunan Rencana kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formulir Kepegawaian	1	Dok	Rp 31,919,200		Dok	0.00%		Rp 31,919,200	0.00%
	25.	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah Penarikan Calon ASN	400	Orang	Rp 823,821,950		Orang	0.00%	Rp 43,640,000	Rp 780,181,000	5.10%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%
1	2		3	4		5	6		7=(6/4)	8	9	10=(8/5)
	26.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Kepegawaian	5	Aplikasi	Rp 677,262,136	5	Aplikasi	100.00%	Rp 34,770,000	Rp 642,512,136	5.13%
			Jumlah Dokumen Kepegawaian	4	Dok		2	Dok	50.00%			
	27.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Anap Konvensional ASN	600	Anap	Rp 61,080,200	172	Anap	28.40%	Rp 35,750,000	Rp 25,315,200	58.52%
VIII	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN					Rp 737,074,388			35.23%	Rp 105,995,000	Rp 633,079,388	14.33%
	Sub Kegiatan :											
	28.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi ASN dalam Jabatan Pokoknya dan Jabatan Fungsional	600	Orang	Rp 297,730,740	172	Orang	27.00%	Rp 4,200,000	Rp 293,530,740	1.41%
			Jumlah Mutasi ASN Keluar dan Masuk Lingkup Pemilih Tetap Jast	30	Orang		19	Orang	63.33%			
			Jumlah Mutasi dan Promosi bagi ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	350	Orang		180	Orang	57.14%			
	29.	Pengelolaan Karir dan Penguatan ASN	Jumlah Sorot Keputusan Bupati Tentang Karir dan Gaji Bertahap	1500	Orang	Rp 282,756,040	1,113	Orang	74.33%	Rp 181,395,000	Rp 101,361,040	35.85%
Jumlah Sorot Keputusan Bupati Tentang Karir dan Penguatan ASN			1,200	Orang	265		Orang	22.08%				
	30.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	5	Orang	Rp 157,436,600	1	Orang	16.67%		Rp 157,436,600	0.00%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA		TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)		REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
									FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%
1	2		3		4		5	6	7=(5/4)		8	9	10= (9/5)	
	12	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN					Rp 1.000.474.740					Rp 87.898.360	Rp 1.000.776.840	1.79%
	Sub Kegiatan :													
	11	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PKG yang Mengikuti Assessment	100	Orang	Rp 600.474.800	17	Orang	17.00%	Rp 10.164.400	Rp 600.310.400	1.52%		
	12	Pengadaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Penyertaan Ujian Dinas dan Ujian Kompetensi Pangkat, Penyesuaian Gaji	170	Orang	Rp 1.197.999.000	107	Orang	62.94%	Rp 47.533.800	Rp 1.150.466.110	1.40%		
			Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Penyesuaian Tugas Akhir/Simpul/Teori/Disertasi	9	Orang			Orang	0.00%					
	X	Kegiatan Pelatihan dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Rp 277.626.870					Rp 35.177.500	Rp 242.449.370	12.67%
	Sub Kegiatan :													
	13	Pembiayaan Disiplin ASN	Jumlah SK Hukuman Disiplin	15	SK	Rp 277.626.870	5	SK	33.33%	Rp 35.177.500	Rp 242.449.370	12.67%		
			Jumlah SK Tdk Penerimaan	25	SK		1	SK	4.00%					
			Jumlah SK Pensiun	250	SK		34	SK	13.60%					
III	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia						Rp 3.148.360.000					Rp 29.410.800	Rp 3.136.949.200	0.93%
	82	Kegiatan Sertifikasi, Kolaborasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					Rp 3.148.360.000					Rp 29.410.800	Rp 3.136.949.200	0.93%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KINERJA	%		KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%
1	2		3	4		5	6	7=(5/1)	8	9	10=(9/7)	
		Sub Kegiatan :										
	39.	Peningkatan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prestasi	Jumlah Peserta Diklat Fungsional	10	Orang	Rp 3.166.360.000		Orang	0.00%	Rp 20.410.800	Rp 3.136.949.200	0.00%
Jumlah Peserta Diklat Tahana			15	Orang			Orang	0.00%				
Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator			2	Orang	1		Orang	100.00%				
Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS			172	Orang			Orang	0.00%				
Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan nasional Tk II			2	Orang			Orang	0.00%				
Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas			40	Orang			Orang	0.00%				
						Rp 42.541.871.837			Rp 3.732.455.448	Rp 39.809.417.397	8.42%	

Pekanbaru, 01 April 2021
 Kepala Dinas Kependidikan dan
 Pengembangan Mutu dan Daya Manusia
 Kabupaten Sarolangun

 H. Harul Rizki, S.Sos, M.Si
 NIP. 80790217 1500001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jl. A. Syahrani Pelabuhan 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315

Pelaihari, 1 Juli 2021

Kepada Yth.

Nomor : 900/ 755 -Sekret/BKPSDM/VII/2021
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi Capaian Kinerja
Triwulan II TA.2021

1. Sekretaris
 2. Kepala Bidang
 3. Kepala Sub-Bidang
- BKPSDM Kabupaten Tanah
Laut

Dh -

Tempat

Sehubungan dengan adanya surat dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor: 050.13/1903/Bappeda tentang Permohonan Input E-Monev Triwulan II TA 2021, agar BKPSDM dapat menyampaikan data laporan kinerja realisasi fisik dan keuangan pada sistem e-monev (www.bappedatanahlaut.emonev9.com). Maka dengan Surat ini, Kami mengundang Bapak/Ibu agar berhadir pada:

- Hari / Tanggal : Senin, 05 Juli 2021
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat BKPSDM Kab. Tanah Laut
Acara : - Masukan dan Saran dalam pelaporan realisasi
keuangan, realisasi kegiatan / proses, realisasi
capaian output kegiatan dan sub kegiatan.
- Hal-hal lain yang dianggap penting.

Demikian disampaikan atas Perhatian dan Kerjasamanya Kami ucapkan
terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia


H. HAIRIL BILAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19580217 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat: Pabelan Timur, Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Senin, 05 Juli 2021

Tempat : Ruang Rapat BPPSDM Kab. Tanah Laut

Waktu : 09.00 WIB

Rapat : Koordinasi Capaian Kinerja Tahunan (KTA 2021)

NO.	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1	H. HARISAL RINAL, S.Sos, M.Si	19708217 199009 1 001	Kepala Badan		
2	H. ZARI TAMANI, S.Pi	19761128 199605 1 003	Sekretaris		
3	PAJAN TIJATHALL, IH	19810101 200802 1 001	Kepala Bidang Mutasi, Data, dan Informasi		
4	HERIBO CAHYONO, SE, M.A.P	19730216 200604 1 003	Kepala Bidang Pengembangan dan Peningkatan Aparatur		
5	PITERIYANI, S.Su	19790404 200601 2 025	Kepala Sub Bagian Personalia dan Kepegawaian		
6	MOH. HADYAH, S.Mi	19801205 200501 1 007	Kepala Sub Bagian Umum dan Pengelolaan		
7	ALMEHARIYAL, L.Am	19760917 200802 1 002	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan		
8	ISA HUSKASRIANI, IH	19800527 200903 1 006	Kepala Sub Bidang Pembekalan, Disiplin, dan Pengembangan Aparatur		
9	ARDEI SETIYAWA, S. Su	19850815 200902 1 005	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi		
10	ABDI SUPTIL, S.A.P	19800316 200504 1 008	Kepala Sub Bidang Objektif Aparatur		
11	IRFAN LITERY, S.Mi	19850203 200902 1 004	Kepala Sub Bidang Personalia dan Pengadaan		
12	AGWATUN HASANAIL, S.Mi	19791012 200903 1 006	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Fasilitas Pejabat Aparatur		
13	LILIS DAMAYANTI, S.Am	19960118 201903 2 009	Pengelola Program Anggaran dan Pelaporan		

Pembaca Daftar,

Lili Setiawati, S.Su
NIP. 19960110 201903 2 009

Laporan Hasil Rapat

Kepada Yth : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut

Hari dan Tanggal : Senin, 05 Juli 2021

Perihal : Hasil Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Triwulan II TA 2021

Rapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 di ruang rapat BKPSDM Kabupaten Tanah Laut yang dihadiri oleh Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang, Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Staf Perencanaan dengan hasil Rapat:

1. Pagu Keseluruhan BKPSDM sebesar **Rp. 42.541.872.837,00,-** pada triwulan 2 Tahun Anggaran 2021 telah terserap sebesar **Rp. 9.290.924.406,00,-** dengan persentase **21,84%** dengan capaian masing-masing program sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan pagu sebesar **Rp. 34.699.329.201,00,-** telah terserap sebesar **Rp. 8.448.182.610,00,-** dengan persentase **24,35%.**
 - b. Program Kepegawaian Daerah dengan pagu sebesar **Rp. 4.676.183.576,00,-** telah terserap sebesar **Rp. 716.323.996,00,-** dengan persentase **15,32%.**
 - c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pagu sebesar **Rp. 3.166.360.060,00,-** telah terserap sebesar **Rp. 126.417.800,00,-** dengan persentase **3,99%.**
2. Bidang Sekretariat pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Triwulan 2 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					
Perencanaan, Penguasaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	0	Dok	1,792,500
		Jumlah Dokumen Rencan Rerje	1	Dok	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1	Dok	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	0	Dok	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1	Dok	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	0	Dok	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Sistem Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, UKP/LUPD, dan LKPD/CALK	3	Dok	4,700,700

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event	0	Event	-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS BKPSDM	6	Bulan	7,951,178,461
		Jumlah Calon PNS	6	Bulan	
		Jumlah PPPK	6	Bulan	
9	Penaksanaan Pemutakhiran dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Verifikasi	1	Verifikasi	-
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bendahara		Dok	5,557,100

3. Bidang Sekretariat pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Triwulan 2 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					
Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pengadaan Pakan Dinas Berupa Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakan Tradisional	0	Staf	-
Kegiatan Umum Perangkat Daerah					
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat Listrik dan Elektronik	0	Jenis	-
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Jenis	38,369,796
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	2	Jenis	-
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Dokumen yang dicetak	0	Jenis	1,125,000
6	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian	18	Eks	1,710,000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dan Luar Daerah dalam Provinsi	6	Bulan	199,431,538
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Luar Provinsi	6	Bulan	
		Jumlah Rapat	3	Kali	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PNS lingkup Pemkab Tala yang berlayani	6	Laporan	46,413,552

9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang harus dibayar	18	Rekening	47,836,929
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Transaksi Keuangan	6	Bulan	112,174,784
		Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	0	Jenis	
		Jumlah Jenis Sifat Tanaman	0	Jenis	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 yang Dipelihara	5	Buah/ Tahun	21,482,250
		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 yang Dipelihara	4	Buah/ Tahun	
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Peralatan/Kerja yang dipelihara	5	Jenis	13,105,000
13	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Bahan Baku Bangunan	5	Jenis	4,105,000

4. Bidang Mutasi, Data, dan Informasi pada Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Triwulan 2 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN					
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi ASN dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	203	Orang	122,283,600
		Jumlah Mutasi ASN Keluar dan Masuk Lingkup Pemkab Tanah Laut	26	Orang	
		Jumlah Mutasi dan Promosi bagi ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	264	Orang	
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Gaji Berkala	1,576	Orang	191,740,100
		Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Pangkat ASN	322	Orang	

3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	2	Orang	25,300,000
---	-------------------------	--	---	-------	------------

5. Bidang Mutasi, Data, dan Informasi pada Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin, dan Penghargaan Aparatur pada Triwulan 2 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
1	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah SK Hukuman Disiplin	6	SK	88,478,700
		Jumlah SK Lain Penerapan	5	SK	
		Jumlah SK Pensiun	77	SK	

6. Bidang Mutasi, Data, dan Informasi pada Sub Bidang Data dan Informasi pada Triwulan 2 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Kepegawaian	5	Aplikasi	79,805,236
		Jumlah Dokumen Kepegawaian	2	Dok	
2	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Ansp Konvensional ASN	185	Ansp	37,252,700

7. Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur pada Sub Bidang Dilat Aparatur pada Triwulan 2 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
Kegiatan Sertifikasi, Ketenagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					
1	Pencelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta Dilat Fungsional	0	Orang	126,417,800
		Jumlah Peserta Dilat Teknis	0	Orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2	Orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS	0	Orang	

	Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan nasional Tk II	2	Orang	
	Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	0	Orang	

8. Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur pada Sub Bidang Formasi dan Pengadaan pada Triwulan 2 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi Kepegawaian	0	Dok	5,472,900
2	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah Penerimaan Calon ASN	0	Orang	64,785,960

9. Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur pada Sub Bidang Perencanaan Karier dan Fasilitas Profesi Aparatur pada Triwulan 2 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN					
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Asesment	17	Orang	31,309,000
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Penyertaan Ujian Dinas dan Ujian Konalokan Pongkot Penyesuaian Ujalah	124	Orang	66,065,800
		Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi	9	Orang	

10. Kepala BKPSDM mengarahkan para pejabat pelaksana teknis kegiatan mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bahan diskusi selanjutnya agar kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target dapat segera dilaksanakan.
11. Kepala BKPSDM menegaskan untuk meningkatkan realisasi kegiatan atau kinerja fisik mengingat triwulan 2 atau semester 1 dalam tahun anggaran telah terlwati.

Demikian Laporan hasil ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Selanjutnya

Notulen,



Etenyael S. Sos

NIP. 19790406 200801 2 025

Foto Kegiatan Rapat

Rapat : Koordinasi Capaian Kinerja Triwulan II TA 2021

Hari / Tanggal : Senin, 05 Juli 2021



CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II (JANUARI S/D JUNI)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLH DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
					FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%
1	2	3	4	5	6	7=8/10	8	9	10= 10/5	11= 10/5
KEPEGAWAIAN				Rp. 39,375,511,777			35.13%	Rp. 9,164,506,806	Rp 38,211,004,171	23.27%
I	PROGRAM PERUMAH URUSAN PENERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Rp. 34,699,329,201			35.28%	Rp. 8,448,182,810	Rp28,251,146,391	24.35%
	I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 44,000,350			50.00%	Rp. 8,493,200	Rp. 39,507,150	14.12%
	Sub Kegiatan :									
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana	1 Dok	Rp. 4,545,700	0 Dok		0.00%	Rp. 1,793,700	Rp. 2,752,000	39.43%
		Jumlah Dokumen Rortje	1 Dok		1 Dok		100.00%			
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 Dok	Rp. 1,699,700	1 Dok		100.00%	Rp. -	Rp. 2,699,700	0.00%
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dok	Rp. 2,783,100	0 Dok		0.00%	Rp. -	Rp. 2,783,100	0.00%
	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1 Dok	Rp. 2,500,000	1 Dok		100.00%	Rp. -	Rp. 2,500,000	0.00%
	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dok	Rp. 2,500,000	0 Dok		0.00%	Rp. -	Rp. 2,500,000	0.00%
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan, URP/LRPD, dan URP/CAK	3 Dok	Rp. 1,977,150	1 Dok		100.00%	Rp. 4,700,700	Rp. 1,276,450	78.64%
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Exitil	1 Event	Rp. 24,994,200	0 Event		0.00%	Rp. -	Rp. 24,994,200	0.00%
	II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 12,887,170,873			50.00%	Rp. 7,856,735,581	Rp24,940,425,311	24.18%
	Sub Kegiatan :									
	1. Pembiayaan Gap dan Tuntutan ACR	Jumlah PMS SKPD/DM	15 Orang		0 Orang		100.00%			

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DUM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%
1	2		3	4		5	6		7=10/4	8		9=7/5
			Jumlah Calon PHS	173	Cuacng	Rp 12,881,094,382	0	Bulan	50.00%	Rp 7,953,176,461	Rp 21,932,715,921	24.18%
			Jumlah PPHK	58	Cuacng		0	Bulan	50.00%			
	9.	Pelaksanaan Pemasteksifan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Verifikasi	2	Verifikasi	Rp 1,815,500	1	Verifikasi	50.00%	Rp -	Rp 1,816,500	0.00%
	10.	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Berakutansi	1	Dok	Rp 5,459,940		Dok	00.00%	Rp 5,557,100	Rp 1,402,800	55.74%
	III Kegiatan Kepengawasan Perangkat Daerah					Rp 19,673,500			0.00%	Rp -	Rp 19,673,500	0.00%
	11.	Pengujian Pakuan Dinas Berwaja Aktual Kelengkapannont	Jumlah Pengujian Pakuan Tradisionat	49	Sat	Rp 19,673,500	0	Sat	0.00%	Rp -	Rp 19,673,500	0.00%
	IV Kegiatan Umum Perangkat Daerah					Rp 1,066,118,029			29.29%	Rp 240,656,334	Rp 827,462,695	22.83%
	Sub Kegiatan :											
	12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peninggian Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat Listrik dan Elektronik	14	Jenis	Rp 9,071,810	0	Jenis	0.00%	Rp -	Rp 9,071,810	0.00%
	13.	Penyediaan Peralatan dan Peninggian Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Peninggian Kantor	23	Jenis	Rp 827,388,439	4	Jenis	17.39%	Rp 36,369,790	Rp 509,016,642	6.12%
	14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	3	Jenis	Rp 1,862,640	2	Jenis	66.67%	Rp -	Rp 1,862,640	0.00%
	15.	Penyediaan Binang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Dokumen yang cetak	29	Jenis	Rp 38,027,540	0	Jenis	0.00%	Rp 1,125,000	Rp 38,902,540	2.95%
	16.	Penyediaan Bahan Bakar dan Perawatan Perunding - umdang	Jumlah Jenis Bahan Bakar	36	Eks	Rp 1,405,600	16	Eks	50.00%	Rp 1,715,000	Rp 1,715,600	49.54%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA		TARGET KINERJA		ANGKARAN 2021 (Rp.)		REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN					
									FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%			
1	2		3		4		5		6	7=(6/5)	8	9	10=(9/5)				
	17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dan Luar Daerah dalam Provinsi	12	Bulan	Rp	408,275,000	0	Bulan	50.00%	Rp	189,433,336	Rp	186,843,962	45.00%		
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Luar Provinsi	12	Bulan			2	Bulan	50.00%							
			Jumlah Rapat	12	Kali			1	Kali	25.00%							
	V	Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp	540,178,350			38.89%	Rp	205,625,265	Rp	334,553,085	38.07%		
	Sub Kegiatan :																
	18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PMS meliputi Formulir Tata yang terlampir	12	Laporan	Rp	91,561,384	0	Laporan	50.00%	Rp	46,413,552	Rp	41,142,552	44.61%		
			19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terus dibayar	18	Rekening	Rp	175,115,500	18	Rekening	50.00%	Rp	47,036,929	Rp	128,078,571	26.86%
					20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Transportasi Karyawan	12	Bulan	Rp	271,501,246	0	Bulan	50.00%	Rp	112,174,294	Rp
	Jumlah Jasa Alat Reproduksi dan Bahan Pembersih	24	Jenis	0			Jenis	0.00%									
	Jumlah Jasa Gaji Pegawai	12	Jenis	0			Jenis	0.00%									
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp	128,187,100			43.52%	Rp	38,682,250	Rp	88,494,850	38.18%			
	Sub Kegiatan :																

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN	STRA PAGU ANGGARAN	%
1	2		3	4		5	6		7=5/61	8	9	10= 10/91
	21.	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, Pajak, dan Pengiran Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 yang Diperbaiki	8	Buah/ Tahun	Rp 50,030,000	5	Buah/ Tahun	55.56%	Rp 21,482,250	Rp 28,547,750	42.94%
			Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 yang Diperbaiki	4	Buah/ Tahun		4	Buah/ Tahun	100.00%			
	22.	Perawatan Peralatan dan Mesin Jernis	Jumlah Jernis Peralatan/Kerja yang Rusak/rota	20	Jernis	Rp 40,474,000	5	Jernis	25.00%	Rp 13,305,000	Rp 25,169,000	27.04%
	23.	Perawatan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jernis Bahan Batu Sanggah	18	Jernis	Rp 29,683,100	5	Jernis	27.78%	Rp 4,305,000	Rp 25,378,100	11.83%
II. PROGRAM REPEGAWAJAN DAERAH						Rp 4,476,103,570			54.87%	Rp 716,323,896	Rp 3,959,859,580	15.32%
VII	Kegiatan Pengisian, Pemeliharaan dan Informasi Repegawasan ASN					Rp 1,594,107,588			28.00%	Rp 187,346,796	Rp 1,406,760,790	11.75%
	Sub Kegiatan :											
	24.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengisian ASN	Jumlah Dokumen Formasi Kepegawaian	1	Dok	Rp 31,929,300	0	Dok	0.00%	Rp 5,472,900	Rp 26,456,400	17.15%
	25.	Koordinasi dan Fasilitas Pengisian ASN dan PPPK	Jumlah Penemuan Calon ASN	600	Orang	Rp 820,821,000	0	Orang	0.00%	Rp 64,760,900	Rp 759,035,000	7.80%
	26.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Kepegawaian	5	Aplikasi	Rp 677,262,138	5	Aplikasi	100.00%	Rp 79,605,236	Rp 597,446,900	11.78%
			Jumlah Dokumen Kepegawaian	4	Dok		2	Dok	50.00%			
	27.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Arsip Korwasional ASN	500	Arsip	Rp 61,085,100	185	Arsip	37.00%	Rp 17,252,700	Rp 23,832,400	60.98%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DAN DPA		TARGET KINERJA	ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISKAL			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%
1	2		3		4	5	6		7=10/7	8	9	10=10/8
	VIII	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				Rp. 737,974,380			54.88%	Rp. 339,223,700	Rp. 398,750,680	45.97%
		Sub Kegiatan :										
		18. Pengembangan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi ASN dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	600	Orang	Rp. 297,739,040	183	Orang	30.67%	Rp. 122,281,830	Rp. 175,455,140	41.87%
		Keluar dan Masuk Lingkup Pembuka Tanah Laut	30	Orang			26	Orang	86.67%			
		Akses Mutasi dan Promosi bagi ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	150	Orang			164	Orang	75.43%			
		21. Pengembangan Kualitas Pangkat ASN	Jumlah Surat Keputusan Pangkat Tertang Kenaikan Gaji Berkala	1500	Orang	Rp. 282,746,040	1,576	Orang	105.07%	Rp. 181,740,320	Rp. 91,005,940	67.80%
		Jumlah Surat Keputusan Pangkat Tertang Kenaikan Pangkat ASN	1200	Orang			102	Orang	26.67%			
		18. Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	8	Orang	Rp. 157,438,600	3	Orang	37.50%	Rp. 25,200,000	Rp. 132,238,600	34.51%
	IX	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				Rp. 2,088,474,740			28.74%	Rp. 181,274,800	Rp. 1,945,199,940	4.90%
		Sub Kegiatan :										
		11. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PMS yang Menyalahi Asesment	100	Orang	Rp. 888,474,810	17	Orang	17.00%	Rp. 13,299,000	Rp. 875,285,810	4.97%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLH OPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%
1	2		3	4		5	6	7	8=10/8	9	10	10=10/10
		10. Pengabdian Pendidikan Lapangan ASH	Jumlah ASH yang Menerima Bantuan Biaya Penyelenggaraan Ujian Orasi dan Ujian Keahlian Tingkat Penyelidikan (jumlah)	170	Orang	Rp 1.127.000.000	170	Orang	72.94%	Rp 68.065.800	Rp 1.129.934.110	8.87%
			Jumlah ASH yang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Penyelenggaraan Tugas Akta/Simpul/Teski/Orasi dsb)	0	Orang		0	Orang	0.00%			
	8	Regulasi Perilaku dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Rp 277.626.870			30.27%	Rp 88.478.700	Rp 189.148.170	31.67%
		Sub Regulasi :										
		11. Penilaian Disiplin ASH	Jumlah SK Monevian Disiplin	15	SK	Rp 277.626.870	0	SK	40.00%	Rp 88.478.700	Rp 189.148.170	31.67%
			Jumlah SK Tindak Penindakan	25	SK		5	SK	20.00%			
			Jumlah SK Pemutusan	250	SK		77	SK	30.80%			
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						Rp 3.166.360.000			33.33%	Rp 126.417.800	Rp 3.039.942.200	3.99%
III	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					Rp 3.166.360.000			33.33%	Rp 126.417.800	Rp 3.039.942.200	3.99%
	XI	Kegiatan Sertifikasi, Ketenagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				Rp 3.166.360.000			33.33%	Rp 126.417.800	Rp 3.039.942.200	3.99%
		Sub Kegiatan :										
		19. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kompetensi bagi Pimpinan Tingkat, Jabatan Fungsional, Keperguruan dan Penguasaan	Jumlah Peserta Didik Fungsional	10	Orang		0	Orang	0.00%			
			Jumlah Peserta Didik Teknis	75	Orang		0	Orang	0.00%			

No.	PROGRAM/ KEGIATAN			OUTPUT DLH DPA		TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI RUANGAN		
									FISIK/ KINERJA		%	RUANGAN		SISA PAGU ANGGARAN
1	2			3		4		5	6		7=100%	8	9	10=100%
				Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrasi	2	Orang		Rp 1.166.360.000	2	Orang	100.00%	Rp 126.417.900	Rp 3.039.942.360	3.99%
				Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS	173	Orang			0	Orang	0.00%			
				Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan regional Tk II	2	Orang			2	Orang	100.00%			
				Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan	40	Orang			0	Orang	0.00%			
								Rp 42.541.872.807			34.23%	Rp 6.260.934.406	Rp 33.250.948.431	21.84%

Pelihar, 01 Juli 2021

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tapak Laut





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jl. A. Syahrani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315

Pelaihari, 01 Oktober 2021

Kepada Yth.

Nomor : 900/ 1235 -Sekt/BKPSDM/X/2021
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi Capaian Kinerja
Triwulan III TA 2021

1. Sekretaris
 2. Kepala Bidang
 3. Kepala Sub Bidang
- BKPSDM Kabupaten Tanah
Laut

Di -

Tempat

Sehubungan dengan adanya surat dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13 / 2606 / Bappeda / IX /2021 tentang Permohonan Input E-Monev Triwulan III TA 2021, agar BKPSDM dapat menyampaikan data laporan kinerja realisasi fisik dan keuangan pada sistem e-monev (www.bappedatanahlaut-emonev9.com). Maka dengan Surat ini, Kami mengundang Bapak/Ibu agar berhadir pada:

Hari / Tanggal : Senin, 04 Oktober 2021
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Kepala Badan BKPSDM Kab. Tanah Laut
Acara : - Masukan dan Saran dalam pelaporan realisasi keuangan, realisasi kegiatan / proses, realisasi capaian output kegiatan dan sub kegiatan.
- Hal-hal lain yang dianggap penting.

Demikian disampaikan atas Perhatian dan Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia


Dr. H. Teguh Nur Effendi, M.Si
NIP. 19630808 198603 1 008

DAFTAR HADIR HAFAT

Mark P. Tanggaard · Senior, CM (March 2021)

Tweng Phuong Khanh NGUYEN, PhD, Thairat Lert

Publications: [Publications](#) | [Editorial Board](#)

Revised: November 2013; Canadian River to Trenches 01 Y.A. 2013.13

NO.	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Dr. R. Tegadjo Noto Effendi, M.Si	19600804 198402 1 009	Kepala Badan	1	
2	H. DARIYAMARTI, S.Pi	19761128 199603 1 003	Sekretaris	2	
3	PAJARI TRI ATHAJA, SH	19810131 200803 1 001	Kepala Bidang Hukum, Data, dan Informasi	3	
4	HENDRI GANYONG, S.E., M.A.P.	19700316 200604 1 001	Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	4	
5	RYTERPANTJ, L.Sw	19790406 200403 2 025	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan	5	
6	MOOR HIDAYAT, A.Md	19831201 200303 2 007	Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian	6	
7	ALMUMANTYAH, S.Kom	19760917 200803 1 002	Kepala Sub Bidang Materi dan Pengabdian	7	
8	IDA MUKATISARI, SH	19800527 200903 2 006	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Logistik, dan Pengabdian Aparatur	8	
9	ANGRI SETIAWAN, S. Kom	19850803 200903 1 005	Kepala Sub Bidang Humas dan Informasi	9	
10	RIEP NUTUL, S.A.P	19860316 200303 1 000	Kepala Sub Bidang Etik dan Aparatur	10	
11	IRIAN LUTIF, A.Md	19850203 200903 1 004	Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan	11	
12	ASRIATUN HANANAH, A.Md	19751212 200903 2 006	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kelembagaan dan Fasilitas Pejabat Aparatur	12	
13	LELI DAMAYANTI, S.A.	19840110 200903 2 009	Pejabat Program Anggaran dan Pelaporan	13	

Practical Issues



1999

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Laporan Hasil Rapat

Kepada Yth : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut
Hari dan Tanggal : Senin, 04 Oktober 2021
Perihal : Hasil Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Triwulan III TA 2021

Rapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di ruang Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut yang dihadiri oleh Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang, Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Staf Perencanaan dengan hasil Rapat:

1. Pagu Keluaran BKPSDM sebesar **Rp. 42.541.872.837,00,-** pada triwulan 3 Tahun Anggaran 2021 telah terserap sebesar **Rp. 14.134.584.472,00,-** dengan persentase **33,23%** dengan capaian masing-masing program sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan pagu sebesar **Rp. 34.699.329.201,00,-** telah terserap sebesar **Rp. 12.739.223.622,00,-** dengan persentase **36,71%.**
 - b. Program Kepegawaian Daerah dengan pagu sebesar **Rp. 4.676.183.576,00,-** telah terserap sebesar **Rp. 1.094.068.750,00,-** dengan persentase **23,40%.**
 - c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pagu sebesar **Rp. 3.166.360.060,00,-** telah terserap sebesar **Rp. 301.292.700,00,-** dengan persentase **9,52%.**
2. Bidang Sekretariat pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Triwulan 3 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLH DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	0	Dok	1,792,500
		Jumlah Dokumen Renja	1	Dok	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1	Dok	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	Dok	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1	Dok	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	0	Dok	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP, LKPI/LPPD, dan LKPD/CALK	3	Dok	4,920,600
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event	0	Event	-

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS BKPSDM	9	Bulan	11,755,352,132
		Jumlah Calon PNS	9	Bulan	
		Jumlah PPPK	9	Bulan	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengupian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Verifikasi	1	Verifikasi	527,300
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bendahara		Dok	6,242,100

3. Bidang Sekretariat pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Triwulan 3 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					
Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Tradisional	49	Setel	
Kegiatan Umum Perangkat Daerah					
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat Listrik dan Elektronik	10	Jenis	5,859,500
3	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	Jenis	288,290,946
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	2	Jenis	-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Dokumen yang dicetak	6	Jenis	16,657,400
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Surat Kabar Harian	27	Eks	2,500,000
7	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dan Luar Daerah dalam Provinsi	9	Bulan	258,111,957
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Luar Provinsi	9	Bulan	
		Jumlah Rapat	3	Kali	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PNS lingkup Pemkab Tala yang terlayani	9	Laporan	69,794,088
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang harus dibayar	27	Rekening	81,583,841
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Transaksi Keuangan	9	Bulan	182,212,058

		Jumlah Jenis Alat Kecersuhan dan Bahan Pembersih	15	Jenis	
		Jumlah Jenis Bibit Tanaman	2	Jenis	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertanian Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 yang Dipelihara	9	Buah/ Tahun	33,513,600
		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 yang Dipelihara	4	Buah/ Tahun	
12	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Perlatan/Kerja yang dipelihara	6	Jenis	14,855,000
13	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Bahan Baku Bangunan	16	Jenis	16,910,000

4. Bidang Mutasi, Data, dan Informasi pada Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Triwulan 3 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut;

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLH DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN					
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi ASN dalam Jabatan Pokoksana dan Jabatan Fungsional	214	Orang	175,933,600
		Jumlah Mutasi ASN Keluar dan Masuk Lingkup Pemkab Tanah Laut	29	Orang	
		Jumlah Mutasi dan Promosi bagi ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	360	Orang	
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Gaji Berkala	1,775	Orang	271,197,000
		Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Pangkat ASN	740	Orang	
3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	2	Orang	27,945,000

5. Bidang Mutasi, Data, dan Informasi pada Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin, dan Penghargaan Aparatur pada Triwulan 3 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
1	Pemberian Disiplin ASN	Jumlah SK Hukuman Disiplin	7	SK	146,703,700
		Jumlah SK Lim Pensiunan	10	SK	
		Jumlah SK Pensiun	112	SK	

6. Bidang Mutasi, Data, dan Informasi pada Sub Bidang Data dan Informasi pada Triwulan 3 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Kepegawaian	5	Aplikasi	121,690,500
		Jumlah Dokumen Kepegawaian	3	Dok	
2	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Anap Korvensional ASN	243	Anap	44,189,100

7. Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur pada Sub Bidang Diklat Aparatur pada Triwulan 3 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta Diklat Fungsional	2	Orang	301,292,700
		Jumlah Peserta Diklat Teknis	0	Orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2	Orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS	120	Orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan nasional Tk II	2	Orang	

		Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pegawai	0	Orang	
--	--	---	---	-------	--

8. Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur pada Sub Bidang Formasi dan Pengadaan pada Triwulan 3 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLH DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi Kepegawaian	1	Dok	1,947,900
2	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah Penerimaan Calon ASN	550	Orang	193,674,560

9. Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur pada Sub Bidang Perencanaan Karier dan Fasilitas Profesi Aparatur pada Triwulan 3 Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLH DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN					
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Assessment	17	Orang	34,532,000
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Penyertaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat/ Penyesuaian Gaji	124	Orang	70,055,300
		Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi	0	Orang	

10. Kepala BKPSDM meminta data identifikasi kegiatan yang dapat direalisasi dan kegiatan yang tidak memungkinkan untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2021 dari para pejabat pelaksana teknis kegiatan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian nilai anggaran dan indikator untuk diajukan pada perubahan anggaran tahun 2021.

11. Kepala BKPSDM menegaskan untuk meningkatkan realisasi kegiatan atau kinerja fisik mengingat sudah memasuki triwulan 4 atau triwulan terakhir dalam tahun anggaran 2021.

Demikian Laporan hasil ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Selanjutnya

Notulen,



Eterhen L. S. Sos

NIP. 19790406 200801 2 025

Foto Kegiatan Rapat

Rapat : Koordinasi Capaian Kinerja Triwulan III TA 2021

Hari / Tanggal : Senin, 04 Oktober 2021



CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III (JANUARI S/D SEPTEMBER)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLH DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			
					FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN	SISA PASU ANGGARAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
KEPEGAWAIAN				Rp 39,375,513,777			83.30%	Rp 13,833,391,773	Rp 29,542,321,808	75.13%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Rp 34,696,320,381			71.84%	Rp 11,739,333,032	Rp 21,860,100,179	34.71%	
	I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 46,000,350			64.39%	Rp 6,713,100	Rp 39,287,250	14.59%	
	Sub Kegiatan :										
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana	1	Dok	Rp 4,546,200	0	Dok	0.00%	Rp 1,792,500	Rp 1,792,100	39.43%
		Jumlah Dokumen Rangka	1	Dok		1	Dok	100.00%			
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1	Dok	Rp 2,669,700	1	Dok	100.00%	Rp -	Rp 2,669,700	0.00%
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	Dok	Rp 2,783,100	1	Dok	100.00%	Rp -	Rp 2,783,100	0.00%
	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1	Dok	Rp 2,500,000	1	Dok	100.00%	Rp -	Rp 2,500,000	0.00%
	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1	Dok	Rp 2,500,000	0	Dok	0.00%	Rp -	Rp 2,500,000	0.00%
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laku LUP/LUPD, dan LUPD/GALF	3	Dok	Rp 5,977,150	3	Dok	100.00%	Rp 4,920,600	Rp 1,056,550	82.32%
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event	2	Event	Rp 24,994,200	0	Event	0.00%	Rp -	Rp 24,994,200	0.00%
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 32,897,170,872			66.67%	Rp 11,762,211,832	Rp 21,134,949,348	25.75%	
	Sub Kegiatan :										
	8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS BOPD/BN	35	Orang		8	Bulan	75.00%			

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KEMERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KEMERJA		%	KEUANGAN	SSA PAGU ANGGARAN	%
1	2		3	4		5	6		7 (R/%)	8	9	10 (R/%)
			Jumlah Grib PMS	172	Orang	Rp 32,853,894,387	9	Bulan	75.00%	Rp 11,755,352,132	Rp 21,128,542,250	35.79%
			Jumlah PPK	58	Orang		9	Bulan	75.00%			
	9.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SDPD	Jumlah Verifikasi	2	Verifikasi	Rp 3,515,500	1	Verifikasi	50.00%	Rp 627,300	Rp 3,188,200	18.44%
	10.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SDPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bendahara	1	Dok	Rp 9,455,990		Dok	75.00%	Rp 6,242,100	Rp 3,217,890	85.98%
	III Kegiatan Kepegawaian Peningkat Daerah					Rp 19,873,500			100.00%	Rp -	Rp 19,873,500	0.00%
	11	Pengadaan Pakuan Dinas Berupa Asortim Kelengkapan alat	Jumlah Pengadaan Pakuan Tradisional	46	Staf	Rp 19,873,500	46	Staf	100.00%	Rp -	Rp 19,873,500	0.00%
IV Kegiatan Umum - Peningkat Daerah						Rp 1,068,119,839			80.48%	Rp 871,418,802	Rp 496,889,236	83.89%
Sub Kegiatan I												
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peningkatan Bangunan Kantor		Jumlah Jenis alat Listrik dan Elektronik	14	Jenis	Rp 9,071,810	10	Jenis	71.43%	Rp 5,859,500	Rp 1,212,310	64.59%
13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23	Jenis	Rp 607,385,439	25	Jenis	85.22%	Rp 288,290,946	Rp 121,095,493	47.46%
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	3	Jenis	Rp 1,892,540	2	Jenis	66.67%	Rp -	Rp 1,892,540	0.00%
15.	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan		Jumlah Jenis Dokumen yang dicetak	23	Jenis	Rp 36,027,540	6	Jenis	26.09%	Rp 16,657,400	Rp 21,370,140	43.80%
16.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		Jumlah Surat Kabar harian	35	Dia	Rp 1,465,600	27	Eks	75.00%	Rp 2,500,000	Rp 965,600	72.14%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA		TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)		REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
									FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%
											TARGET			100 / 85 %
	17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMD	Jumlah Perijinan Dinas dalam Kabupaten dan Luar Daerah dalam Provinsi	12	Bulan	Rp 436,375.000			9	Bulan	75.00%	Rp 258.111.907	Rp 148.163.043	61.53%
			Jumlah Perijinan Dinas Luar Daerah dan Luar Provinsi	12	Bulan				9	Bulan	75.00%			
			Jumlah Rapat	12	Kal				2	Kal	25.00%			
	V	Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 540.176.360					65.58%	Rp 333.689.067	Rp 206.588.363	61.78%
		Sub Kegiatan :												
	18.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PIRJ Insipir Pemkab Tala yang terlayani	12	Laporan	Rp 93.561.104			9	Laporan	75.00%	Rp 66.794.088	Rp 21.767.318	74.60%
	19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang harus dibayar	26	Rekening	Rp 175.115.500			27	Rekening	75.00%	Rp 81.585.841	Rp 63.531.609	66.99%
	20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Transaksi Keuangan	12	Bulan	Rp 271.501.746			9	Bulan	75.00%	Rp 182.212.000	Rp 89.289.688	67.11%
			Jumlah Jasa Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	23	Jenis				15	Jenis	65.22%			
			Jumlah Jasa Biot Tanaman	12	Jenis				0	Jenis	0.00%			
	VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 138.187.108					73.94%	Rp 85.376.600	Rp 63.906.500	80.82%
		Sub Kegiatan :												
	21.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Personil Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 yang Operasional	9	Buat/ Tahun	Rp 50.000.000			9	Buat/ Tahun	100.00%	Rp 33.113.600	Rp 16.516.400	66.99%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN			OUTPUT DLM OPA		TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)			REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
											FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%
													Ta/2021			100/2021
				Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 yang Dijelajah	4	Bulan/ Tahun				4	Bulan/ Tahun	100.00%				
		22.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Peralatan/Yang yang diuji/tersa	20	Jenis	Rp	48.474,000	8	Jenis	35.00%		Rp 14,255,000	Rp 33,619,000	36.65%	
		23.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Bahan Baku Bangunan	28	Jenis	Rp	29,683,100	15	Jenis	88.89%		Rp 16,910,000	Rp 12,773,100	56.97%	
II	PROGRAM KEPESAWATAN DAERAH							Rp 4,676,183,678				54.94%	Rp 1,894,868,750	Rp 1,582,114,838	23.48%	
	VII	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						Rp 1,884,167,588				81.94%	Rp 367,702,180	Rp 1,226,465,408	23.07%	
		Sub Kegiatan :														
		24.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi Kepegawaian	1	Dok	Rp	31,919,300	1	Dok	100.00%		Rp 7,947,900	Rp 23,971,300	34.50%	
		25.	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah Penerimaan Calon ASN	500	Orang	Rp	829,621,000	550	Orang	61.67%		Rp 193,874,560	Rp 629,946,440	23.53%	
		26.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Kepegawaian	5	Aplikasi	Rp	677,282,136	1	Aplikasi	100.00%	Rp	121,680,590	Rp 555,591,546	17.97%	
				Jumlah Dokumen Kepegawaian	4	Dok			3	Dok	75.00%					
		27.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Anso Konvensional ASN	500	Anso	Rp	81,085,200	243	Anso	48.60%		Rp 44,189,100	Rp 15,896,100	72.34%	
	VIII	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN						Rp 737,974,380				67.27%	Rp 476,075,600	Rp 261,898,700	64.38%	
		Sub Kegiatan :														
		28.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi ASN dalam Jabatan Pokoknya dan Jabatan Fungsional	600	Orang			214	Orang	35.67%					

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%
1	2		3	4		5	6		7a(5b)	8	9	10a(10b)
			Jumlah Mutasi ASN Keluar dan Masuk Lingkup Perangkat Daerah	30	Orang	Rp 297.739.740	29	Orang	96,67%	Rp 175.933.600	Rp 121.806.140	69,05%
			Jumlah Mutasi dan Promosi ke/ dari ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Pengawasan	350	Orang		360	Orang	102,86%			
	29.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kinerja Gaj. Berkala	1300	Orang	Rp 382.766.040	1.775	Orang	136,53%	Rp 271.187.000	Rp 11.399.040	95,90%
			Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kinerja Pegawai ASN	1300	Orang		742	Orang	61,83%			
	30.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	6	Orang	Rp 157.458.600	2	Orang	33,33%	Rp 17.945.000	Rp 120.493.600	17,75%
	IX Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN					Rp 2.066.674.740			26,74%	Rp 104.587.360	Rp 1.061.887.440	5,08%
	Sub Kegiatan :											
	31.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Asesment	150	Orang	Rp 688.474.800	17	Orang	11,33%	Rp 34.532.000	Rp 633.942.800	9,17%
	32.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang menerima Bantuan Biaya Penyelenggaraan Ujian Cincin dan Ujian Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	170	Orang	Rp 1.377.000.000	124	Orang	72,94%	Rp 70.000.000	Rp 1.307.000.000	9,44%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN			OUTPUT DLM DPA	TARGET KEMERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			
								FISIK/ KEMERJA		%	KEUANGAN	SISA PADU ANGGARAN	%	
										TOTAL			100 = 100%	
				Jumlah ASN yang Melakukan Bantuan Daya Pendidikan Tugas Belajar dan Menyusun Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi	9	Orang		9	Orang	0.00%				
	2	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Rp 277,626,870			43.82%	Rp 146,703,700	Rp 139,823,170	50.84%	
		Sub Kegiatan :												
		11.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah SK Hukuman Disiplin	15	SK	Rp 277,626,870	7	SK	46.67%	Rp 146,703,700	Rp 139,823,170	50.84%	
				Jumlah SK Idn Pengolahan	25	SK		10	SK	40.00%				
			Jumlah SK Perskun	250	SK	112		SK	44.80%					
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							Rp 3,166,360,000			48.29%	Rp 301,292,700	Rp 3,865,067,300	9.52%	
III	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia						Rp 3,166,360,000			48.29%	Rp 301,292,700	Rp 3,865,067,300	9.52%	
	XI	Kegiatan Sertifikasi, Kembangagan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					Rp 3,166,360,000			48.29%	Rp 301,292,700	Rp 3,865,067,300	9.52%	
		Sub Kegiatan :												
		34.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pemrnat. Tinggl. Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Projabolan	Jumlah Peserta Diklat Fungsional	10	Orang	Rp 3,166,360,000	2	Orang	20.00%	Rp 301,292,700	Rp 3,865,067,300	9.52%	
				Jumlah Peserta Diklat Teknis	15	Orang		0	Orang	0.00%				
				Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2	Orang		2	Orang	100.00%				
			Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS	172	Orang	120		Orang	69.77%					

No.	PROGRAM/ KEGIATAN			OUTPUT DLH DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
								FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN	ESK PADU ANGGARAN	%
										74,112%			124,137%
				Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan nasional Tk II	2	Orang		2	Orang	100.00%			
				Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	40	Orang		0	Orang	0.00%			
							Rp 42,541,871,837			88.86%	Rp 14,134,584,472	Rp 28,407,288,365	33.33%

Pekanbaru, 01 Oktober 2021
 Kepala Badan Kepegawaian dan
 Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Kabupaten Tanah Laut


 Drs. H. Teguh Nur Effendi, M.Si
 NIP. 19400408 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jl. A.Syamsi Pelahhari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21115

Pelahhari, 31 Desember 2021

Kepada Yth.

Nomor : 900/1480-Sekret/BKPSDM/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi Capaian Kinerja
Triwulan IV TA 2021

1. Sekretaris
 2. Kepala Bidang
 3. Kepala Sub Bidang
- BKPSDM Kabupaten Tanah
Laut

Di -

Tempat

Sehubungan dengan adanya surat dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor: 900/3879/Bappeda tentang Permohonan Input E-Monev Triwulan IV TA 2021, agar BKPSDM dapat menyampaikan data laporan kinerja realisasi fisik dan keuangan pada sistem e-monev (www.bappedatanahlaut.ettmonev1.com). Maka dengan Surat ini, Kami mengundang Bapak/Ibu agar berhadir pada:

Hari / Tanggal : Senin, 03 Januari 2022
Pukul : 09.30 Wita
Tempat : Ruang Kepala Badan BKPSDM Kab. Tanah Laut
Acara : - Masukan dan Saran dalam pelaporan realisasi keuangan, realisasi kegiatan / proses, realisasi capaian output kegiatan dan sub kegiatan.
- Hal-hal lain yang dianggap penting.

Demikian disampaikan atas Perhatian dan Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut,


Dr. H. Tajudin Effendi, M.Si
NIP. 19630808 198602 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Adipati, Pabelan 70000 Telp. (0511) 210000 Fax (0511) 210001

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Senin, 03 Januari 2022

Tempat : Ruang Kepala BKPPSDM Kab. Tanah Laut

Waktu : 09.30 WIB

Agenda : Koordinasi Capaian Kinerja Triwulan IV TA 2021

NO.	NAMA	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Drs. H. Tajudin Hoss KSEwal, M.Si	195100011990031001	Kepala Badan		
2.	ELIANTO YAMANI, S.P.	197611281996031001	Sebelumnya		
3.	FAJAR TRI ATMAIA, SH	199101011980031001	Kepala Bidang Mutasi, Data, dan Informasi		
4.	BENEDIKTYUS, SE, M.A.P.	197507141990041001	Kepala Bidang Pengembangan dan Peningkatan Aparatur		
5.	PETERYANI, S.Su	197906061980012001	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan		
6.	WIDHI HENDAN, A.Md	198311051995012001	Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian		
7.	ALMIRANISYAH, S.Su	197509171980031001	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepegawaian		
8.	IRA HURBAJAHAY, SH	198808271989032001	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Statistik, dan Penghargaan Aparatur		
9.	ARDHI SETIAWAN, S. Su	198508151989031001	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi		
10.	ANDI HERTI, S.A.P	198803161985031001	Kepala Sub Bidang Ekstet Aparatur		
11.	IRFAN LUTHFI, A.Md	198508031989031001	Kepala Sub Bidang Peningkatan dan Peningkatan		
12.	ADWATIN HASANAH, A.Md	197911121989032001	Kepala Sub Bidang Peningkatan Karier dan Peningkatan Peningkatan Aparatur		
13.	LILIS DAMAYANTI, S.Su	198601101987032001	Pemilihan Program Anggaran dan Pelaksana		

Pembina Staf:



Atm. Indarapandi, S.Su

NIP. 199601101987032001

Laporan Hasil Rapat

Kepada Yth : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut
Hari dan Tanggal : Senin, 03 Januari 2022
Perihal : Hasil Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Triwulan IV TA 2021

Rapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 di ruang Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut yang dihadiri oleh Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub-Bagian / Kepala Sub Bidang, Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Staf Perencanaan dengan hasil Rapat:

1. Pagu Keseluruhan BKPSDM setelah perubahan anggaran sebesar **Rp. 41.939.609.677,00,-** pada triwulan 4 atau Tahun Anggaran 2021 telah terserap sebesar **Rp. 21.352.818.435,00,-** dengan persentase **50,91%** dengan capaian masing-masing program sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan pagu sebesar **Rp. 34.694.049.201,00,-** telah terserap sebesar **Rp. 17.630.772.397,00,-** dengan persentase **50,82%.**
 - b. Program Kepegawaian Daerah dengan pagu sebesar **Rp. 4.581.321.896,00,-** telah terserap sebesar **Rp. 2.443.869.738,00,-** dengan persentase **53,58%.**
 - c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pagu sebesar **Rp. 2.684.238.580,00,-** telah terserap sebesar **Rp. 1.278.176.300,00,-** dengan persentase **47,62%.**
2. Bidang Sekretariat pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	1	Dok	2,508,100
		Jumlah Dokumen Renja	1	Dok	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1	Dok	2,269,400
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	Dok	2,414,400
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1	Dok	1,981,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1	Dok	2,223,500
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP, LKPI/LPPD, dan LKPD/CALK	1	Dok	4,920,600

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event	1	Event	5,500,000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS SKPSDM	12	Bulan	16,092,347,054
		Jumlah Calon PNS	12	Bulan	
		Jumlah PPPK	12	Bulan	
9	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Verifikasi	2	Verifikasi	1,927,200
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Berdahara	1	Dok	9,238,700

3. Bidang Sekretariat pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					
Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakelan Tradisional	40	Stok	19,673,500
Kegiatan Umum Perangkat Daerah					
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat Listrik dan Elektronik	14	Jenis	6,304,500
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22	Jenis	503,242,386
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	3	Jenis	3,580,000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Dokumen yang dicetak	23	Jenis	32,164,100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Surat Kabar Harian	36	Eks	3,420,000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dan Luar Daerah dalam Pmttd	12	Bulan	363,503,988
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Luar Provinsi	12	Bulan	
		Jumlah Rapat	3	Kali	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PNS lingkup Pemkab Tala yang terlayani	12	Laporan	93,199,184
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang harus dibayar	36	Rekening	128,650,219

10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Transaksi Keuangan	12	Bulan	346,557,816
		Jumlah Jenis Asat Kebersihan dan Bahan Pembersih	23	Jenis	
		Jumlah Jenis Bibit Tanaman	12	Jenis	
Kegiatan Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertijuan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 yang Dipelihara	9	Buah/ Tahun	44,716,750
		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 yang Dipelihara	4	Buah/ Tahun	
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Peralatan/Kerja yang dipelihara	16	Jenis	36,325,000
13	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Bahan Baku Bangunan	18	Jenis	22,065,000

4. Bidang Mutasi, Data, dan Informasi pada Sub Bidang Mutasi dan Kepengkatan pada Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN					
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi ASN dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	214	Orang	226,133,600
		Jumlah Mutasi ASN Kekur dan Masuk Lingkup Pemkab Tanah Laut	33	Orang	
		Jumlah Mutasi dan Promosi bagi ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	571	Orang	
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Gaji Berkala	1,832	Orang	271,197,000
		Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Pangkat ASN	742	Orang	
3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	5	Orang	73,245,000

5. Bidang Mutasi, Data, dan Informasi pada Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin, dan Penghargaan Aparatur pada Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Pelatihan dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
1	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah SK Hukuman Disiplin	8	SK	206,603,700
		Jumlah SK Ltn Percepatan	16	SK	
		Jumlah SK Pensiun	142	SK	

6. Bidang Mutasi, Data, dan Informasi pada Sub Bidang Data dan Informasi pada Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Kepegawaian	5	Aplikasi	491,566,344
		Jumlah Dokumen Kepegawaian	4	Dok	
2	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Anisip Konvensional ASN	500	Anisip	44,189,100

7. Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur pada Sub Bidang Diklat Aparatur pada Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS	172	Orang	1,278,176,300
		Jumlah Peserta Pelatihan Kogawat Derustan	25	Orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2	Orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	2	Orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	0	Orang	

	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Guru	40	Orang	
	Jumlah Peserta Penyertaan Diklat Teknis / Fungsional	48	Orang	

8. Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur pada Sub Bidang Formasi dan Pengadaan pada Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FESDK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi Kepegawaian	1	Dok	14,297,900
2	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah Penerimaan Calon ASN	550	Orang	406,199,560

9. Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur pada Sub Bidang Perencanaan Karier dan Fasilitas Profesi Aparatur pada Tahun Anggaran 2021 memiliki capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

SUB KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	REALISASI FESDK		REALISASI KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN					
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Assessment	150	Orang	518,505,134
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Penyertaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat/ Penyesuaian Gaji	124	Orang	189,802,200
		Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan: Tugas Belajar dan Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi	0	Orang	

10. Kepala BKPSDM mengarahkan agar para pejabat pelaksana teknis kegiatan membuat laporan mengenai bukti-bukti data maupun fisik atas pencapaian kinerja di tahun anggaran 2021 serta laporan mengenai sebab kegiatan tidak tercapai sesuai target atau tidak terlaksana di tahun anggaran 2021.

11. Kepala BKPSDM menegaskan agar para pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk mempersiapkan laporan terkait kegiatan di tahun anggaran 2021 demi kelancaran pelaporan kinerja BKPSDM tahun anggaran 2021.

Demikian laporan hasil ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan selanjutnya.

Notulen,



Eriyanti, S.Sos

NIP. 19790406 200801 2 025

Foto Kegiatan Rapat

Rapat : Koordinasi Capaian Kinerja Triwulan IV TA 2021

Hari / Tanggal : Senin, 03 Januari 2022



CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV (JANUARI - DESEMBER)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA		TARGET KINERJA	ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI RUANGAN		
							FISIK/ KINERJA		%	RUANGAN		%
1	1		1		1	1	7=0541		1	10=7835		
KEPEGAWAIAN						Rp 28,255,371,087		93.15%	Rp 25,874,842,135	Rp 19,180,725,862	51.14%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					Rp 34,884,049,323		98.87%	Rp 17,430,772,397	Rp 17,443,278,864	98.82%	
I	I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp 42,528,350		100.00%	Rp 22,817,008	Rp 20,793,350	51.51%	
	Sub Kegiatan :											
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana	1	Dok	Rp 2,746,200	1	Dok	100.00%	Rp 2,508,100	Rp 236,100	91.32%
			Jumlah Dokumen Renja	1	Dok		100.00%					
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1	Dok	Rp 2,504,700	1	Dok	100.00%	Rp 2,268,400	Rp 235,300	90.51%
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	Dok	Rp 2,588,100	1	Dok	100.00%	Rp 2,414,400	Rp 173,700	93.29%
	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1	Dok	Rp 2,300,000	1	Dok	100.00%	Rp 1,980,000	Rp 320,000	85.94%
	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1	Dok	Rp 2,300,000	1	Dok	100.00%	Rp 2,222,500	Rp 81,500	96.46%
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAPK, LKPA/LPAC, dan LKPD/CALK	3	Dok	Rp 5,077,150	3	Dok	100.00%	Rp 4,920,800	Rp 156,350	96.92%
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event	2	Event	Rp 24,994,200	1	Event	100.00%	Rp 5,500,000	Rp 19,494,200	22.01%
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp 32,885,370,873		100.00%	Rp 14,103,512,854	Rp 14,791,857,818	48.59%	
	Sub Kegiatan :											
			Jumlah PNS BKPSDM	35	Orang		12	Bulan	100.00%			

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%
1	2		3	4		5	6		7=5/30	8		9=7/30
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Calon PNS	171	Orang	Rp 31.893,894,363	12	Bulan	100.00%	Rp 16,592,347,094	Rp 16,791,547,329	49.94%
			Jumlah PPPK	18	Orang		12	Bulan	100.00%			
	9	Penaksanaan Perubahan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SAPD	Jumlah Verifikasi	2	Verifikasi	Rp 2,016,500	2	Verifikasi	100.00%	Rp 1,927,200	Rp 89,300	95.57%
	10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SAPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bendahara	1	Dok	Rp 9,409,990	1	Dok	100.00%	Rp 9,285,700	Rp 224,290	97.66%
III	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah					Rp 19,673,500			100.00%	Rp 19,673,500	Rp -	100.00%
	11	Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Akibat Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Tradisional	49	Serif	Rp 19,673,500	49	Serif	100.00%	Rp 19,673,500	Rp -	100.00%
IV	Kegiatan Umum Perangkat Daerah					Rp 1,568,119,829			95.11%	Rp 814,214,974	Rp 153,904,055	85.99%
Sub Kegiatan :												
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat Listrik dan Elektronik	14	Jenis	Rp 9,071,810	14	Jenis	100.00%	Rp 8,304,500	Rp 767,310	91.94%
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23	Jenis	Rp 607,386,439	22	Jenis	95.65%	Rp 503,242,386	Rp 104,144,053	82.80%
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	3	Jenis	Rp 3,892,640	3	Jenis	100.00%	Rp 3,580,000	Rp 312,640	91.97%
	15	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Jenis Dokumen yang dicetak	23	Jenis	Rp 38,627,940	23	Jenis	100.00%	Rp 32,184,100	Rp 6,443,840	94.50%
	16	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundagian - undangan	Jumlah Surat Kabar Harian	36	Dok	Rp 3,403,600	36	Dok	100.00%	Rp 3,420,000	Rp 45,200	98.60%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN			OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
								FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%
1	2			3	4		5	6	7/2023	8	9	10/ 2023	
	17.	Peningkatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SORC	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dan Luar Daerah dalam Provinsi	12	Bulan	Rp 406,275,000	12	Bulan	100.00%	Rp 363,903,969	Rp 42,771,312	89.47%	
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Luar Provinsi	12	Bulan		12	Bulan	100.00%				
			Jumlah Rapat	12	Kali		1	Kali	25.00%				
	V	Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 540,178,330			100.00%	Rp 468,447,219	Rp 71,731,111	86.72%
		Sub Kegiatan I											
	18.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PHL Inklusif Pemasok Tala yang terakreditasi	12	Laporan	Rp 93,561,104	12	Laporan	100.00%	Rp 93,109,184	Rp 361,939	99.61%	
	19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang telah dibayar	36	Rekening	Rp 175,115,500	36	Rekening	100.00%	Rp 126,800,219	Rp 48,315,281	73.47%	
	20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Transaksi Keuangan	12	Bulan	Rp 271,501,746	12	Bulan	100.00%	Rp 246,997,816	Rp 24,503,930	90.60%	
			Jumlah Jenis Alat Ketersediaan dan Bahan Pemasok	23	Jenis		23	Jenis	100.00%				
			Jumlah Jenis Biotek Tahanan	12	Jenis		12	Jenis	100.00%				
VI	Kegiatan Pemeliharaan Sarang MERN Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 138,187,100			93.33%	Rp 103,106,750	Rp 35,080,350	80.43%	
	Sub Kegiatan I												
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pagar, dan	Jumlah Kondansi Dinas/ Operasional Roda 2 yang Diselenggara	9	Bulan/ Tahun	Rp 50,000,000	9	Bulan/ Tahun	100.00%	Rp 44,716,750	Rp 5,283,250	89.43%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%
1	2		3	4		5	6		7=5/3	8		9=8/3
		21	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 yang Dipelihara	4	Buah/ Tahun	4	Buah/ Tahun	100.00%			
		22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Peralatan/Kerja yang dipelihara	20	Jenis	10	Jenis	50.00%	Rp 38,321,000	Rp 12,148,000	31.94%
		23	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Bahan Baku Bangunan	18	Jenis	18	Jenis	100.00%	Rp 22,065,000	Rp 7,618,100	34.54%
DI	PROGRAM KEPENGAWAJAN DAERAH					Rp 4,561,321,898			88.13%	Rp 2,443,868,728	Rp 2,117,483,138	83.88%
	VII	Registasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				Rp 1,338,838,588			100.00%	Rp 988,382,964	Rp 600,303,663	61.48%
		Sub Registasi :										
		24	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi Kepegawaian	1	Dok	1	Dok	100.00%	Rp 14,267,900	Rp 17,621,300	44.79%
		25	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan ASN dan PRPN	Jumlah Penertmaan Calon ASN	600	Orang	300	Orang	100.00%	Rp 408,099,560	Rp 413,227,460	49.68%
		26	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Kepegawaian	5	Aplikasi	5	Aplikasi	100.00%	Rp 491,368,344	Rp 152,610,793	76.33%
				Jumlah Dokumen Kepegawaian	4	Dok	4	Dok	100.00%			
		27	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Arsip Rutin/korupsi ASN	500	Arsip	500	Arsip	100.00%	Rp 44,086,108	Rp 16,896,108	72.34%
	VIII	Registasi Mutasi dan Promosi ASN				Rp 737,974,380			100.00%	Rp 570,575,680	Rp 167,398,780	77.33%
		Sub Registasi :										
				Jumlah Mutasi ASN dalam Jabatan Pokoknya dan Jabatan Fungsional	600	Orang	214	Orang	35.67%			

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DUM DIPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI PTSPK			REALISASI KEUANGAN		
							PTSPK/ KINERJA	%		KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%
	28	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi ASN Rekrut dan Hasil Lingkup Kominfo Tanah Laut	30	Orang	Rp. 289,139,740	33	Orang	110.00%	Rp. 226,523,600	Rp. 63,256,140	78.36%
			Jumlah Mutasi dan Promosi bagi ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	338	Orang		371	Orang	163.34%			
	29	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Surat Keputusan Supad Tentang Kenaikan Gaji Bertahap	1500	Orang	Rp. 262,796,040	1,832	Orang	122.13%	Rp. 271,097,000	Rp. 11,699,040	95.90%
			Jumlah Surat Keputusan Supad Tentang Kenaikan Pangkat ASN	700	Orang		740	Orang	106.00%			
	30	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	5	Orang	Rp. 165,839,000	5	Orang	100.00%	Rp. 73,245,000	Rp. 92,594,000	44.17%
IX		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				Rp. 1,691,819,000			74.60%	Rp. 706,487,534	Rp. 1,383,511,526	35.56%
		Sub Kegiatan :										
	31	Peningkatan Kapasitas Kerja ASN	Jumlah PKC yang Mengikuti Rakeraker	150	Orang	Rp. 999,038,850	150	Orang	100.00%	Rp. 518,695,334	Rp. 480,431,516	51.91%
	32	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Menemuka Bantuan Biaya Penyelenggaraan Ujian dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyelidikan dan	126	Orang	Rp. 742,680,210	124	Orang	98.41%	Rp. 189,802,300	Rp. 603,078,010	65.17%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN			OUTPUT DLM DPA		TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
									FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN	SISA PASU ANGGARAN	%
1	2			3		4		5	6		7 (5/6)*100%	8	9	10 (8/9)*100%
				Jumlah ASN yang menerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi		2	Orang		0	Orang	0.00%			
		X	Kegiatan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Rp. 272,766,870			72.17%	Rp. 306,603,700	Rp. 66,186,170	75.74%
			Sub Kegiatan :											
		25	Pendidikan Dalam ASN	Jumlah SK Hukuman Disiplin	15	SK		Rp. 272,766,870	8	SK	53.33%	Rp. 306,603,700	Rp. 66,186,170	75.74%
				Jumlah SK Istimewa Pensiun	13	SK			16	SK	126.87%			
				Jumlah SK Pensiun	250	SK			142	SK	56.80%			
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								Rp. 2,694,136,580			85.12%	Rp. 1,278,176,300	Rp. 1,406,063,280	47.82%
III.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia							Rp. 2,694,136,580			85.12%	Rp. 1,278,176,300	Rp. 1,406,063,280	47.82%
		X2	Kegiatan Sertifikasi, Ketenagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					Rp. 2,694,136,580			85.12%	Rp. 1,278,176,300	Rp. 1,406,063,280	47.82%
			Sub Kegiatan :											
				Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS	173	Orang			173	Orang	100.00%			
				Jumlah Peserta Pelatihan Kewaspadaan	40	Orang			25	Orang	62.50%			
				Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2	Orang			2	Orang	100.00%			

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11
	24	Penyenggaraan Penyelenggaraan Kompetensi bagi Pimpinan Tingkat Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Penguatan	Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	2	Orang	Rp 2.894.238.580	2	Orang	100.00%	Rp 1.175.176.300	Rp 1.408.962.380	47.62%
			Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Penguatan	40	Orang		0	Orang	0.00%			
			Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Guru	40	Orang		40	Orang	100.00%			
			Jumlah Peserta Penyetoran Diklat Teknis / Fungsional	36	Orang		48	Orang	133.33%			
						Rp 41.939.800.877			88.11%	Rp 21.392.818.435	Rp 29.886.791.242	69.81%

Pelatikan, 03 Januari 2022
 Kepala Badan Kependidikan dan
 Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. Tanjung Hoss Effendi, M.Si
 NIP. 19610608 198003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

**MONEV RENSTRA
TAHUN 2021**



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LAKIP
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jl. A.Syatiani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315

Pelaihari, 06 September 2021

Kepada Yth.

Nomor : 900/ 989 -Sekret/BKPSDM/IX/2021
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian
RENSTRA Tahun 2021

1. Sekretaris
 2. Kepala Bidang
 3. Kepala Sub Bidang
- BKPSDM Kabupaten Tanah
Laut

Di -

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pemantauan capaian Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDM Tahun 2018 hingga 2021, maka dengan Surat ini, Kami mengundang Bapak/Ibu agar bertadfir pada:

- Hari / Tanggal : Rabu, 08 September 2021
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat BKPSDM Kab. Tanah Laut
Acara : - Masukan dan Saran untuk evaluasi dan
pemantauan capaian RENSTRA s.d. Tahun ke-3
RPMD
- Hal-hal lain yang dianggap penting.

Para pemangku kegiatan agar membawa data laporan realisasi capaian sasaran RENSTRA.

Demikian disampaikan atas Perhatian dan Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kab. Tanah Laut,


H. Tauladik Naor Effendi, M.Si
NIP. 19630608 196602 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(LA.Syairani) Pelalabari 79814 Telp (0512) 21043 Fax (0512) 21315

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI / TANGGAL : Rabu, 08 September 2021

WAKTU : 09.00 WITA

TEMPAT : Ruang Rapat BPPSDM Kab Tanah Laut

NO.	NAMA/NIK	JABATAN	TTD
1	2	3	5
1	Tejadin Ader Effendi	Ka BPPSDM	
2	Zai Yaroni	Sekretaris	
3	Kendro Cahyo	Kabid Pengembangan	X.
4	FITE Puryani	Pejabat KCU	Puryani
5	Faja Tri Atmaja	Kabid MDI	
6	Alfian Luthfi	Analisis Kepeg. muda	
7	Adip Setiyo	Analisis Kepeg. Muda	
8	Nora Nurayda	Kepeg. Muda	
9	Ira Nurashani	Analisis Kepeg. Muda	
10	ANDRI SETIAWAN	ANALIS KEPEGAWAIAN	
11	Almunansyah	Analisis Kepegaworan	
12	Ayu Nurhasanah	Analisis Kepegaworan Muda	
13			
14			
15			
16			
17			

Product Code:



Laporan Hasil Rapat

Kepada Yth : Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut
Hari dan Tanggal : Rabu, 08 September 2021
Perihal : Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian RENSTRA Tahun 2021

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 di ruang rapat BKPSDM Kabupaten Tanah Laut yang dihadiri oleh Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang, Pejabat Pelaksana Kegiatan dengan hasil Rapat:

1. Mengevaluasi relevansi Renstra dengan kondisi saat ini.
2. Mengevaluasi capaian target indikator kinerja utama (IKU).
3. Untuk Persentase pegawai yang memiliki sertifikat dilat peningkatan kompetensi dengan target **81,22%** tercapai **89,45%** di tahun 2021. Pencapaian tersebut telah melampaui target tahunan yang ditetapkan di dalam Renstra.
4. Untuk capaian Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi, telah melampaui target tahunan **100%**, yakni dengan capaian **105,67%**.
5. Untuk Predikat Nilai SAKIP, target untuk Tahun 2021 adalah **B**, dengan capaian melebihi target, yakni **BB**.
6. Untuk capaian kegiatan lainnya di tahun 2021 telah memenuhi target dengan capaian **100%**.
7. Kepala BKPSDM menghimbau agar seluruh ASN BKPSDM meningkatkan kerjasama dan kinerjanya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra yang telah disepakati.
8. Hasil evaluasi capaian Renstra agar dimanfaatkan dalam pengarsihan pengorganisasian kegiatan, agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan hasil ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Selanjutnya

Notulen,



Eberyan S.Sos

NIP. 19790406 200801 2 025

**Monitoring Evaluasi Rencana Strategis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut**

[illegible]

7	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100%	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
8	Persentase pegawai yang datanya akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase terkelolanya administrasi barang / aset, perkantoran dan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase terkelolanya administrasi perencanaan dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Penilaian Nilai SAP	B	B	B	B	B	B	BB	BB	B	B

Pelahari, 8 September 2021
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut,



Dr. H. TALJUDDIN NOOR EFEENDI, M.Si
NIP. 19630603 196602 1 008

Foto Kegiatan Rapat

Rapat : Koordinasi Evaluasi Capaian RENSTRA Tahun 2021

Hari / Tanggal : Rabu, 08 September 2021





PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

**MATRIKS
KESELARASAN**



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LAKIP
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021

MATRIKS KESELARAN 2021
KESELARAN KINERJA - OUTPUT - PENGANGKARAN

No.	Nama Kegiatan	Strategi Pengembangan (ST)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	KPI / Sub-Indikator	No.	Rencana Kegiatan / Sub Kegiatan				Rencana Kegiatan / Sub Kegiatan (Rp)	Anggaran Awal	Catatan
							Uraian		Indikator				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Manajemen Mutu dan Risiko (MQR)	1	IKU 1.1.1	1	Penelitian R&D	1	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR)	100	100%	80.000.000,00	0	0	0
						2	Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Risiko Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Penelitian Risiko yang Tersusun	0		0	60.000.000,00	
						3	Penelitian Risiko Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Risiko	1		0	2.000.000,00	
						4	Penelitian Risiko Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Risiko	1		0	2.000.000,00	
						5	Penelitian Risiko Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Risiko	1		0	2.000.000,00	
						6	Penelitian Risiko Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Risiko	1		0	2.000.000,00	
						7	Penelitian Risiko Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Risiko	1		0	2.000.000,00	
						8	Penelitian Risiko Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Risiko	1		0	2.000.000,00	
						9	Penelitian Risiko Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Risiko	1		0	2.000.000,00	
						10	Penelitian Risiko Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Risiko	1		0	2.000.000,00	
						11	Penelitian Risiko Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Risiko	1		0	2.000.000,00	
						12	Penelitian Risiko Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Risiko	1		0	2.000.000,00	
						13	Penelitian Risiko Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Risiko	1		0	2.000.000,00	
						14	Penelitian Risiko Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Risiko	1		0	2.000.000,00	
						15	Penelitian Risiko Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Risiko	1		0	2.000.000,00	

No	Sasaran Strategis	Rencana Strategis Dinas/Instansi (RT)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU) (RT)	Misi / Submisi Misi	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kegiatan (RT)	Anggaran (Rp)	Cat
							Uraian	Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Peningkatan PKU	1	Kegiatan Administrasi dan Pengorganisasian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Publik Dasar	1	2019		19.873.800	
						1.1	Pengelolaan Pelayanan (Garis Bantu dan Staf Administrasi)	Jumlah Pelayanan Publik / Subsektor	50	2019		19.873.800	
						2	Kegiatan Administrasi dan Pengorganisasian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan dan Administrasi Kantor	8	2019	7	1.088.118.000	
						1.2	Pelayanan Pelayanan Internal (Jumlah Pelayanan Pegawai Kantor)	Jumlah Jenis dan Jumlah dan Jumlah	14	2019		2.071.813	
						1.3	Pelayanan Pelayanan dan Pengorganisasian Kantor	Jumlah Jenis Pelayanan dan Pengorganisasian Kantor	14	2019		557.388.128	
						1.4	Pelayanan Pelayanan dan Pengorganisasian Kantor	Jumlah Jenis Pelayanan dan Pengorganisasian Kantor	9	2019		2.882.942	
						1.5	Pelayanan Pelayanan dan Pengorganisasian Kantor	Jumlah Jenis Pelayanan dan Pengorganisasian Kantor	22	2019		18.227.144	
						1.6	Pelayanan Pelayanan dan Pengorganisasian Kantor	Jumlah Jenis Pelayanan dan Pengorganisasian Kantor	18	2019		2.449.000	
						1.7		Jumlah Pelayanan dan Jumlah dan					

No	Strategi	Strategi Berkelanjutan (Y1)	Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Strategis Berkelanjutan (Y1)	MLO (Rakor RI)	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Status	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Berkelanjutan (Y1)	Anggaran (Rp)	Nilai
							Struktur	Indikator	Tipe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						6	Peningkatan Berdaya Mampu Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Berdaya Mampu Melalui yang Optimal	4	Jarak		7	120.187.180
						17	Peningkatan akses Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Anak Usia Dini)	Jumlah Pendidikan Dasar/ Pendidikan Dasar 2 yang Optimal	5	Rapat Tahun		80.830.000	
							Jumlah Pendidikan Dasar/ Pendidikan Dasar 4 yang Optimal	4	Rapat Tahun				
						120	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Anak Pendidikan Dasar yang Optimal	10	Jarak		44.474.500	
						125	Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Pendidikan Dasar yang Optimal	10	Jarak		29.053.100	
Manajemen Keuangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Manusia	4	Manajemen Keuangan Program	7	Peningkatan RI			Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidikan Dasar/ Pendidikan Dasar 2 yang Optimal	15	Jarak	4.000.000.000	1.000.000.000	
					105	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidikan Dasar/ Pendidikan Dasar 2 yang Optimal	15	Jarak	81.830.000			
					120	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidikan Dasar/ Pendidikan Dasar 2 yang Optimal	15	Jarak	81.830.000			
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Program	7	Peningkatan RI	120	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidikan Dasar/ Pendidikan Dasar 2 yang Optimal	15	Jarak	4.000.000.000	1.000.000.000		
					125	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidikan Dasar/ Pendidikan Dasar 2 yang Optimal	15	Jarak		81.830.000		
					130	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidikan Dasar/ Pendidikan Dasar 2 yang Optimal	15	Jarak		81.830.000		
					135	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidikan Dasar/ Pendidikan Dasar 2 yang Optimal	15	Jarak		81.830.000		

No.	Rencana Strategis	Rencana Strategis Subsektor (RS)	Indikator Kinerja Rencana Strategis	Indikator Kinerja Subsektor Rencana Strategis Berkelanjutan (IKBS)	R&D / Subsektor (RS)	No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Berkas	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Terpadu (Sampai Tahun 2025)	Anggaran (Rp)	Cat.
							Isi	Indikator	Tipe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Manajemen sumber daya manusia yang unggul yang memiliki standar kompetensi	Peningkatan sumber daya manusia yang memiliki standar kompetensi	1	1	R&D	9	Kegiatan Berbasis dan Promosi R&D	Jumlah Mutasi R&D dari Promosi R&D	800	Orang	R&D Penguatan Terpadu	721.175.200	
						10	Peningkatan Mutasi R&D	Jumlah Mutasi R&D dalam Jumlah Peningkatan dan Jumlah Peningkatan	600	Orang		200.000.000	
								Jumlah Mutasi R&D dalam Jumlah Peningkatan dan Jumlah Peningkatan	100	Orang			
								Jumlah Mutasi R&D dalam Jumlah Peningkatan dan Jumlah Peningkatan	100	Orang			
						11	Peningkatan Jumlah Peningkatan R&D	Jumlah Peningkatan Jumlah Peningkatan R&D	1000	Orang		200.000.000	
								Jumlah Peningkatan Jumlah Peningkatan R&D	100	Orang		100.000.000	
						12	Peningkatan Jumlah R&D	Jumlah Peningkatan Jumlah R&D dalam Jumlah Peningkatan R&D	5	Orang		100.000.000	
	Manajemen mutu standar kompetensi	Manajemen mutu standar kompetensi	1	1	R&D	8	Kegiatan Peningkatan Kompetensi R&D	Jumlah R&D yang Memiliki Standar Kompetensi	200	Orang	R&D Penguatan Terpadu	1.000.000.000	
						10	Peningkatan Jumlah R&D	Jumlah R&D yang Memiliki Standar Kompetensi	100	Orang		500.000.000	
						12	Peningkatan Jumlah R&D	Jumlah R&D yang Memiliki Standar Kompetensi	100	Orang		500.000.000	
								Jumlah R&D yang Memiliki Standar Kompetensi	100	Orang			

No	Strategi Bisnis	Rencana Strategis Berkelanjutan (RTS)	Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis	Indikator Kinerja Utama (IKU) Berkelanjutan (IKU-B)	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Status	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Terkait (IKU-B)	Anggaran (Rp)	Cat	
						Urutan	Initiative	Tujuan	Detail					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Pertumbuhan Pendapatan Operasional Aparatur Sipil Negara	Y	Pendukung KCU	10	Pengadaan Fasilitas dan Sarana KCU dan Aparatur	Jumlah Dokumen SK	200	Dok	AKB Kabupaten Tanah Laut	272.750,000		
						11	Pendukung Cagar Budaya	Jumlah SK Dokumen Cagar Budaya	10	Dok		272.750,000		
						12	Pendukung Cagar Budaya	Jumlah SK dan Perizinan	10	Dok				
								Jumlah SK Pemetaan	250	Dok				
Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Cagar Budaya	P	Peningkatan Kualitas Daya Saing yang Menghasilkan Produk Unggulan	Y	KCU		8	PEKERJAAN PEMERINTAHAN SAKSI TANPA KAWAN	Pembinaan AKB yang Menyebutkan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Fasilitas	400	Persen	AKB Kabupaten Tanah Laut	2.004.220,000		
								Pembinaan Pesisir AKB yang Tidak Menyebutkan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Fasilitas	75.000	Persen				
								Rakor dan Latihan Regional Meningkatkan Pemeliharaan dan Pemeliharaan	20	Jam				
						11	Pengelolaan Berkelanjutan, Keberlanjutan, Pengembangan, Pengembangan, Pengembangan, Pengembangan dan Pengembangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemeliharaan dan Pemeliharaan	100	Orang	AKB Kabupaten Tanah Laut	2.004.220,000		
						10		Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CBR	100	Orang		2.004.220,000		
								Jumlah Peserta Pelatihan Operasional	40	Orang				
								Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Berkelanjutan	5	Orang				
								Jumlah Peserta Pelatihan Kelembagaan Nasional KCU	5	Orang				
								Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Penguatan	40	Orang				
								Jumlah Peserta Pelatihan Berkelanjutan Baru	40	Orang				
								Jumlah Peserta Pelatihan Penguatan CBR	40	Orang				
								Jumlah Peserta Pelatihan Penguatan CBR	40	Orang				





**PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT**

**RENCANA AKSI
DAN
REALISASI**



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LAKIP
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021

[Home](#) | [About Us](#) | [Privacy Policy](#) | [Contact Us](#)

[illegible]

Region	Country	Project Name	Sector	Status	2011				2012				Comments	Date	2013				Comments
					1001	1002	1003	1004	1001	1002	1003	1004			1001	1002	1003	1004	
Africa	South Africa	Project A	Health	Completed									Completed	2011-12-31					Completed
		Project B	Education	In Progress									In Progress	2012-06-30					In Progress
		Project C	Water Supply	Completed									Completed	2011-09-15					Completed
		Project D	Transport	Completed									Completed	2012-03-20					Completed
	Kenya	Project E	Health	In Progress									In Progress	2012-01-10					In Progress
		Project F	Education	Completed									Completed	2011-11-05					Completed
		Project G	Water Supply	In Progress									In Progress	2012-04-15					In Progress
	Nigeria	Project H	Health	Completed									Completed	2011-08-20					Completed
		Project I	Education	In Progress									In Progress	2012-02-28					In Progress
		Project J	Water Supply	Completed									Completed	2011-10-10					Completed
Asia	China	Project K	Health	Completed									Completed	2011-12-31					Completed
		Project L	Education	In Progress									In Progress	2012-06-30					In Progress
		Project M	Water Supply	Completed									Completed	2011-09-15					Completed
		Project N	Transport	Completed									Completed	2012-03-20					Completed
	India	Project O	Health	In Progress									In Progress	2012-01-10					In Progress
		Project P	Education	Completed									Completed	2011-11-05					Completed
		Project Q	Water Supply	In Progress									In Progress	2012-04-15					In Progress
	Japan	Project R	Health	Completed									Completed	2011-08-20					Completed
		Project S	Education	In Progress									In Progress	2012-02-28					In Progress
		Project T	Water Supply	Completed									Completed	2011-10-10					Completed

Kategori	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target				Realisasi				Capaian	Page	Realisasi				Capaian
					Tar 1	Tar 2	Tar 3	Tar 4	Tar 1	Tar 2	Tar 3	Tar 4			Tar 1	Tar 2	Tar 3	Tar 4	
			Jumlah PPH yang diberikan kepada Masyarakat (Rakyat) yang terdampak akibat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum																
Pengembangan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Peningkatan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi	Jumlah Masyarakat yang	200	200	40	40	40	10	40	40	40	20	70,0%	211.980.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000
			Jumlah PPH yang diberikan kepada Masyarakat (Rakyat) yang terdampak akibat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum	10	10	2	2	2	2	2	2	2	1	10,0%	211.980.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000
			Jumlah PPH yang diberikan kepada Masyarakat (Rakyat) yang terdampak akibat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum	10	10	2	2	2	2	2	2	2	1	10,0%	211.980.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000
			Jumlah PPH yang diberikan kepada Masyarakat (Rakyat) yang terdampak akibat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum	200	200	40	40	40	10	40	40	40	20	70,0%	211.980.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000
Pengembangan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Peningkatan Persepsi dan Sikap Masyarakat	PEKERJAAN PEMERINTAHAN SIKAP KARYAWAN												2.000.000.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000
		Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi	Jumlah PPH yang diberikan kepada Masyarakat (Rakyat) yang terdampak akibat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum	200	200	40	40	40	10	40	40	40	20	70,0%	2.000.000.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000
			Jumlah PPH yang diberikan kepada Masyarakat (Rakyat) yang terdampak akibat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum	100	100	20	20	20	5	20	20	20	10	100,0%	2.000.000.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000
		Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi	Jumlah PPH yang diberikan kepada Masyarakat (Rakyat) yang terdampak akibat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum	40	40	8	8	8	2	8	8	8	4	100,0%	2.000.000.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000
			Jumlah PPH yang diberikan kepada Masyarakat (Rakyat) yang terdampak akibat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum	4	40	8	8	8	2	8	8	8	4	100,0%	2.000.000.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000
			Jumlah PPH yang diberikan kepada Masyarakat (Rakyat) yang terdampak akibat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum	4	40	8	8	8	2	8	8	8	4	100,0%	2.000.000.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000
			Jumlah PPH yang diberikan kepada Masyarakat (Rakyat) yang terdampak akibat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum	40	40	8	8	8	2	8	8	8	4	100,0%	2.000.000.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000
			Jumlah PPH yang diberikan kepada Masyarakat (Rakyat) yang terdampak akibat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum	40	40	8	8	8	2	8	8	8	4	100,0%	2.000.000.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000
			Jumlah PPH yang diberikan kepada Masyarakat (Rakyat) yang terdampak akibat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum	40	40	8	8	8	2	8	8	8	4	100,0%	2.000.000.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000
			Jumlah PPH yang diberikan kepada Masyarakat (Rakyat) yang terdampak akibat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum	40	40	8	8	8	2	8	8	8	4	100,0%	2.000.000.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000
			Jumlah PPH yang diberikan kepada Masyarakat (Rakyat) yang terdampak akibat pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum	40	40	8	8	8	2	8	8	8	4	100,0%	2.000.000.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000	66.171.000





PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

DATA STATISTIK



BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut

LAKIP
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021

DATA PEJABAT ADMINISTRATOR YANG BELUM MENGIKUTI DILAT MANAJERIAL PM II KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PANGKAT GOLONGAN RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON T M T	MASA KERJA	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON II
1	DARMASATA, S.Su, MAF 19711215 199403 1 000 KURAU, 15-12-1971	PEMEREA IVa 01-04-2019	KEPALA BIDANG PASAR DAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II B TMT. Jabatan 29-03-2020		50 Thn 1 Bn	1/3/2017
2	ARIF SETYAWAN, ST 19800303 200501 1 012 MANTAPURA, 03-10-1980	PEMEREA IVa 01-04-2020	KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA DAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II B TMT. Jabatan 19-04-2021	17 Thn	41 Thn 3 Bn	5/16/2017
3	ZULFIADON, S.Su 19700601 199003 1 012 MARABAHAN, 02-02-1970	PENATA TINGKAT I III 21-10-2018	CAKUP RECAMAN KURAU PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon III A TMT. Jabatan 06-06-2021	20 Thn 10 Bn	51 Thn 11 Bn	5/16/2017
4	HA, DAHLIAN, S.Pi, MP 19900415 199903 2 000 PELAHARI, 15-04-1990	PEMEREA TINGKAT I IVa 01-04-2021	SEKRETARIS SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II A TMT. Jabatan 01-10-2019	33 Thn 10 Bn	52 Thn 5 Bn	3/27/2019
5	ANNA AYU ROSWYDA, ST 19800805 200501 2 014 BAKJARMASIN, 05-08-1980	PEMEREA IVa 01-04-2020	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II B TMT. Jabatan 13-01-2021	17 Thn	41 Thn 5 Bn	3/27/2019
6	IRMA ROSANTI, S.Su, M.Psi 19731225 200604 2 000 BAKJARMASIN, 25-02-1973	PEMEREA IVa 01-04-2020	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI-PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II A	10 Thn 3 Bn	40 Thn 11 Bn	3/27/2019

NO	NAMA LENGKAP NLP TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PANGKAT KOLOMBAH RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON T M T	WAKTU KERJA	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON II
7	ARLIANI, SAM 19700202 199303 1 000 PELAHARI, 22-02-1970	PEMUDA IV/a 01-04-2020	SEKRETARIS SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II. A TMT. Jabatan 26-02-2020	29 Thn 10 Bn	51 Thn 11 Bn	3/07/2019
8	SUPRIAL, AMWAY, S. Sdr. M. AP 19720222 199303 1 005 BANGKAR, 22-02-1972	PEMUDA IV/a 05-04-2019	KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN Eselon II. B TMT. Jabatan 19-04-2021	29 Thn 10 Bn	49 Thn 11 Bn	3/07/2019
9	KHARIS, FANM, S. Sdr. M. AP 19710117 199303 1 011 BANGKARNAGIRI, 17-01-1971	PEMUDA IV/a 01-04-2019	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II. B TMT. Jabatan 01-10-2019	29 Thn 10 Bn	50 Thn 8 Bn	3/07/2019
10	H. SYAFIANDAT, SAM 19600109 196101 1 003 PURWOREJO, 01-01-1960	PEMUDA IV/a 01-04-2020	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN RSDG H. BOELANG PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II. B TMT. Jabatan 27-03-2019	61 Thn	54 Thn	3/07/2019
11	EMROHAYAT, S. P 19731116 199303 1 003 PELAHARI, 16-11-1973	PEMUDA IV/a 01-04-2020	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN Eselon II. B TMT. Jabatan 19-04-2021	29 Thn 10 Bn	46 Thn 3 Bn	3/07/2019
12	LENI SARI BODAWATI, A. RS 19760308 200003 2 005 PELAHARI, 08-03-1976	PEMUDA IV/a 01-04-2020	KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II. B TMT. Jabatan 27-03-2019	20 Thn 10 Bn	40 Thn 3 Bn	3/07/2019
13	ROZARI FITRI, SP 19791111 200904 1 004 PELAHARI, 11-11-1979	PEMUDA IV/a 01-10-2020	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA DINAS PARIWISATA PEMERINTAH Eselon II. B	19 Thn 9 Bn	49 Thn 3 Bn	3/07/2019

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PANGKAT GOLONGAN RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON T M T	NAMA KERJA	USIA	TMT JABATAN PERTAMA ESELON B
14	DR. HADI S ST, MT 19740910 199903 1 001 KRADENAS GROSOGAN, 10-09-1974	PEMBINA IVB 01-04-2021	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH L. Eselon II B TMT, Jabatan 19-04-2021	23 Tpn 10 Bn	47 Tpn 4 Bn	3/07/2019
15	MUHAMMAD YULIANSYAH, SHM, MM 19780912 200001 1 011 RELAMARI, 12-09-1978	PEMBINA IVB 01-04-2021	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II B	17 Tpn	46 Tpn 4 Bn	3/07/2019
16	HENDRO CAHYONO, SE, M.A.P 19730116 200604 1 003 MAGELANG, 16-01-1973	PEMBINA IVB 01-04-2021	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN FORMASI APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUS. Eselon II B TMT, Jabatan 06-06-2020	16 Tpn 8 Bn	46 Tpn 11 Bn	3/07/2019
17	ALAMSYAH, SE 196903 1 011 BANADAL, 05-01-1969	PEMBINA IVB 01-10-2021	KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN ALOKASI DAN ASSET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II B TMT, Jabatan 06-06-2020	26 Tpn 12 Bn	53 Tpn	3/07/2019
18	NIVA MAHRANI, ST 19770229 200604 2 009 BALIKRAPAY, 23-02-1977	PENATA TINGKAT I IIB 01-04-2019	INSPEKTUR PEMBANTU / INSPEKTORAT KABUPATEN Eselon II, A TMT, Jabatan 19-04-2021	19 Tpn 8 Bn	44 Tpn 11 Bn	3/07/2019
19	HANTI MONDES, ST, MS 19781204 200604 3 005 BANJARMASIN, 04-12-1978	PENATA TINGKAT I IIB 01-04-2019	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWALAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (PESER) Eselon II, B TMT, Jabatan 27-07-2019	16 Tpn 3 Bn	46 Tpn 1 Bn	3/07/2019
20	PAJURN, ST 19690512 200701 1 032 BLORON-SULTAN, 12-05-1969	PENATA TINGKAT I IIB 01-04-2019	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PERKERJAAN UMUM, PENATAAN RUMAH DAN PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN Eselon II, B TMT, Jabatan 06-06-2020	14 Tpn	52 Tpn 3 Bn	3/07/2019

NO	NAMA LENGKAP (NIP) TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PANGKAT DAN ONDANG RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON T M T	UMUR KERJA	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON II
21	AGUS SETIYO, SSTP, MM 198406082004121001 MERLU DALEM, 08-06-1984	PEMBA IVa 01-10-2020	CAMAT KECAMATAN PANYIPATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LUT Eselon II, A TMT, Jabatan 01-10-2019	18 Thn 1 Bn	38 Thn 5 Bn	5/28/2019
22	PARON, S.HA 197507142006041004 BANYUWANGI, 14-07-1975	PEMBA IVa 01-04-2021	SEKRETARIS SEKRETARAT DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LUT Eselon II, A TMT, Jabatan 06-09-2020	16 Thn 9 Bn	46 Thn 8 Bn	5/29/2019
23	FALIZAN RIYADI, ST, M.P 19880310004 TANJUNGPINRANG, 05-03-1978	PEMBA IVa 01-10-2018	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SELANJUTERA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA Eselon II, B TMT, Jabatan 19-04-2021	30 Thn 10 Bn	45 Thn 8 Bn	5/28/2019
24	AHMAD, STP 198808081993031013 TANAH LUT, BATUKAN, 08-08-1988	PEMBA IVa 01-04-2020	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN DINAS PERIKANAN, PANGKAS DAN PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN Eselon II, B TMT, Jabatan 05-06-2020	29 Thn 10 Bn	52 Thn 5 Bn	5/28/2019
25	ADI RAHMATI, STP 197308111986031003 TANALONG, 01-08-1973	PEMBA IVa 01-04-2020	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PE Eselon II, B TMT, Jabatan 29-02-2020	26 Thn 10 Bn	49 Thn 7 Bn	5/28/2019
26	WISNU KUNTARTO, SSTP 198408082003121006 SANGJAMASRI, 08-08-1984	PEMBA IVa 01-04-2020	SEKRETARIS SEKRETARAT KECAMATAN KUNTAT Eselon II, B TMT, Jabatan 28-05-2019	19 Thn 1 Bn	37 Thn 8 Bn	5/28/2019
27	TEDI MULYANA, ST, MT 198008172005011007 TANAH LUT, 17-08-1980	PEMBA IVa 01-10-2020	KEPALA BIDANG PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN ASSET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Eselon II, B	17 Thn	41 Thn 7 Bn	5/29/2019

NO	NAMA LENGKAP NIP TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PANGKAT GOLONGAN RUANG TMT	JABATAN TERAKHIR ESELON I M I	MASA KERJA	USIA	TMT JABATAN PERTAMA ESELON II
28	LIJI AMRI SAHITAN, S.T., M.P. 19791213 200604 1 011 DRESON, 13-12-1979	PEMBINA I/IIa 01-10-2021	KEPALA BIDANG TATA RUANG UMUM, PERENCANAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN TA. Eselon II, B TMT, Jabatan 01-10-2019	14 Thn 3 Bn	42 Thn 1 Bn	5/26/2019
29	WIRAM NOOR KAUTSAR, S.STP 19870817 200602 1 001 SURABAYA, 17-08-1987	PENATA TINGKAT I BIII 01-04-2019	SEKRETARIS SEKRETARIAT KECAMATAN TAKSUNG Eselon II, B TMT, Jabatan 28-05-2019	10 Thn 11 Bn	34 Thn 5 Bn	5/26/2019
30	MUHAMMAD LUTHFI ARBAH, S.P (GOLONGAN) 200701 1 001 TAKSUNG, 15-04-1986	PENATA TINGKAT I BIII 01-04-2019	SEKRETARIS SEKRETARIAT KECAMATAN PANYIPATAN Eselon II, B TMT, Jabatan 28-05-2019	11 Thn	35 Thn 9 Bn	5/26/2019
31	YUS SRI WARTORO, SP 19750731 200701 1 011 AMBUNGAN, 31-07-1975	PENATA TINGKAT I BIII 01-04-2019	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN Eselon II, B TMT, Jabatan 19-04-2021	15 Thn	40 Thn 6 Bn	5/26/2019
32	HADERHANSYAH, S.Sos 19880504 200803 1 004 GARABAL, 04-05-1988	PENATA TINGKAT I BIII 01-10-2021	KEPALA BIDANG PENTELINGCARAN E- GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Eselon II, B TMT, Jabatan 28-05-2019	13 Thn 10 Bn	41 Thn 8 Bn	5/26/2019
33	LATIP KAMRULLOH, S.AP 19740705 199403 1 004 TAKSUNG, 05-07-1974	PEMBINA I/IIa 01-10-2020	KEPALA BIDANG UMUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAMBAK LAUT Eselon II, A TMT, Jabatan 12-01-2021	28 Thn 10 Bn	47 Thn 6 Bn	10/1/2019
34	SUDI ANDRIAN BUTARITO, S.Sos 19780218 200701 1 008 BANJARBARU, 18-02-1978	PEMBINA I/IIa 01-10-2021	KEPALA BIDANG PERSONAL NON PERSONAL TERTEKUTU DINAS PEMANAJAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PMT Eselon II, B TMT, Jabatan 01-10-2019	10 Thn	45 Thn 11 Bn	10/1/2019

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PANGKAT GOLONGAN RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELOH T M T	MASA KERJA	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELOH B
35	WIYANTI MELANSARI, SH 19700024 200001 2 011 KEDIRAMAYU, 24-08-1978	PENATA TINGKAT I IIR 01-04-2017	KEPALA BIDANG PEMBUDIDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BER	17 Thn 7 Bn	45 Thn 7 Bn	10/10/2019
36	MUHAMMAD AMINULLAH, S STP, M AP 19870006 200001 1 002 BANJARMASIN, 08-03-1987	PERWATA TINGKAT I IIR 01-04-2019	SEKRETARIS SEKRETARIAT KECAMATAN BATI-BATI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, B TMT, Jabatan 05-09-2021	10 Thn 11 Bn	34 Thn 10 Bn	10/10/2019
37	FERRY KUSUMAWA, SP MP 19780014 200001 1 000 PELAHANG, 14-07-1978		KEPALA BIDANG PERUBAHAN, PHIDUKAN DAN PAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PEMERINTAH KABUPATEN Eselon II, B TMT, Jabatan 05-08-2020	14 Thn 6 Bn	43 Thn 6 Bn	10/1/2019
38	INA DARTANA, S P 19711122 198103 2 004 BUNTOK, 22/11/1971	PEMBINA IIR 01-10-2021	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH Eselon II, A TMT, Jabatan 12-01-2021	31 Thn 10 Bn	50 Thn 2 Bn	2/28/2020
39	H. M. DAUD 19671102 199001 1 010 KANDANGAN (HSE), 02-11-1967	PEMBINA IIR 01-10-2021	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN, USAHA, PRASARANA DAN SARANA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PEMERINTAH Eselon II, B TMT, Jabatan 28-02-2020	29 Thn 10 Bn	54 Thn 2 Bn	2/28/2020
40	H. HASRI, SAM, MM 19710515 196703 1 013 BANJARMASIN, 15-05-1971	PEMBINA IIR 01-10-2021	SEKRETARIS SEKRETARIAT UPT RSUD H Bojonejo Pematang Eselon II, B TMT, Jabatan 05-09-2021	25 Thn 12 Bn	50 Thn 8 Bn	2/28/2020
41	ANANG FANISAH, ST 19720211 200001 1 009 BANJARMASIN, 11-02-1972	PENATA TINGKAT I IIR 01-04-2018	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, A TMT, Jabatan 19-04-2020	14 Thn 11 Bn	48 Thn 11 Bn	2/28/2020

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PANGKAT GOLONGAN RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON T M T	MASSA KERJA	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON II
42	DULYAHM, S.Sim 19960311000 PELAHARI, 30-05-1967	PENATA TINGKAT I E42 01-04-2019	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMERINTAH KABUPATEN Eselon II-B TMT, Jabatan 28-02-2020	32 Thn 10 Bn	64 Thn 7 Bn	2028/2020
43	H. ENOH ARIFANTO 2010011000 LAWONGAN, 21-03-1980	PENATA TINGKAT I E43 01-10-2018	KEPALA UPT REJIECK, H. MAMRUL DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II-B TMT, Jabatan 25-02-2020	12 Thn	39 Thn 10 Bn	2028/2020
44	H. AHMAD YANI S.Pd 1980081980011000 BARABAI, 10-05-1980	PENATA TINGKAT I E44 01-10-2018	SEKRETARIS SEKRETARIAT REJAMAN TAMBAK ULANG PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II-B TMT, Jabatan 28-02-2020	15 Thn	63 Thn 3 Bn	2028/2020
45	SITI KHARIJAH, S.Sim 2003122000 MEGASARI, 24-04-1982	PENATA TINGKAT I E45 01-04-2019	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMERINTAH KABU Eselon II-B TMT, Jabatan 17-05-2021	16 Thn 1 Bn	39 Thn 3 Bn	2028/2020
46	FAJAR TRI ATMAJI, SH 198101312000011001 PACITAN, 31-01-1981	PENATA TINGKAT I E46 01-04-2019	KEPALA BIDANG MUTASI, DATA DAN INFORMASI BADAN KEPEKERJAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PONE Eselon II-B TMT, Jabatan 28-02-2020	14 Thn 10 Bn	40 Thn	2028/2020
47	MAHYUDI Hidayat, SE 197806062008011000 PELAHARI, 05-05-1978	PENATA TINGKAT I E47 01-04-2019	KEPALA BIDANG PERALIHAN UPT REJIECK, H. BOEJASIN PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II-B TMT, Jabatan 28-02-2020	14 Thn	42 Thn 3 Bn	2028/2020
48	DWY HADI PUTRA, ST 2006041000 PAGAYANAN, 17-05-1979	PENATA TINGKAT I E48 01-04-2021	KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENYATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN PA Eselon II-B TMT, Jabatan 28-02-2020	18 Thn 8 Bn	47 Thn 5 Bn	2028/2020

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PANGKAT GOLONGAN RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON T M T	MASA KERJA	U D I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON II
48	GUSTI NOVIAN RUMAH, ST 1961115 201001 1 000 BANJARMASIN, 15-11-1960	PENATA III/c 01-04-2018	KEPALA BIDANG OPTIKA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PE Eselon II, B TMT Jabatan 08-02-2000	12 Thn	30 Thn 2 Bn	2/28/2020
49	ANDRA ERA PUTRA, S.I.P, M.Si 19870901 200701 1 002 PELAHARI, 27-09-1987	PENATA TINGKAT I III/d 01-10-2020	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, B TMT Jabatan 05-09-2000	15 Thn	54 Thn 4 Bn	5/6/2020
51	NOOR RIWANDY KODRATILLAH, S.Pi 19770808 300804 1 018 AMUNTAI, 08-08-1977	PENATA TINGKAT I III/c 01-04-2018	KEPALA BIDANG PERKAWAN TANGKAP DINAS KETAHANAN PANGAN DAN BERKAWAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, B TMT Jabatan 05-05-2000	18 Thn 9 Bn	44 Thn 4 Bn	6/5/2020
52	H MUHAMMAD HAYAT, S. Des 19701013 196405 1 005 PELAHARI, 13-10-1970	PEMUNA IV/a 01-10-2001	KEPALA BAGIAN KELANGKAS SEKRETARAT DPRD PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, A TMT Jabatan 06-09-2000	26 Thn 10 Bn	51 Thn 3 Bn	8/9/2020
53	ELIZA MELANI, M.Pd 19790914 200112 2 002 BANJARMASIN, 14-09-1975	PEMUNA III/a 01-10-2017	KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH	31 Thn 1 Bn	48 Thn 3 Bn	9/9/2020
54	Hj. SITI ASYIKH, S.P 196001 2 002 BAYASA, 15-04-1967	PENATA TINGKAT I III/d 01-10-2017	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, B	32 Thn	54 Thn 3 Bn	9/9/2020
55	EDY HARIYADI, SP 19600512 200003 1 006 PUNTAYAN (HUT), 12-05-1960	PENATA TINGKAT I III/d 01-04-2018	KEPALA BIDANG PERKEBUNYIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNYIAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA Eselon II, B TMT Jabatan 08-08-2000	13 Thn 10 Bn	41 Thn 3 Bn	9/9/2020

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PANGKAT GOLONGAN RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON T M T	MASA KERJA	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON II
56	GUSTI MUHAMMAD TALUDIN NOOR ST MS 1980003 20101 1 003 PELAHAM, 02-06-1970	PENATA TINGKAT I Rhd 01-04-2019	KEPALA BIDANG KEOLAHRAHASIAAN DINAS KEPERMUDAAN DAN DAHURAGA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, B TMT, Jabatan 10-04-2021	11 Thn 7 Bn	45 Thn 7 Bn	8/8/2020
57	DILA ARISANTI SE M.A.P 1980002 200001 2 012 PELAHAM, 22-03-1982	PENATA TINGKAT I Rhd 01-04-2020	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, B TMT, Jabatan 08-09-2020	14 Thn	39 Thn 10 Bn	9/8/2020
58	NURMAYA SAWITRI ST MS 1982008 200000 2 081 FOKUSAKARTA, 26-05-1982	PENATA TINGKAT I Rhd 01-10-2020	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, B TMT, Jabatan 08-09-2020	13 Thn 10 Bn	39 Thn 8 Bn	8/8/2020
59	DANESYAH ST 19770404 200000 1 109 PELAHAM, 04-04-1977	PENATA TINGKAT I Rhd 01-04-2021	KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERUMAHAN DAN Eselon II, B TMT, Jabatan 08-09-2020	13 Thn 10 Bn	44 Thn 3 Bn	8/8/2020
60	dr H. WENIR RACHMAGWATI M Kes 1980001 2 010 BANJARMASIN, 03-11-1979	PEMERIKSA Rhp 01-10-2017	KEPALA BIDANG PELAYANAN UPT PUSKES Sungai Pinang Eselon II, B TMT, Jabatan 19-04-2021	10 Thn	40 Thn 2 Bn	4/19/2021
61	KASNU S Sca 1988002 199001 1 001 TULUNGAGUNG, 23-05-1988	PENATA TINGKAT I Rhd 01-04-2014	KEPALA BIDANG PERENCANAAN MANDIRI BAGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, B TMT, Jabatan 19-04-2021	32 Thn 11 Bn	53 Thn 7 Bn	4/19/2021
62	JANIRAH S Sca 1974001 198003 2 000 TAMBAK, 10-05-1974	PENATA TINGKAT I Rhd 01-04-2014	KEPALA BIDANG PENYELONGAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH Eselon II, B TMT, Jabatan 19-04-2021	28 Thn 10 Bn	47 Thn 8 Bn	4/18/2021

NO	NAMA LENGKAP N I P TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PAWHAAT GOLONGAN SIKANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON T M T	MASA KERJA	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON II
83	BOMBEA RETNO MAHALAYATI, S.Pd 200301 2 015 BANJARBARU, 30-11-1980	PENATA TINGKAT I I/II 01-10-2018	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, E TMT Jabatan 19-04-2021	17 Thn 10 Bn	41 Thn 2 Bn	4/10/2021
84	MUHO, RIZALDI MUHO, S.Eng 19790725 199003 1 001 BANJARMASIN, 25-07-1979	PENATA TINGKAT I I/II 01-04-2020	KEPALA BIDANG PENATAUBAHAN ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN Tala Eselon II, E TMT Jabatan 15-04-2021	21 Thn 10 Bn	45 Thn 5 Bn	4/10/2021
85	MUSLAF KUR, S.Eng 19710815 200003 1 001 MALANG PUDAK, 15-08-1971	PENATA TINGKAT I I/II 01-04-2021	KEPALA BIDANG PENEKSAAN PERUNDANG- UNDANGAN DAERAH SATUAN POLIS PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN P Eselon II, B TMT Jabatan 15-04-2021	22 Thn 10 Bn	50 Thn 5 Bn	4/10/2021
86	GAMBANG ADIWIJAYA, S.Eng 19810821 200903 1 004 MUJARA TEMEH, 21-08-1981	PENATA TINGKAT I I/III 01-10-2021	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA DINAS KEPENDUDUKAN Eselon II, B TMT Jabatan 17-06-2021	13 Thn 10 Bn	40 Thn 7 Bn	04/17/2021
87	ABDUL HAKIM MULLIM, S. B, M.P 19710125 199003 1 001 KANDANGAN, 25-01-1971	PEMERIA I/II 01-04-2020	KEPALA BIDANG KESELAKTERANGAN RAKYAT SERVIS LAKSAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, A TMT Jabatan 05-09-2021	21 Thn 11 Bn	52 Thn	09/09/2021
88	H. SITI ZURaida, DNM, M.AP 19871009 199002 2 001 HELU SURGA SELATAN, 20-10-1987	PEMERIA I/II 01-10-2019	KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN Eselon II, B TMT Jabatan 05-09-2021	32 Thn 1 Bn	54 Thn 3 Bn	09/09/2021

NO.	NAMA LENGKAP NIP TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PANGKAT GOLONGAN RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON T M T	WASA KERJA	U S T A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON II
60	FADHILAH RIHMAN, S.Pd, M.Pd 19700902-199002-1-003 KANDANGAN, 02-05-1978	PENYAMA IV/a 01-04-2019	KEPALA BIDANG PER DAN RPHTR BIDANG PENDAPATAN DAERAH-PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, B TMT Jabatan 05-09-2021	30 Thn 11 Bn	51 Thn 0 Bn	04/02/21
61	HAJAH, S.Pd 19711211-199203-1-003 KEORH, 11-12-1971	PENATA TINGKAT I III/a 05-10-2015	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, B TMT Jabatan 05-02-2021	30 Thn 10 Bn	49 Thn 1 Bn	04/02/21
71	MIYTAHUL ANWAR, S.Kom 19680424-200603-1-013 SANTIAWASIN, 24-04-1968	PENATA TINGKAT I III/a 01-04-2020	KEPALA BIDANG POLTR BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLTR PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, B TMT Jabatan 05-09-2021	13 Thn 12 Bn	38 Thn 0 Bn	04/02/21
72	Irg. BUDI KURNIYAT 19670723-201411-1-001 PALANGKA RAYA, 23-07-1967	PENATA TINGKAT I III/a 01-12-2020	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, B TMT Jabatan 05-09-2021	8 Thn 3 Bn	34 Thn 0 Bn	04/02/21
73	EDY RUMANA, SE 19741218-199403-1-003 PELAHARI, 18-12-1974	PENATA TINGKAT I III/a 01-04-2018	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon II, B TMT Jabatan 05-09-2021	20 Thn 10 Bn	47 Thn 1 Bn	04/02/21

DATA PEJABAT PENGAWAS YANG BELUM MENOKUTI DILAT MANAJERIAL PM IV KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA LENGKAP N I P	PANGKAT GOLONGAN RUANG TMT	JABATAN TERAKHIR ESELON	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON IV
1	Dr. R. M. N. HARYONO NOWANTO 19751108 250905 1 001 BALUKTAPAN, 08-11-1975	PENBINA IVa 01-10-2021	KEPALA SERIK PELAYANAN MEDIK BIDANG PELAYANAN UPT RSUD H. SOELJASN PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN TA Eselon IV. A TMT Jabatan 19-04-2021	43 Thn 2 Bn	5/16/2016
2	NORMADA, S. Si 19851120 200802 2 010 JAMBU HULU MUKA, 20-11-1985	PENATA TINGKAT I IIIa 01-04-2021	KEPALA SERIK PEMBANGUNAN KELURAHAN SARANG HALANG KECAMATAN PELAHARI PEMERKAB TANAH LAUT Eselon IV. B TMT Jabatan 03-01-2017	36 Thn 2 Bn	1/3/2017
3	AKHMAO RACE, S. Km 19830901 201001 1 016 TANJUNG, 01-09-1983	PENATA IIIa 01-04-2018	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN PERENCANAAN DAN KEURANGAN SEKRETARAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN Eselon IV. A TMT Jabatan 12-01-2021	38 Thn 4 Bn	1/3/2017
4	ASEP SETIAWAN, S. Km 19840914 201001 1 012 LANDASAN ULIN (BANGKARBARU), 14-09- 1984	PENATA IIIa 01-10-2020	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN SEKRETARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN Eselon IV. A TMT Jabatan 04-04-2019	37 Thn 4 Bn	1/3/2017
5	YULIANTI, S. Ska 19740716 200704 2 012 PELAHARI, 16-07-1974	PENATA MUDA TINGKAT I IIIa 01-04-2018	KEPALA SUB BAGIAN KEURANGAN SEKRETARAT DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH Eselon IV. A TMT Jabatan 19-04-2021	47 Thn 6 Bn	1/3/2017

NO	NAMA LENGKAP NIP	PANGKAT GOLONGAN RUANG TMT	JABATAN TERAKHIR SEBELUM	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA SEBELUM IV
6	HJ. RUDDANAH, ST 19740217 200701 2 007 BATANG KULUR KANAN (HSB) 17-02-1974	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-10-2016	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAHAN SEKRETARIAT KECAMATAN BATHATI PEMKAB TANAH LAUT Eselon IV, B TMT. Jabatan 03-01-2017	47 Thn 11 Bn	1/3/2017
7	dr. NELLY MELIANA, M. Iman 19760514 200801 2 025	PEMISNA I/IIIa 01-10-2016	KEPALA SEKSI MUTU PELAYANAN DAN AKREDITASI BIDANG PELAYANAN RISD H BOLAJOIN PELAJARI PEMERINTAH KAB Eselon IV, A	41 Thn 5 Bn	5/18/2017
8	DONA ROSTI ANGGA, ST 19780228 201001 2 012 KEBUMEN, 28-02-1978	PENATA IIIc 01-04-2016	KEPALA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMU Eselon IV, A TMT. Jabatan 16-05-2017	43 Thn 11 Bn	5/18/2017
9	IBRAHIM DOTO, S. Kurni 19760607 200501 1 013 BALIARWASIN, 27-06-1976	PENATA IIIb 01-10-2016	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAHAN SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PENGANGKUTAN DAERAH PEMERINTAH K Eselon IV, A TMT. Jabatan 17-06-2021	45 Thn 5 Bn	5/18/2017
10	HASMI NORDANA S. Kurni 19760830 200501 1 010 PELAAHAN, 30-08-1976	PENATA IIIc 01-10-2016	KEPALA SUB BIDANG PENGUKURAN PAJAK DAERAH BIDANG PAJAK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMKAB TANAH LA Eselon IV, A TMT. Jabatan 16-05-2017	45 Thn 5 Bn	5/18/2017
11	JARIAL ABDIN, SP 19750510 201212 1 001 TANAH LAUT, 10-05-1975	PENATA IIIc 01-10-2020	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN PANGKATAPAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV, A TMT. Jabatan 19-04-2021	46 Thn 8 Bn	3/18/2017
12	FREDILLIA OPTANING LILFA, ST 19840113 200803 2 002 SANGAR TMLR, 13-01-1984	PENATA IIIc 01-10-2017	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA LABORATORIUM BLH UPT LABORATORIUM BLH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN P Eselon IV, B TMT. Jabatan 16-05-2017	37 Thn	5/18/2017

NO	NAMA LENGKAP N I P	PANGKAT GOLONGAN RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON IV
13	AHDA FU ADI, S.I.Rah 19821111 200604 1 002 TASAMQ, 11-11-1982	PENATA MUDA TINGKAT I Sib 01-10-2018	KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN KECAMATAN PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV A TMT Jabatan 06-09-2021	38 Thn 2 Bn	5/16/2017
14	YUDI RAHAN A.MI 19700714 200604 1 008 BANGJABAHU, 14-07-1970	PENATA MUDA TINGKAT I Sib 01-10-2018	KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN ASET BADAN PENGELD Eselon IV A TMT Jabatan 16-05-2017	45 Thn 6 Bn	5/16/2017
15	MUA NUPARI, S.BT 19770518 200601 1 001 PELAHARI, 18-07-1977	PENATA MUDA TINGKAT I Ibu 01-04-2019	KEPALA SUB BIDANG PERHITUNGAN, PENETAPAN PBB DAN BPHTB BIDANG PBB DAN BPHTB BADAN PENDAPATAN DAERAH Eselon IV A TMT Jabatan 10-04-2021	44 Thn 6 Bn	5/16/2017
16	RETNA AFRYANI S.GZ 19930521 200601 2 003 PELAHARI, 21-05-1993	PENATA TINGKAT I Ibu 01-04-2021	KEPALA SUB BAGIAN KELUANGAH DAN PENGOLLOLAAN ASST SEKRETARAT DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN TAN Eselon IV A TMT Jabatan 08-09-2020	36 Thn 6 Bn	3/27/2019
17	R. DODY BRANDAR, SKW 19810813 200604 1 017 PELAHARI, 19-08-1981	PENATA Ibu 01-04-2018	KEPALA UPT INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV A TMT Jabatan 24-04-2020	40 Thn 4 Bn	3/27/2019
18	MERTA APRIANA, SKW 19850430 201101 2 006 PELAHARI, 30-04-1985	PENATA Ibu 01-04-2018	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARAT DINAS KESEHATAN Eselon IV A TMT Jabatan 08-09-2020	36 Thn 9 Bn	3/27/2019
19	ISTIQOMAH, AMR 19760607 200604 2 025 PELAHARI, 07-06-1976	PENATA Ibu 01-10-2018	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN DIKLAT BIDANG KEPERAWATAN RSUD H BOELANG PELAHARI PEMERINTAH Eselon IV A TMT Jabatan 27-03-2019	42 Thn 7 Bn	3/27/2019

NO	NAMA LENGKAP N I P	PANGKAT GOLONGAN RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON IV
20	FAZRIANNOOR, S.Kep 19870407 200903 1 002 PABAHARAN (TANAH LAUT), 27-04-1987	PENATA IIIc 01-10-2021	KEPALA SUBBAG PROGRAM DAN PERENCANAAN SEKRETARIAT RSUD H BOELJASIN PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN TAN Eselon IV A TMT Jabatan 27-03-2019	34 Thn 8 Bln	30/03/2019
21	LAILA ALFIDAH, A.Md 19811227 200501 2 009 TAMBAK, 27-12-1981	PENATA IIIb 01-04-2021	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BALAI LABORATORIUM UPT BALAI LABORATORIUM DNAS KESEHATAN PEMERINTAH KA Eselon IV B TMT Jabatan 27-03-2019	40 Thn 1 Bln	30/03/2019
22	ENDANG WIMARMA, A.Md 19660124 198603 2 006 BATOLA, 24-01-1966	PENATA TINGKAT I IIIb 01-10-2018	KEPALA SUBBAG KELUANGAN SEKRETARIAT RSUD H BOELJASIN PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV A TMT Jabatan 04-04-2019	52 Thn	4/4/2018
23	Hj. NOVITA SARI, Apt 19881113 201402 2 002 JAKARTA, 13-11-1988	PENATA TINGKAT I IIIb 01-04-2021	KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK BIDANG PENUNJANG UPT RSUD H BOELJASIN PELAHARI PEMERINTA Eselon IV A TMT Jabatan 19-04-2021	35 Thn 2 Bln	4/4/2018
24	MUHAMMAD SEPTADI, SH 19870901 201502 1 001 BANJARMASIN, 01-09-1987	PENATA IIIc 01-10-2020	KEPALA SEKSI PENYIDRAN DAN PENYELESIKAN BIDANG PENGARAH PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH SATUAN POLISI PA Eselon IV A TMT Jabatan 17-05-2021	34 Thn 4 Bln	4/4/2018
25	RACHMADANI, A.Md 19830817 201001 1 012 BANJARMASIN, 17-08-1983	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-10-2020	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPENGANTARAN SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LI Eselon IV A TMT Jabatan 05-09-2021	38 Thn 7 Bln	4/4/2018

NO	NAMA LENGKAP N I P	PANGKAT GOLONGAN RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESEKON	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESEKON IV
26	NARI PRATNY, SE 19990505 200504 2 005 TANAH LAUT, 05-05-1999	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-04-2021	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PEMERINTAH KABUPATEN Eselon IV. A TMT. Jabatan 19-04-2021	32 Thn 8 Bn	4/6/2019
27	M. SYAFRIANDI NOOR, SE, 19770121 200701 1 008 PELAHARI, 21-01-1977	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-10-2021	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT KECAMATAN PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN TANJA Eselon IV. B TMT. Jabatan 08-05-2020	44 Thn	4/4/2019
28	ERWANSYAH, A.Mi 19990303 200903 1 008 PELAHARI, 03-03-1999	PENATA MUDA IIIb 01-04-2018	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Eselon IV. A TMT. Jabatan 04-04-2019	35 Thn 10 Bn	4/4/2019
29	HARYONO, A.Mi.Kes 19880312 199101 1 004 DUMUNG MAHMUR, 12-03-1988	PENATA TINGKAT I IIIb 01-10-2014	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA RSUD K. H. MANDYUR UPT RSUD K. H. MANDYUR DINAS KESEHATAN Eselon IV. A TMT. Jabatan 28-05-2019	32 Thn 10 Bn	5/26/2019
30	AGUS RADIY, S.Kep.Ners 19620816 200501 1 008 BANJARMASIN, 16-08-1962	PENATA IIIb 01-10-2018	KEPALA KEPALA SEKSI KEPERAWATAN UPT RSUD K.H. MANDYUR DINAS KESEHATAN Eselon IV. A TMT. Jabatan 28-05-2019	39 Thn 5 Bn	5/26/2019
31	RINI AMBARWATI, ST 19800215 201503 2 001 TULUNGAGUNG, 15-02-1980	PENATA IIIc 01-10-2021	KEPALA SEKSI PELAYANAN KECAMATAN BUMI MAHMUR PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV. A TMT. Jabatan 25-05-2020	41 Thn 11 Bn	5/26/2019
32	RAHMAT AMNUDDIN, S I.Kes 19901023 201502 1 002 BANJARMASIN, 23-10-1990	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-04-2019	KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN KELURAHAN PELAHARI KECAMATAN PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV. B TMT. Jabatan 05-08-2021	31 Thn 3 Bn	5/26/2019

NO	NAMA LENGKAP N I P	PANGKAT GOLONGAN RUANG TMT	JABATAN TERAKHIR ESELON	U SIA	TMT JABATAN PERTAMA ESELON IV
33	PERLIANSYAH, SE 19700819-200701-1-017 PELAHARI, 19-08-1977	PENATA MUDA TINGKAT I III 01-10-2020	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA RUMAH POTONG HEWAN UPT RUMAH POTONG HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATA Eselon IV, B TMT Jabatan 28-05-2018	44 Thn 5 Bn	5/28/2019
34	MAHANI, S.Kad, Ners 19701125-199103-2-007	PENMUDA TINGKAT I (NRS) III	KEPALA SEKSI ASUHAN KEPERAWATAN BIDANG KEPERAWATAN UPT RSUD H. BOELJAIN PELAHARI Eselon IV, A	51 Thn 2 Bn	10/1/2019
35	YULIA AZIZAH, S.KM 19941109-200903-2-009 BANJARMASIN, 09-11-1994	PENATA TINGKAT I III 01-04-2021	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN Eselon IV, A TMT Jabatan 17-06-2021	27 Thn 2 Bn	10/1/2019
36	KARTI, S.Kad 19780319-200604-1-009 SRAGEN, 19-03-1978	PENATA III 01-10-2017	KEPALA KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS UPT RSUD K.H. MANSYUR DINAS KESEHATAN PEMER Eselon IV, A TMT Jabatan 01-10-2019	43 Thn 10 Bn	10/1/2019
37	TALFID HEDAYAT, SHM 19760414-200604-1-027 PELAHARI, 14-04-1976	PENATA III 01-10-2018	KEPALA SEKSI REKAM MEDIS BIDANG PENUNJANG UPT RSUD H. BOELJAIN PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH Eselon IV, A TMT Jabatan 05-06-2020	43 Thn 9 Bn	10/1/2019
38	SUPRIANSYAH S. Kad 19700508-200004-1-019 TANAH LAUT, 08-05-1970	PENATA III 01-10-2020	KEPALA SEKSI MANAJEMEN, REKAYASA LALU LINTAS DAN PENGEMBANGAN MLL, TIMOR BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DIN Eselon IV, A TMT Jabatan 01-10-2019	42 Thn 8 Bn	10/1/2019
39	ASPI SETIA RAHMAT, S.Pi 19820929-201406-1-002 TANAH LAUT, 29-09-1982	PENATA III 01-10-2020	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN PBB DAN BPHTB BIDANG PBB DAN BPHTB BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KA Eselon IV, A TMT Jabatan 06-09-2021	39 Thn 4 Bn	10/1/2019

NO	NAMA LENGKAP N I P	PANGKAT GOLONGAN RIANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON IV
40	RAYU KRISNAYONO ST 19781009 200501 1 008 SURABAYA, 29-10-1978	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-10-2017	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN Eselon IV A TMT. Jabatan 06-09-2021	43 Thn 3 Bn	10/1/2019
41	INDERA GUNAWANA MA 19820510 200604 1 014 BNAYANG, 10-05-1982	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-04-2018	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG BELANJA DAN PEMBIAYAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Eselon IV A TMT. Jabatan 01-10-2018	36 Thn 8 Bn	10/1/2019
42	ARDANSYAH SE 19850801 200701 1 005 TANAH LAUT, 21-08-1985	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-04-2021	KEPALA SUB BAGIAN ASET DAN PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LA Eselon IV A TMT. Jabatan 19-04-2021	36 Thn 7 Bn	10/1/2019
43	KASNO A MA 19810201 201801 1 009 AMBAYANG (TANAH LAUT), 1981	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-04-2021	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKELURAHAN KECAMATAN JORONG PEMERINTAH KABUPATEN TANAH Eselon IV A TMT. Jabatan 19-04-2021	42 Thn 11 Bn	10/1/2019
44	MUHAMMAD ISHAH AMR 19770418 200501 1 009 BATI-BATI, 18-04-1977	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-04-2018	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT KECAMATAN BATU AMPAR PEMERINTAH KABUPATEN TANAH L Eselon IV B TMT. Jabatan 05-06-2020	44 Thn 9 Bn	10/1/2019
45	SAPARIAN AMG 19770126 200012 1 000 BALAHMAHIN, 26-01-1977	PENATA IIIb 01-10-2020	KEPALA SUB BAGIAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KESUDAYAN Eselon IV A TMT. Jabatan 05-09-2021	44 Thn	8/04/2020

NO	NAMA LENGKAP NIP	PANGRAT GOLONGAN RUANG TMT	JABATAN TERAKHIR ESELON	USIA	TMT JABATAN PERTAMA ESELON IV
46	RIU SIRMATI, S.Pd, MM 19720405 196223 2 008	PENATA TINGKAT I IWB 01-10-2019	KEPALA SEKSI KURikulum DAN PENILAIAN BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DINAS PENDIDIKAN Eselon IV, A	49 Thn 9 Bn	6/5/2020
47	YANTI ERUJIANO, S.Ak 19810004 200604 2 031 PELAHARI, 24-05-1981	PENATA IIB 01-10-2021	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BMD SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINT Eselon IV, A TMT Jabatan 01-09-2020	40 Thn 8 Bn	6/5/2020
48	NANI MULLIANA, S.Pd 19840008 200604 2 008 TAPIN, 26-09-1984	PENATA MUDA TINGKAT I IIB 01-10-2019	KEPALA SUB BAGIAN UMLUW DAN KEPELAWANAN SEKRETARIAT BAGIAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANJA Eselon IV, A TMT Jabatan 04-09-2021	37 Thn 8 Bn	6/5/2020
49	AHMAD FAUZIL, S.Kom 19900028 201502 1 004 TABALONG, 29-09-1990	PENATA MUDA TINGKAT I IIB 01-04-2019	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH K Eselon IV, A TMT Jabatan 06-06-2020	31 Thn 4 Bn	6/5/2020
50	DIOHY SAPUTRA, S.STP 19901228 201507 1 001 BALIAR, 28-12-1990	PENATA MUDA TINGKAT I IIB 01-10-2019	LURAH KELURAHAN KAWANG TARUNA KECAMATAN PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV, A TMT Jabatan 06-09-2021	29 Thn 1 Bn	6/5/2020
51	ARMAN, S.ST 19730608 200701 1 017 TAPIN, 08-06-1973	PENATA MUDA TINGKAT I IIB 01-10-2020	KEPALA SEKSI KEDARURATAN BIDANG PEMADAM KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG IPYAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN P Eselon IV, A TMT Jabatan 17-09-2021	48 Thn 7 Bn	6/5/2020

NO	NAMA LENGKAP N I P	PANGKAT GOLONGAN RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON IV
52	RISWAN ARSAR, S. Sca 19820501 250701 1 007 BANJARMASIN, 01-05-1982	PENATA MUDA TINGKAT I I/II 01-10-2021	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA TERMINAL UFT TERMINAL UDAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV. A TMT. Jabatan 05-06-2020	39 Thn 3 Bn	6/5/2020
53	M. IMPHON, SE 19770929 250701 1 021 CURIAN BUNGKUK, 29-09-1977	PENATA MUDA TINGKAT I I/II 01-04-2021	SEKRETARIS SEKRETARIAT KELURAHAN ANGSAU KECAMATAN PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV. B TMT. Jabatan 05-06-2020	44 Thn 4 Bn	6/5/2020
54	ENNY SISILAWATI, A.Md 19820125 250901 2 001 PELAHARI, 25-01-1982	PENATA MUDA TINGKAT I I/II 01-04-2021	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT KECAMATAN PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LA Eselon IV. B TMT. Jabatan 05-06-2020	39 Thn	6/5/2020
55	SALIM, SE 19820215 250601 1 008 TANAH LAUT, 15-02-1982	PENATA MUDA TINGKAT I I/II 01-10-2021	SEKRETARIS SEKRETARIAT KELURAHAN SARANG HALANG KECAMATAN PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV. B TMT. Jabatan 05-06-2020	39 Thn 11 Bn	6/5/2020
56	ILIRYA LESTARI, SE 19930116 251001 2 514 BANJARMASIN, 16-01-1993	PENATA MUDA TINGKAT I I/II 01-10-2021	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT KECAMATAN PANGPATAN PEMERINTAH KABUPATEN TAN Eselon IV. B TMT. Jabatan 05-06-2020	28 Thn	6/5/2020
57	ELLI NURYANTI, A.Md 19851111 251001 2 017 PELAHARI, 11-11-1985	PENATA MUDA TINGKAT I I/II 01-10-2021	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT KECAMATAN JORONG PEMERINTAH KABUPATEN TANAH L. Eselon IV. B TMT. Jabatan 19-04-2021	35 Thn 3 Bn	6/5/2020
58	BAHMAT HADAYAT, A.Md 19750512 250601 1 016 PELAHARI, 12-05-1975	PENATA I/II 01-10-2021	KEPALA SERVIS NAVIGASI, PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN LAUT DAN SUNGAI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT. S Eselon IV. A TMT. Jabatan 05-06-2021	42 Thn 8 Bn	6/5/2020

NO	NAMA LENGKAP N I P	PANGKAT GOLONGAN RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON IV
59	AHMAD MUJAZAKIR S ST 19630329 201101 1 002 BANJARMASIN 29-03-1963	PENATA IIIb 01-10-2019	KEPALA UPT BPP BAJUN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAHAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LUT Eselon IV B TMT Jabatan 08-09-2020	38 Thn 10 Bn	9/8/2023
60	EKA MINNA ARISANTY SE 19840720 200604 2 014 JORONG 20-07-1984	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-04-2018	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV A TMT Jabatan 06-09-2020	37 Thn 8 Bn	9/8/2020
61	MARLINA SE 19810629 200701 2 007 JORONG (TANAH LAUT) 29-06-1981	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-10-2021	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT KECAMATAN JORONG PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV B TMT Jabatan 06-09-2020	40 Thn 8 Bn	9/8/2020
62	SARJARSATINA S PT 19791228 200701 2 013 BANJARMASIN 28-12-1979	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-10-2021	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BALAK LATHAN KERJA UPT BALAK LATHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERI Eselon IV B TMT Jabatan 17-06-2021	43 Thn 1 Bn	9/8/2026
63	DESY DAMAYANTI S Sns 19751222 200901 2 001 PELAHARI 22-12-1975	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-10-2021	KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN KELURAHAN PAGAHANAN KECAMATAN PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV B TMT Jabatan 08-09-2020	46 Thn 1 Bn	9/8/2029
64	PRANOTO DWI PRASETYO SE 19781128 201001 1 003 SRAGEN 28-11-1978	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-10-2021	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KELANGGAN SEKRETARIAT KECAMATAN TAKSUNG PEMERINTAH KABUPATEN TANAH Eselon IV B TMT Jabatan 08-09-2020	45 Thn 2 Bn	9/8/2026

NO	NAMA LENGKAP NIP	PANGKAT GOLONGAN RUANG TMT	JABATAN TERAKHIR ESELON	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON IV
65	RIZ MASHUDI JAMB A.Md 19790321 201101 1 001 SAMPIT (KOTAWARINGIN TIMUR) 21-03- 1979	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-10-2021	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PELABUHAN UPT PELABUHAN DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LA Eselon IV. B TMT Jabatan 08-09-2020	42 Thn 3 Bn	9/9/2020
66	DR. LIDYA NOVITASARI 19961116 201902 2 002 SARJARMASIN 15-11-1996	PENATA IIIc 01-04-2021	KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN KECAMATAN KURAU DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PEMERINTAH KAE Eselon IV. A TMT Jabatan 12-01-2021	25 Thn 2 Bn	1/12/2021
67	SITI RAHMAN S.Pd RUC 200901 2 010 SARJARMASIN 07-03-1974	PENATA IIIc 01-04-2019	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN KELURAHAN PABAHARAN KECAMATAN PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV. B TMT Jabatan 19-04-2021	47 Thn 4 Bn	4/19/2021
68	HARANI SP 19970315 199803 1 017 TANAH LAUT 15-03-1997	PENATA IIIc 01-04-2021	KEPALA UPT BPP PANYIPATAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN TAN Eselon IV. B TMT Jabatan 19-04-2021	24 Thn 10 Bn	4/19/2021
69	NOVAN ISKANDAR ZILKARNAN S.Kea 19771113 201001 1 008 SARJARMASIN 15-11-1977	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-10-2020	KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN DAN PERENCANAAN PENDAPATAN BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN, RETRI Eselon IV. A TMT Jabatan 19-04-2021	44 Thn 2 Bn	4/19/2021
70	HARRY HARRYANTO A.Md 19890622 201001 1 003 TEBING SIRING 22-06-1989	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 05-10-2020	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMER Eselon IV. A TMT Jabatan 19-04-2021	33 Thn 7 Bn	4/19/2021
71	FERRY ARYADIE SE 19690731 200701 1 006 PELAGIARI 31-07-1969	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-04-2021	KEPALA SUB BIDANG PERSENOBARAN DAN VERIFIKASI BIDANG BELANJA DAN PEMBIAYAAN BADAN PENGELOLAAN KEUA Eselon IV. A TMT Jabatan 19-04-2021	51 Thn 0 Bn	4/19/2021

NO	NAMA LENGKAP NTP	PANGKAT GOLONGAN RUANG TMT	JABATAN TERAKHIR ESELON	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON IV
72	ACHMAD SYAFARIADI SE 300601 1 010 BANJARBARU, 29-03-1972	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-04-2021	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DINAS PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMER Eselon IV, A TMT Jabatan 19-04-2021	49 Thn 10 Bn	4/15/2021
73	SURADI HABRIAN, S.I.Kom 19780417 300601 1 001 SARAGA, 17-04-1978	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-04-2021	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN OPERASIONAL LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAS) BIDANG PERHUBUNGAN DARAT D Eselon IV, A TMT Jabatan 08-09-2021	43 Thn 8 Bn	4/15/2021
74	MUKLAMALLA NOVRIYANTI, S STP 19931129 301609 3 001 MOJOKERTO, 23-11-1993	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-04-2021	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PEMER Eselon IV, A TMT Jabatan 19-04-2021	28 Thn 2 Bn	4/15/2021
75	FAISAL KHALE, S Soc 19810201 300701 1 001 PELAHARI, 01-02-1981	PENATA MUDA IIIa 01-10-2019	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAHAN SEKRETARIAT KECAMATAN BAJUN PEMERDITAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV, B TMT Jabatan 19-04-2021	40 Thn 11 Bn	4/15/2021
76	BUDI SULISTHYO, ST 19791115 301101 1 002 BANJARMASIN, 15-11-1979	PENATA TINGKAT I IIIb 01-10-2020	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAHAN SEKRETARIAT UPT RSUD H. SOELASNI PELAHARI PEMERINTAH KABUPATEN Eselon IV, A TMT Jabatan 17-06-2021	42 Thn 2 Bn	6/17/2021
77	FACHRUDIN AZIZ, S PI 300903 1 004 SIDGARJO, 03-12-1990	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-04-2021	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAHAN SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PEMERINTAH K Eselon IV, A TMT Jabatan 17-06-2021	31 Thn 1 Bn	6/17/2021

NO	NAMA LENGKAP M I P	PANGKAT GOLONGAN RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON IV
78	MURDIN, SE 19800101 200006 1 001 PANYIPATAN (TANAH LAUT), 01-01-1980	PENATA MUDA IIIa 01-10-2019	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT KECAMATAN PANYIPATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH L. Eselon IV, B TMT Jabatan 17-09-2021	42 Thn 4 Bn	01/7/2021
79	RELIS SUSILAWATI H, S.P 19800929 200004 2 002 BANJARWASIH, 29-09-1980	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-04-2021	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKOMAN DAN LINGKUNGAN HID Eselon IV, A TMT Jabatan 06-09-2021	41 Thn 4 Bn	06/9/2021
80	ARIE IRWAN, A.Md 201001 1 003 PELAHAR, 18-07-1989	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-04-2021	KEPALA SEKSI PTK PALO DAN PENDIDIKAN NONFORMAL BIDANG PEMENUAN KETENAGAAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBU Eselon IV, A TMT Jabatan 06-09-2021	33 Thn 8 Bn	06/9/2021
81	PUTRI NURLITA, S.P 201708 2 001 TANAH LAUT, 25-03-1995	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-10-2021	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KELURAHAN ANGGAS KECAMATAN PELAHAR-PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Eselon IV, B TMT Jabatan 06-09-2021	26 Thn 10 Bn	06/9/2021
82	ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS S, S.P 19950227 201708 1 001 BANJARWASIH, 27-02-1995	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-10-2021	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT KECAMATAN BALUK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH L. Eselon IV, B TMT Jabatan 06-09-2021	26 Thn 11 Bn	06/9/2021
83	MUHAMMAD ALKASAR HARTONO S, S.P 19900703 201708 1 002 LUWU UTARA, 03-07-1990	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-10-2021	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KELURAHAN KARANG TALLINA KECAMATAN PELAHAR PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAU Eselon IV, B TMT Jabatan 06-09-2021	28 Thn 8 Bn	06/9/2021
84	RICKY WAHID UTAMA, S, S.P 19971225 201708 1 004 INDAGI, 25-12-1997	PENATA MUDA TINGKAT I IIIb 01-10-2021	KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN KELURAHAN SARANG HALANG KECAMATAN PELAHAR Eselon IV, B TMT Jabatan 06-09-2021	25 Thn 1 Bn	06/9/2021

NO.	NAMA LENGKAP N I P	PANGKAT GOLONGAN RUANG T M T	JABATAN TERAKHIR ESELON	U S I A	TMT JABATAN PERTAMA ESELON IV
85	HERI USNADI, A M 1984108 200804 1 003 TANAH LINT, 26-11-1984	PENATA MUDA 8a 01-04-2016	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KELANGAN SEKRETARIAT KECAMATAN HINTAP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH L Eselon IV, B TMT, Jabatan 05-09-2021	37 Thn 2 Bn	9/9/2021
86	BUNAH UTAMI DEVA, A M 19820301 201001 2 018 BANJARBARU, 01-03-1982	PENATA MUDA 8a 01-04-2018	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KELANGAN SEKRETARIAT KECAMATAN KURAU PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LA Eselon IV, B TMT, Jabatan 05-09-2020	39 Thn 10 Bn	9/9/2021
87	KOWAN ANDRIYAN, S, Ti 19830210 201001 1 001 BAROKA, 10-02-1983	PENATA MUDA 8a 01-04-2019	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PER Eselon IV, B TMT, Jabatan 06-09-2021	38 Thn 11 Bn	9/9/2021
88	MULIANTO, S P 19790108 200701 1 021 MALANG, 08-01-1979	PENATA MUDA 8a 01-10-2019	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSAT KESEHATAN HEWAN PAKYIPATAN UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN KECAMATAN PA Eselon IV, B TMT, Jabatan 06-09-2021	51 Thn	9/9/2021
89	KISRAWATI POPPY, S, Sns 19820210 201001 2 001 SANGARMASIN, 10-02-1982	PENATA MUDA 8a 01-10-2020	SEKRETARIS SEKRETARIAT KELURAHAN PELAHARI KECAMATAN PELAHARI Eselon IV, B TMT, Jabatan 06-09-2021	39 Thn 8 Bn	9/9/2021
90	BUJYANTO, S, Pt 19790125 200501 1 003 BASARANG, 25-01-1979	PENATA MUDA 8a 01-04-2021	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSAT KESEHATAN HEWAN BATU AMPAR UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN KECAMATAN BA Eselon IV, B TMT, Jabatan 06-09-2021	48 Thn	9/9/2021

KASUS HUKUMAN DISIPLIN ANK TAHUN 2021

NO	NAMA	SDP	PANGKAT KESEKELA	TARGET DISIPLIN	JABATAN	UNIT KERJA	BIKOR KESEKELA	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TANGGAL
1	ABDUL KADIR HUSNAN	KEPIMPINAN	KESEKELA	Target 2021	KESEKELA	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	2021-01-01
2	ABDUL KADIR HUSNAN	KEPIMPINAN	KESEKELA	Target 2021	KESEKELA	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	2021-01-01
3	ABDUL KADIR HUSNAN	KEPIMPINAN	KESEKELA	Target 2021	KESEKELA	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	2021-01-01
4	ABDUL KADIR HUSNAN	KEPIMPINAN	KESEKELA	Target 2021	KESEKELA	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	2021-01-01
5	ABDUL KADIR HUSNAN	KEPIMPINAN	KESEKELA	Target 2021	KESEKELA	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	2021-01-01
6	ABDUL KADIR HUSNAN	KEPIMPINAN	KESEKELA	Target 2021	KESEKELA	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	2021-01-01
7	ABDUL KADIR HUSNAN	KEPIMPINAN	KESEKELA	Target 2021	KESEKELA	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	2021-01-01
8	ABDUL KADIR HUSNAN	KEPIMPINAN	KESEKELA	Target 2021	KESEKELA	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	2021-01-01
9	ABDUL KADIR HUSNAN	KEPIMPINAN	KESEKELA	Target 2021	KESEKELA	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	KEPIMPINAN	2021-01-01

Lampiran

DAFTAR NOMINATIF CALON PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN 2021 PENDIDIKAN YANG DISESUAIKAN S-1 KE ATAS

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENDIDIKAN YANG DISESUAIKAN	JABATAN/UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	ROHMELA, A.MU (1988620 201502 2 003)	Pengantar Tingkat I / (IDM)	D-III Akuntansi	S-1 Akuntansi	Pengelola Kegiatan Sosial dan Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang dan Pertanahan	
2	MUBILIL, SURIYA IRDIH (1978023 201701 2 009)	Pengantar Tingkat I / (IDM)	SMA	S-1 Ilmu Administrasi Negara	Pengadministrasian Umum pada Dinas Perencanaan, Model dan Pelaksanaan Tugas pada Dinas	
3	MUHAMMAD, ITHLIK AGHSANIR (1981026 201001 1 012)	Pengantar Tingkat I / (IDM)	Sekolah Persekolah Pertanian (SPP)	S-1 Perikanan	Pengadministrasian Umum pada Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan	
4	RIKARTIANO (1965101 201006 1 001)	Pengantar / (IDK)	D-III Pendidikan	S-1 Pendidikan Ilmu Tarbi	Umum pada UPD D-SMP Negeri 4 Kota-Tali Karaman Kota-Tali	
5	MULIAHA (1966001 201101 1 001)	Pengantar / (IDK)	SMA	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	Pengadministrasian Umum pada Kecamatan Kota	
6	USMAN, JANATIN (1975111 201501 1 009)	Pengantar / (IDK)	SMA/ A, MTs	S-1 Teknologi Hasil Tani	Pengadministrasian Kecamatan pada Kecamatan Kota-Tali	
7	ZAINAL, AHDIN, A.MU (ALNU) (1976100 201006 1 003)	Pengantar Muda Tingkat I / (IDK)	D-III/II Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1 Pendidikan dan Kesehatan	Guru pada UPD SD Negeri 2, Paksi Sari Kecamatan Tumbang Ujung	
8	BURHANUDDIN (1975111 201006 2 004)	Pengantar Muda Tingkat I / (IDK)	SMA, Paket C	S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Guru SD pada UPD SD Negeri 1 Bant Adangan Kecamatan Kotag	
9	MURRANALI (19811006 201001 2 014)	Pengantar Muda Tingkat I / (IDK)	Paket C	S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Kecamatan Kotag	
10	WITARSINI (19861016 201701 2 020)	Pengantar Muda Tingkat I / (IDK)	Paket C	S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Pengajar Sekolah pada TK, Asyraf Hassanul Ahsin 1 Kecamatan Kotag	
11	IRUKIRIMYANI (19781020 201001 2 014)	Pengantar Muda / (IDK)	Paket C	S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadministrasian Umum pada TK, Asyraf Hassanul Ahsin 1 Kecamatan Kotag	

**DAFTAR NOMINATIF CALON PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN 2021
PENDIDIKAN YANG DISESUAIKAN D-III KE BAWAH**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/DOL RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENDIDIKAN YANG DISESUAIKAN	JABATAN/UNIT KERJA	KETERANGAN
1	KUSNAYATI 19740903 200701 2-029	Juru Pengantar I / (Jd)	Paket B	Paket C	Pengajar Sekolah Terpadu Kanak-Kanak pada TK Alimiyah Darussalam Alif, Kecamatan Kumpang	
2	RIMBAHATI, FADZALI 19721208 200801 2-045	Juru Pengantar I / (Jd)	Paket B	Paket C	Pengajar Sekolah pada TK Nur Nurul Haq Kecamatan Jorong	
3	KALIMATI 19790402 201101 1-001	Juru / (Jd)	Paket B	Paket C	Pengasas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	

Copyright 2014, William Penn Law, University of Pennsylvania, School of Law, 3441 Locust Walk, Philadelphia, PA 19104-6399

Sl. No.	Project Name	Project ID	Project Type	Project Status	Project Manager	Project Location	Project Description	Project Start Date	Project End Date	Project Budget	Project Cost	Project Profit	Project Margin	Project Risk	Project Impact
1	Project A	001	Software Development	Completed	John Doe	New York, USA	Developed a new software application for the company.	2020-01-01	2020-03-31	\$100,000	\$90,000	\$10,000	10%	Low	High
2	Project B	002	Hardware Development	In Progress	Jane Smith	London, UK	Developed a new hardware device for the company.	2020-04-01	2020-06-30	\$200,000	\$180,000	\$20,000	10%	Medium	Medium
3	Project C	003	Marketing Campaign	Completed	Mike Johnson	Los Angeles, USA	Developed a new marketing campaign for the company.	2020-07-01	2020-08-31	\$50,000	\$45,000	\$5,000	10%	Low	Medium
4	Project D	004	Research & Development	On Hold	Sarah Brown	San Francisco, USA	Developed a new research and development project for the company.	2020-09-01	2020-12-31	\$300,000	\$250,000	\$50,000	16.67%	High	Low
5	Project E	005	Customer Support	Completed	David White	Chicago, USA	Developed a new customer support system for the company.	2021-01-01	2021-03-31	\$75,000	\$65,000	\$10,000	13.33%	Low	Medium
6	Project F	006	Product Design	In Progress	Emily Green	Seattle, USA	Developed a new product design for the company.	2021-04-01	2021-06-30	\$150,000	\$130,000	\$20,000	13.33%	Medium	Medium
7	Project G	007	Quality Assurance	Completed	Frank Black	Phoenix, USA	Developed a new quality assurance system for the company.	2021-07-01	2021-08-31	\$60,000	\$50,000	\$10,000	16.67%	Low	Medium
8	Project H	008	System Integration	On Hold	Grace King	Portland, USA	Developed a new system integration project for the company.	2021-09-01	2021-12-31	\$250,000	\$200,000	\$50,000	20%	High	Low
9	Project I	009	Project Management	Completed	Henry Lee	San Diego, USA	Developed a new project management system for the company.	2022-01-01	2022-03-31	\$80,000	\$70,000	\$10,000	12.5%	Low	Medium
10	Project J	010	Business Development	In Progress	Ivy Chen	Beijing, China	Developed a new business development project for the company.	2022-04-01	2022-06-30	\$120,000	\$100,000	\$20,000	16.67%	Medium	Medium
11	Project K	011	Software Development	Completed	Jack Wilson	London, UK	Developed a new software application for the company.	2022-07-01	2022-08-31	\$90,000	\$80,000	\$10,000	11.11%	Low	Medium
12	Project L	012	Hardware Development	In Progress	Karen Davis	San Francisco, USA	Developed a new hardware device for the company.	2022-09-01	2022-12-31	\$180,000	\$150,000	\$30,000	16.67%	Medium	Medium
13	Project M	013	Marketing Campaign	Completed	Leo Miller	New York, USA	Developed a new marketing campaign for the company.	2023-01-01	2023-03-31	\$60,000	\$50,000	\$10,000	16.67%	Low	Medium
14	Project N	014	Research & Development	On Hold	Mia Taylor	Los Angeles, USA	Developed a new research and development project for the company.	2023-04-01	2023-12-31	\$350,000	\$280,000	\$70,000	20%	High	Low
15	Project O	015	Customer Support	Completed	Noah White	Chicago, USA	Developed a new customer support system for the company.	2023-01-01	2023-03-31	\$70,000	\$60,000	\$10,000	14.29%	Low	Medium
16	Project P	016	Product Design	In Progress	Olivia Green	Seattle, USA	Developed a new product design for the company.	2023-04-01	2023-06-30	\$160,000	\$140,000	\$20,000	12.5%	Medium	Medium
17	Project Q	017	Quality Assurance	Completed	Peter Black	Phoenix, USA	Developed a new quality assurance system for the company.	2023-07-01	2023-08-31	\$65,000	\$55,000	\$10,000	15.38%	Low	Medium
18	Project R	018	System Integration	On Hold	Quinn King	Portland, USA	Developed a new system integration project for the company.	2023-09-01	2023-12-31	\$260,000	\$210,000	\$50,000	19.23%	High	Low
19	Project S	019	Project Management	Completed	Rachel Lee	San Diego, USA	Developed a new project management system for the company.	2024-01-01	2024-03-31	\$85,000	\$75,000	\$10,000	11.76%	Low	Medium
20	Project T	020	Business Development	In Progress	Sam Chen	Beijing, China	Developed a new business development project for the company.	2024-04-01	2024-06-30	\$130,000	\$110,000	\$20,000	15.38%	Medium	Medium

Sl. No.	Project Name	Project Type	Project Category	Project Status	Project Start Date	Project End Date	Project Manager	Project Sponsor	Project Budget	Project Cost	Project Revenue	Project Profit	Project Risk	Project Impact	Project Notes
1	Project A	Software Development	Software Development	Completed	2020-01-01	2020-03-31	John Doe	John Doe	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	Low	High	Project A was completed successfully.
2	Project B	Software Development	Software Development	In Progress	2020-04-01	2020-06-30	John Doe	John Doe	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$0	Low	High	Project B is currently in progress.
3	Project C	Software Development	Software Development	On Hold	2020-07-01	2020-09-30	John Doe	John Doe	\$100,000	\$0	\$0	\$0	Low	High	Project C is currently on hold.
4	Project D	Software Development	Software Development	Completed	2020-10-01	2020-12-31	John Doe	John Doe	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	Low	High	Project D was completed successfully.
5	Project E	Software Development	Software Development	In Progress	2021-01-01	2021-03-31	John Doe	John Doe	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$0	Low	High	Project E is currently in progress.
6	Project F	Software Development	Software Development	On Hold	2021-04-01	2021-06-30	John Doe	John Doe	\$100,000	\$0	\$0	\$0	Low	High	Project F is currently on hold.
7	Project G	Software Development	Software Development	Completed	2021-07-01	2021-09-30	John Doe	John Doe	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	Low	High	Project G was completed successfully.
8	Project H	Software Development	Software Development	In Progress	2021-10-01	2021-12-31	John Doe	John Doe	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$0	Low	High	Project H is currently in progress.
9	Project I	Software Development	Software Development	On Hold	2022-01-01	2022-03-31	John Doe	John Doe	\$100,000	\$0	\$0	\$0	Low	High	Project I is currently on hold.
10	Project J	Software Development	Software Development	Completed	2022-04-01	2022-06-30	John Doe	John Doe	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	Low	High	Project J was completed successfully.
11	Project K	Software Development	Software Development	In Progress	2022-07-01	2022-09-30	John Doe	John Doe	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$0	Low	High	Project K is currently in progress.
12	Project L	Software Development	Software Development	On Hold	2022-10-01	2022-12-31	John Doe	John Doe	\$100,000	\$0	\$0	\$0	Low	High	Project L is currently on hold.
13	Project M	Software Development	Software Development	Completed	2023-01-01	2023-03-31	John Doe	John Doe	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	Low	High	Project M was completed successfully.
14	Project N	Software Development	Software Development	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	John Doe	John Doe	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$0	Low	High	Project N is currently in progress.
15	Project O	Software Development	Software Development	On Hold	2023-07-01	2023-09-30	John Doe	John Doe	\$100,000	\$0	\$0	\$0	Low	High	Project O is currently on hold.
16	Project P	Software Development	Software Development	Completed	2023-10-01	2023-12-31	John Doe	John Doe	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	Low	High	Project P was completed successfully.
17	Project Q	Software Development	Software Development	In Progress	2024-01-01	2024-03-31	John Doe	John Doe	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$0	Low	High	Project Q is currently in progress.
18	Project R	Software Development	Software Development	On Hold	2024-04-01	2024-06-30	John Doe	John Doe	\$100,000	\$0	\$0	\$0	Low	High	Project R is currently on hold.
19	Project S	Software Development	Software Development	Completed	2024-07-01	2024-09-30	John Doe	John Doe	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	Low	High	Project S was completed successfully.
20	Project T	Software Development	Software Development	In Progress	2024-10-01	2024-12-31	John Doe	John Doe	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$0	Low	High	Project T is currently in progress.